

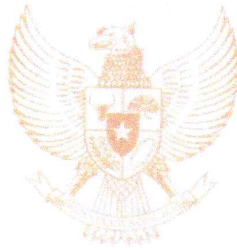


**PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2025**



PEMERINTAH KOTA CIREBON

2025



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025, untuk keberlanjutan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, responsif dan transparan perlu dilakukan perubahan pada tahun berjalan;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan tahun berjalan, perlu penyesuaian asumsi arah kebijakan pembangunan, arah kebijakan keuangan daerah, rencana prioritas program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan adanya SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025;

[Handwritten signature]

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana



- telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

K *a*

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 75);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 80);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 145);
34. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 35);
35. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon



- Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 33);
36. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 15);
37. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 16);
38. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 2);
39. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 42), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 49);
40. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6);
41. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 37);
42. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 42);
43. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 58);



44. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 44);
45. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dokumen RKPD Kota Cirebon Tahun 2025, disusun dengan sistematika:
 - a. bab I (satu) pendahuluan;
 - b. bab II (dua) evaluasi hasil triwulan II tahun berkenaan;
 - c. bab III (tiga) kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. bab IV (empat) sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab V (lima) rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. bab VI (enam) penutup.
- (2) Isi dan uraian RKPD Kota Cirebon Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 Juli 2025

WALI KOTA CIREBON,



EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 19

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan.....	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum	I-2
1.3	Maksud Dan Tujuan	I-5
1.4	Sistematika.....	I-6
Bab II	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I Tahun 2025.....	II-1
2.1	Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1	Pemenuhan Pelayanan Dasar Minimal	II-1
2.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Hasil Rpkd Kota Cirebon Triwulan I Tahun 2025	II-2
2.1.3	Capaian Kinerja Indikator Makro Dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cirebon Tahun 2024	II-2
2.1.4	Evaluasi Pelaksanaan Program RKPDSampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	II-8
2.1.5	Evaluasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	II-17
2.1.6	Faktor Pendorong Dan Penghambat Pencapaian Kinerja	II-47
2.2	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-48
2.2.1	Permasalahan Pembangunan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-48
2.2.2	Isu Strategis	II-51
Bab III	Kerangka Ekonomi Keuangan Daerah	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-2
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-6
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-7
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-11
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-14
3.3	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi	III-17
Bab IV	Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah	IV-1
4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2	Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....	IV-27
4.3	Prioritas Pembangunan Nasional	IV-35
4.4	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat.....	IV-37
4.5	Program Pembangunan Tahun 2025.....	IV-38
Bab V	Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Kota Cirebon Tahun 2025	V-1
Bab VI	Penutup	VI-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian.

Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon pada tahun 2025. Tetapi dikarenakan munculnya beberapa permasalahan serta perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perubahan RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan untuk mengidentifikasi kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.



Dokumen Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan akan disepakati bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan RKPD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016



- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262).



33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
37. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
38. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Satu Atap;
40. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026
41. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan dan Prioritas pembangunan Walikota dan Wakil walikota Periode 2025-2030, serta penyesuaian kerangka pendanaan akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan dan penganggaran yang sudah berjalan berdasarkan evaluasi Tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

b) Tujuan

Tujuan perubahan terhadap RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;



2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025;
3. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025;
4. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2025;
5. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).

1.4 Sistematika

Perubahan RKPD Kota Cirebon Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka panjang dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi Perubahan RKPD yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan.

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I Tahun 2025.

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan.

2.2. Permasalahan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran berdasarkan dokumen RPJPD, selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun rencana, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025, instansi pelaksana/PD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

Adanya Undang-Undang terbaru nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat, luas Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau saat ini ditetapkan seluas 39,398 km². Adanya mutasi dan pertumbuhan penduduk di Kota Cirebon, jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2024 sebesar 356.629 jiwa yang memiliki kepadatan penduduk 9.036 jiwa/km² dengan pertumbuhan penduduk mencapai 1,2 %.

Kondisi perekonomian Kota Cirebon tahun 2024 dilihat dari Pertumbuhan PDRB Per Kapita 4,14 (PDRB ADHB per kapita 88,56 juta rupiah dan PDRB ADHK Per Kapita 57,66 juta rupiah) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02. Sedangkan besaran inflasi Kota Cirebon di tahun 2024 sebesar 1,1.

Tersendatnya laju pembangunan yang disebabkan adanya keterbatasan anggaran mengakibatkan adanya hambatan dalam proses pemeliharaan infrastruktur dan pencapaian pemenuhan pelayanan dasar disamping adanya pergantian kepemimpinan nasional dan daerah sehingga diperlukan penyesuaian perubahan perencanaan pada tahun 2025.

2.1.1 PEMENUHAN PELAYANAN DASAR MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

Pelaksanaan Penerapan SPM pada tahun 2024 dimulai dengan pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 067.05/Kep.81-PEM/2024 yang disahkan pada tanggal 12 Februari 2024 yang terdiri atas unsur dari beberapa perangkat daerah diantaranya :

1. Sekretariat Daerah;
2. Inspektorat Daerah Kota Cirebon;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon;
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon;
2. Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
3. Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon;
6. Dinas Sosial Kota Cirebon;
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon;
8. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon.

Keberhasilan Capaian Penerapan SPM Tahun 2024 bisa dilihat dari beberapa aspek :



Tabel II-1 Indeks Capaian SPM

No	Urusan	Capaian SPM
1.	Pendidikan	90.00 %
2.	Kesehatan	98.67 %
3.	Pekerjaan Umum	93.15 %
4.	Perumahan Rakyat	100 %
5.	Trantibumlinmas	99.67 %
6.	Sosial	100 %
.Kota Cirebon		96.92 %

Tabel II-2 Alokasi Anggaran SPM

No	Urusan	Alokasi Anggaran untuk SPM (Rp.)	Persentase Anggaran SPM terhadap PAGU SKPD
1.	Pendidikan	33,037,595,029	0.08%
2.	Kesehatan	10,540,656,336	1.71%
3.	Pekerjaan Umum	6.729.474.127	7.99
4.	Perumahan Rakyat	270,206,540	1.36%
5.	Trantibumlinmas	17,477,425,555	49.78%
6.	Sosial	1,066,917,833	10.89%
Kota Cirebon		68,852,068,880	3.97%

Seperti disajikan pada tabel alokasi anggaran SPM, tahun 2024 Pemerintah Kota Cirebon mengalokasikan untuk Penerapan Standar Belanja Minimal sebesar 3.97% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon. Anggaran tersebut perlu ditingkatkan karena ada catatan pada hasil temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat terhadap penerapan SPM di Tahun 2023 yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan surat nomor T/000.9.9/49/PEM/2025. Berikut catatan hasil monitoring Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Cirebon:

1. Data dasar terkait Penerima Layanan SPM beberapa perangkat daerah belum bisa menyajikan data yang valid;
2. Dari sisi perencanaan masih banyak ditemukan adanya ketidak konsistenan dalam data;
3. Penghitungan anggaran untuk penerapan SPM masih perlu pendampingan;
4. Penetapan target dalam renstra dan renja masih ada perbedaan.

2.1.2 EVALUASI PELAKSANAAN HASIL RPKD KOTA CIREBON TRIWULAN I TAHUN 2025

Pada tahap penyusunan Perubahan RPKD Kota Cirebon Tahun 2025, telah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPKD sejak tahapan persiapan sampai dengan penetapan RPKD, yang bertujuan untuk memastikan bahwa Perubahan RPKD Kota Cirebon Tahun 2025 telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPKD, serta menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD.

2.1.3 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA CIREBON TAHUN 2024

Perubahan RPKD Kota Cirebon Tahun 2025 merupakan penjabaran dari perencanaan RPD periode tahun 2024-2026, untuk itu capaian indikator makro



menjadi tolok ukur pembangunan yang perlu dievaluasi secara periodik untuk mengetahui kinerja sekaligus menjadi masukan bagi perencanaan periode berikutnya. Sandingan capaian indikator makro Kota Cirebon dengan indikator makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Berdasarkan data pada tabel di bawah, diperoleh informasi bahwa:

- A. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon selama tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, namun tetap berada di bawah Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon hanya mencapai 5,01 persen dari target sebesar 5,50-6,15 persen di tahun 2024 mencapai 5,18 persen dari target 4,49 persen.
- B. Perkembangan tingkat kemiskinan pada kurun waktu 2024 di Kota Cirebon mengalami kemajuan dengan semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin meskipun masih berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Dengan semakin membaiknya pencegahan dan penanganan COVID-19 serta berbagai upaya pemulihan perekonomian atas dampak terjadinya pandemic COVID-19, tingkat kemiskinan di Kota Cirebon di tahun 2024 mencapai 9,02 persen sedikit lebih rendah dibandingkan target sebesar 8,94 persen.
- C. TPT di Kota Cirebon pada tahun 2024 mencapai 6,29 persen cukup tinggi bila dibandingkan target di tahun 2024 sebesar 10,50 persen. Namun di tahun 2022 dan 2023 TPT Kota Cirebon sudah mampu mencapai bahkan melampaui target, hal ini menunjukkan perkembangan yang positif bagi perekonomian Kota Cirebon.
- D. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kota Cirebon, baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Dilihat dari trennya, IPM Kota Cirebon mengalami peningkatan di tahun 2024 yakni dari 77,45 di tahun 2023 menjadi 78,09 di tahun 2024.

Capaian indikator makro Kota Cirebon Tahun 2024 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel II-3 Capaian Indikator Makro Kota Cirebon Tahun 2024

No.	Indikator Makro	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2024 (Persen)	Ket
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	76,76	78,09	101,73	
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,75	10,53	97,95	
3.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,15	13,17	100,15	
4.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,77	75,48	103,72	



No.	Indikator Makro	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2024 (Persen)	Ket
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,49	5,18	115,37	
6.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,94	9,02	99,10	
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	10,50	6,29	140	
8.	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah	12.500	12.869	102,95	

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2024

Capaian beberapa indikator makro diatas menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Cirebon masih perlu memberikan perhatian yang besar terkait masalah pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Berbagai lapangan usaha diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada sehingga masyarakat dapat memiliki penghasilan dan penghidupan yang lebih layak. Pengendalian tingkat pengangguran dan kemiskinan serta ketimpangan pendapatan diharapkan dapat mendorong pembangunan manusia yang diindikasikan dengan IPM Kota Cirebon.

Berdasarkan capaian IKU Tahun 2024, diketahui bahwa hampir seluruh indikator memiliki predikat Sangat Tinggi. Predikat Sangat Tinggi memiliki tingkat capaian kinerja $91\% \leq 100\%$, sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan capaian IKU pada Tabel II-159, hampir seluruh indikator pada tahun 2024 memiliki realisasi yang mencapai target atau bahkan melampaui target. Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon Tahun 2024 dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut;

Tabel II-4 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Tingkat Capaian Tahun 2024 (%)	Ket
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,16	13,17	100,07	
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,75	10,53	97,95	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	88	95,37	108,37	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Tingkat Capaian Tahun 2024 (%)	Ket
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Cirebon	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,18	75,48	100,34	
		Prevalensi Balita Stunting	Persen	14	13,04	106,64	
		Angka Kejadian TB	/100 ribu penduduk	497	1259	-53,32	
		Skor Pola Pangan Harapan	Poin	92	92,6	100,7	
3.	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp	12.550	12.869	102,54	
		Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Jangkauan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	100	99,78	99,78	
4.	Terkendalnya jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,98	1,22	75,51	
5.	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	Angka Partisipasi Masyarakat Olahraga	Persen	54	55	101,85	
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Terbina	Persen	65	66,07	101,65	
6.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender/ IPG	Poin	94,47	95,55	101,14	
		Indeks Pemberdayaan Gender/ IDG	Poin	78,70	77,03	97,88	
		Jumlah Skor Evaluasi Kota Layak anak	Poin	550	638,52	116	
7.	Menurunnya dampak perubahan iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	7,11	7,99	112,38	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Tingkat Capaian Tahun 2024 (%)	Ket
8.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persen	76,50	77,45	101,24	
9.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,65	6,29	117,8	
10.	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (ADHB)	Persen	10,87	10,09	92,82	
		Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (ADHB)	Persen	5,60	5,72	102,14	
		Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (ADHB)	Persen	30,46	27,31	89,66	
		Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian dan Perikanan (ADHB)	Persen	0,34	0,32*	94,12*	
11.	Meningkatnya investasi penanaman modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen	4,68	0,36	64,07	
12.	Meningkatnya pelayanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,20	4,13	129,06	
13.	Meningkatnya dukungan pembangunan Kota Cirebon berbasis kelitbangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Kelitbangan yang Diserahkan untuk Dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan/ atau <i>Stakeholders</i>	Persen	71	71,43	100,61	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Tingkat Capaian Tahun 2024 (%)	Ket
14.	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Poin	71,00	69,04	97,24	
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WDP/ WTP	WTP	WTP	100	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Cirebon	Poin	82	86,59	105,60	
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	poin	3	3,2	107	
		Indeks Perencanaan Pembangunan	Poin	95,58	97,94	102,47	
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Poin	70	78,75	112,5	
15.	Meningkatnya kualitas pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	90,91	90,91	100	
		Persentase Kelurahan Swasembada	Persen	40,91	59,09	144,44	
16.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas politik daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,50	0,77	154	
		Jumlah Daerah Rawan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Lokasi	12	12	100	
		Kejadian Konflik Kebangsaan, Nasionalisme dan Antar Umat Beragama	Kasus	0	0	100	

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2024 Kota Cirebon.



2.1.4 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun setiap tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Evaluasi Terhadap Hasil RKPD perlu dilakukan untuk melihat:

1. Konsistensi dan kesesuaian antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Konsistensi dan kesesuaian antara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Menginventarisir kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bahan untuk memperbaiki perencanaan pembangunan yang lebih baik di tahun berikutnya.

Pengukuran capaian kinerja dalam Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Triwulan I Tahun 2025 dilakukan melalui pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase.

Secara umum, persentase pencapaian kinerja pembangunan daerah dihitung dengan rumus yang hasilnya mengandung pengertian bahwa semakin tinggi persentase menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Namun demikian, dalam pengukuran ini diperhatikan pula karakteristik indikator, dengan kondisi yang berbeda dan harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja. Kondisi tersebut yaitu:



1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja kondisi yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil penilaian menggunakan rumus diatas dapat menunjukkan rata-rata capaian indikator kinerja program/kegiatan. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja program/kegiatan tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel II-5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat rendah



Daerah Kota Cirebon Triwulan I Tahun 2025, berdasarkan Urusan/Bidang Urusan setelah dilakukan evaluasi ditemukan kondisi sebagai berikut:

A. Urusan/Bidang Urusan Yang Berkinerja Sangat Tinggi

Kriteria kinerja sangat tinggi apabila prosentase penyerapan keuangan dan capaian kinerja $91\% \geq$, dan belum ditemukan pada penyelenggaraan Urusan/Bidang Urusan di triwulan I Tahun 2025.

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja sangat tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu memang pencapaian kinerja yang tercapai dengan maksimal, namun bila dilihat dari penyerapan anggaran yang sangat rendah bisa diasumsikan bahwa pencapaian kinerja terkesan tinggi dikarenakan perencanaan target yang terlalu rendah atau database kurang akurat karena laporan dikirim tanpa melampirkan data/bukti dukung realisasi capaian kinerja, namun masih termasuk wajar bila di triwulan I Tahun 2025 belum ada capaian kinerja yang sangat tinggi.

Dalam hal ini disampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam mempertahankan capaian kinerja sangat tinggi adalah melakukan telaahan terhadap aspek-aspek sistem administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi, agar capaian kinerja penyerapan keuangan yang sangat tinggi didukung oleh penyelenggaraan sistem administrasi yang baik, beserta kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban pengeluaran keuangan yang baik.

B. Urusan/Bidang Urusan Yang Berkinerja Tinggi

Kriteria kinerja tinggi apabila prosentase penyerapan keuangan dan pencapaian kinerja $76\% \leq 90\%$, dan belum ditemukan pada penyelenggaraan Urusan/Bidang Urusan di triwulan I Tahun 2025.

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu memang pencapaian kinerja yang tercapai dengan maksimal, namun bila dilihat dari penyerapan anggaran yang masih sangat rendah bisa diasumsikan bahwa pencapaian kinerja terkesan tinggi dikarenakan perencanaan target yang terlalu rendah atau perhitungan dalam penyajian laporan kurang tepat karena laporan dikirim tanpa melampirkan bukti/data dukung realisasi capaian kinerja.

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja tinggi, disampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam mempertahankan capaian kinerja tinggi adalah melakukan telaah terhadap aspek-aspek sistem administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi, agar capaian kinerja penyerapan keuangan yang tinggi didukung oleh penyelenggaraan sistem



administrasi yang baik, beserta kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban pengeluaran keuangan yang baik.

C. Pada Urusan/ Bidang Urusan Yang Berkinerja Sedang

Kriteria kinerja sedang apabila prosentase penyerapan keuangan dan pencapaian kinerja antara $66\% \leq 75\%$, dan belum ditemukan pada penyelenggaraan Urusan/Bidang Urusan di triwulan I Tahun 2025.

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja sedang, disampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja supaya meningkat adalah melakukan telaahan terhadap kelengkapan dokumen-dokumen perencanaan teknis seperti kerangka acuan kerja (KAK), jadwal (schedule) kegiatan, time-line rencana anggaran kas, standar operating procedure (SOP), dll agar hal-hal yang telah direncanakan dengan baik segera dapat diimplementasikan sesuai jadwal dan time-line dan anggaran kas yang telah disusun.

D. Urusan/ Bidang Urusan Yang Berkinerja Rendah

Kriteria kinerja rendah apabila prosentase penyerapan keuangan dan pencapaian kinerja antara $51\% \leq 65\%$, dan ini ditemukan pada penyelenggaraan Urusan/Bidang Urusan:

1. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Pencapaian kinerja rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 60% namun penyerapan anggaran sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 9%).

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja rendah, disampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan ekstra yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja supaya meningkat adalah melakukan telaah terhadap organisasi pelaksana kegiatan termasuk Sumber Daya Manusia dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam KAK dan SOP, agar hal-hal yang dinilai lambat dan tertinggal bila dibandingkan dengan schedule dan time-line kegiatan segera dapat diselesaikan.

E. Urusan/ Bidang Urusan Yang Berkinerja Sangat Rendah

Kriteria kinerja sangat rendah apabila prosentase penyerapan keuangan dan pencapaian kinerja antara $\leq 50\%$, dan ini ditemukan pada penyelenggaraan Urusan/Bidang Urusan:

1. Pendidikan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 2% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 7%).



2. Kesehatan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 2% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 9%).
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 7% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 3%).
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 3% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 3%).
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 4% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 11%).
6. Sosial (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 4% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 16%).
7. Tenaga Kerja (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 39% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 3%).
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 4%).
9. Pangan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 23% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 8%).
10. Pertanahan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0%).
11. Lingkungan Hidup (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 21% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 9%).
12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 31% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0,25%).
13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 2%).



14. Perhubungan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 18% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 13%).
15. Komunikasi dan Informatika (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 33% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 4%).
16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 3% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 4%).
17. Penanaman Modal (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 44% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 12%).
18. Kepemudaan dan Olahraga (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 6% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 6%).
19. Statistik (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0%).
20. Persandian (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0%).
21. Kebudayaan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 22% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0%).
22. Perpustakaan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 12% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 41%).
23. Kearsipan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 3%).
24. Kelautan dan Perikanan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 24,69% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 9,83%).
25. Pariwisata (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 44,75% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 4,20%).
26. Pertanian (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 20,47% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai



- capaian rata-rata sebesar 11,33%).
27. Perdagangan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 30,50% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 7,30%).
 28. Perindustrian (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 3% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 9%).
 29. Pendukung Urusan Pemerintahan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 20,50% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 9,50%).
 30. Perencanaan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 34% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 14%).
 31. Keuangan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 8% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 10%).
 32. Kepegawaian (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 2% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 29%).
 33. Pendidikan dan Pelatihan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 0% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 19%).
 34. Penelitian dan Pengembangan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 19% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 11%).
 35. Pengawasan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 5% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 22%).
 36. Pemerintahan Umum Kewilayahan (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 17% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 4%).
 37. Urusan Pemerintahan Umum (Pencapaian kinerja sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 45,80% dan penyerapan anggaran juga sangat rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 3,10%).

Pada Urusan/Bidang Urusan yang berkinerja sangat rendah, disampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan-tindakan ekstra yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja supaya meningkat adalah melakukan telaah terhadap organisasi pelaksana kegiatan termasuk SDM dan manajemen pelaksanaan



kegiatan yang dituangkan dalam KAK dan SOP, agar hal-hal yang dinilai lambat dan tertinggal bila dibandingkan dengan schedule dan time-line kegiatan segera dapat diselesaikan.

Dari hasil perhitungan keseluruhan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam setiap Bidang Urusan, diperoleh informasi bahwa Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon Triwulan I Tahun 2025 ini **memiliki Pencapaian kinerja Sangat Rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 17,63% dan penyerapan anggaran yang juga Sangat Rendah dengan nilai capaian rata-rata sebesar 10,82%**. Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja dan Anggaran masing-masing urusan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Masing-masing Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah Kota Cirebon
Triwulan I Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	URUSAN WAJIB	32,67	Sangat Rendah	28,28	Sangat Rendah
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	48,00	Sangat Rendah	50,00	Sangat Rendah
1.01	Pendidikan	2,00	Sangat Rendah	7,00	Sangat Rendah
1.02	Kesehatan	2,00	Sangat Rendah	9,00	Sangat Rendah
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7,00	Sangat Rendah	3,00	Sangat Rendah
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3,00	Sangat Rendah	3,00	Sangat Rendah
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	4,00	Sangat Rendah	11,00	Sangat Rendah
1.06	Sosial	4,00	Sangat Rendah	16,00	Sangat Rendah
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	17,33	Sangat Rendah	6,57	Sangat Rendah
2.07	Tenaga Kerja	39,00	Sangat Rendah	3,00	Sangat Rendah
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	Sangat Rendah	4,00	Sangat Rendah
2.09	Pangan	23,00	Sangat Rendah	8,00	Sangat Rendah
2.10	Pertanahan	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
2.11	Lingkungan Hidup	21,00	Sangat Rendah	9,00	Sangat Rendah
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60,00	Rendah	9,00	Sangat Rendah
2.13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	31,00	Sangat Rendah	0,25	Sangat Rendah
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	Sangat Rendah	2,00	Sangat Rendah



No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
2.15	Perhubungan	18,00	Sangat Rendah	13,00	Sangat Rendah
2.16	Komunikasi dan Informatika	33,00	Sangat Rendah	4,00	Sangat Rendah
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3,00	Sangat Rendah	4,00	Sangat Rendah
2.18	Penanaman Modal	44,00	Sangat Rendah	12,00	Sangat Rendah
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	6,00	Sangat Rendah	6,00	Sangat Rendah
2.20	Statistik	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
2.21	Persandian	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
2.22	Kebudayaan	22,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
2.23	Perpustakaan	12,00	Sangat Rendah	41,00	Sangat Rendah
2.24	Kearsipan	0,00	Sangat Rendah	3,00	Sangat Rendah
3	URUSAN PILIHAN	24,68	Sangat Rendah	8,33	Sangat Rendah
3.25	Kelautan dan Perikanan	24,69	Sangat Rendah	9,83	Sangat Rendah
3.26	Pariwisata	44,75	Sangat Rendah	4,20	Sangat Rendah
3.27	Pertanian	20,47	Sangat Rendah	11,33	Sangat Rendah
3.28	Perdagangan	30,50	Sangat Rendah	7,30	Sangat Rendah
3.29	Perindustrian	3,00	Sangat Rendah	9,00	Sangat Rendah
4	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	20,50	Sangat Rendah	9,50	Sangat Rendah
4.01	Sekretariat Daerah	31,00	Sangat Rendah	7,00	Sangat Rendah
4.02	Sekretariat DPRD	10,00	Sangat Rendah	12,00	Sangat Rendah
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12,60	Sangat Rendah	16,60	Sangat Rendah
5.01	Perencanaan	34,00	Sangat Rendah	14,00	Sangat Rendah
5.02	Keuangan	8,00	Sangat Rendah	10,00	Sangat Rendah
5.03	Kepegawaian	2,00	Sangat Rendah	29,00	Sangat Rendah
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	0,00	Sangat Rendah	19,00	Sangat Rendah
5.05	Penelitian dan Pengembangan	19,00	Sangat Rendah	11,00	Sangat Rendah
6	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	5,00	Sangat Rendah	22,00	Sangat Rendah
6.01	Inspektorat	5,00	Sangat Rendah	22,00	Sangat Rendah
7	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	17,00	Sangat Rendah	4,00	Sangat Rendah



No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
7.01	Kecamatan	17,00	Sangat Rendah	4,00	Sangat Rendah
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	45,80	Sangat Rendah	3,10	Sangat Rendah
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	45,80	Sangat Rendah	3,10	Sangat Rendah
	TOTAL	17,63	Sangat Rendah	10,82	Sangat Rendah

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Cirebon Triwulan I Tahun 2025

2.1.5 Evaluasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program (*OUTCOME*)

Evaluasi terhadap hasil RKPD Kota Cirebon triwulan I tahun 2025 yang dilakukan, salah satunya terkait indikator kinerja program. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian program sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Wali Kota melalui Bappelitbangda Kota Cirebon.



Tabel II-7 Ketercapaian Indikator Kinerja Program (*outcome*) triwulan I Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01	BIDANG PENDIDIKAN							
1.1.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Dinas Pendidikan	nilai	88,78	0	0,00%	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	100,00%	0	0,00%	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	persen	74%	0	0,00%	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	persen	91%	0	0,00%	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka	Persen	10	0	0,00%	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, PNF yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	persen	41%	7%	0,00%	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
1.02	BIDANG KESEHATAN							
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86	2,58	3%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Penilaian Kinerja (PKP)	Persen	60	0	3,78%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Capaian Indikator Pelayanan Rawat Inap	Persen	100	0	0,00%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kinerja Layanan P2P	Persen	100	0	0,00%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Indeks Keluarga Sehat	Persen	0,36	0	0,00%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar	Persen	90	0	0,00%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Industri Rumah Tangga Pangan yang Memenuhi Standar	Persen	85%	0	0,00%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Cakupan Sarana kefarmasian yang memenuhi standar	Persen	95%	0	0,00%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Strata Kampung Siaga Aktif	Persen	19%	0	0,00%	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
1.03	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	13	13%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase sungai dalam kondisi baik	Persen	78	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pemenuhan kebutuhan air bersih perpipaan non PDAM	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.03	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/TPST dalam kondisi baik	Persen	20	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak	Persen	91	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Persen	86	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kawasan strategis yang menghubungkan dalam kawasan strategis	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan gedung pemerintah yang memenuhi syarat penyelenggaraan bangunan gedung	Persen	90	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan dalam 1 rw dalam kondisi baik	Persen	83	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	96	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memiliki sertifikat aktif	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang	Persen	80	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah milik pemerintah yang sudah bersertifikat terhadap bidang tanah yang menjadi milik pemerintah	Lokasi	0	0	0%	Sangat Rendah	DPUTR
1.04	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1.4.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	Persen	100	25	25%	Sangat Rendah	DPRKP
1.4.2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan rumah korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah	Persen	89	0	0%	Sangat Rendah	DPRKP
1.4.3.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	10	0	0%	Sangat Rendah	DPRKP
1.4.4.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	82	0	0%	Sangat Rendah	DPRKP



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
1.4.5.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU di Perumahan yang menunjang fungsi hunian	Persen	15	0	0%	Sangat Rendah	DPRKP
1.05 BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.05.01	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian SPM Bidang Trantibum Satpol PP	persen	59%	0%	0,0%	Sangat Rendah	SATPOLPP
1.05.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)	persen	100	17,81%	0,2%	Sangat Rendah	SATPOLPP
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	2	2%	Sangat Rendah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	# Persentase Terbentuknya Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di tingkat Kelurahan dalam daerah layanan WMK Persen # Tingkat pelaksanaan penanggulangan kebakaran yang berhasil # Tingkat pelaksanaan penyelamatan yang berhasil	Persen	90	19	22%	Sangat Rendah	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja BPBD	Persen	92,10	0	0,0%	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Lembaga Tingkat Kelurahan yang Mendapatkan Pelatihan Kebencanaan	Persen	4,55	0	0,0%	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Cakupan Penanganan Kejadian Bencana	Persen	100	0	0,0%	Sangat Rendah	
1.06	BIDANG SOSIAL							
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Sosial)	Persen	76,95	13,08	17%	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pembinaan PSKS Individu dan Kelembagaan	Persen	69,63	0	0,0%	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	Persen	19,85	0	0,0%	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	83,19	0	0,0%	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100	0	0,0%	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Komponen Utama dan Pendukung TMPN	Persen	25	0	0,0%	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
2	URUSAN WAJIB YANG BUKAN PELAYANAN DASAR							
2.07	BIDANG TENAGA KERJA							
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Dokumen/Peraturan Kebijakan mengenai ketenagakerjaan	Dokumen	1	0	0%	Sangat Rendah	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) (Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak dibagi jumlah perusahaan dikali 100 persen)	persen	100%	0	0%	Sangat Rendah	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase Pencaker terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi = (Jumlah Pencaker terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah pencaker terdaftar)	Persen	4,60	0	0%	Sangat Rendah	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang tedaftar dikali 100 persen) (Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100 persen)	Persen	40	0	0%	Sangat Rendah	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	87	0	0%	Sangat Rendah	DINAS TENAGA KERJA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
2.08	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.08.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan sebagai pejabat struktural	Persen	37,50%	0	0%	Sangat Rendah	DP3APPKB
2.08.3.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan layanan perlindungan perempuan	Persen	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	DP3APPKB
2.08.4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah PD/LM yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga	PD/L/LM	23	0	0%	Sangat Rendah	DP3APPKB
2.08.5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender dan anak	Persen	19	0	0%	Sangat Rendah	DP3APPKB
2.08.6..	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Skor Evaluasi Kota Layak Anak dari Klaster I – IV	Poin	440	0	0%	Sangat Rendah	DP3APPKB
2.08.7.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah Skor Evaluasi kota Layak Anak dari Klaster V	poin	110	0	0%	Sangat Rendah	DP3APPKB
2.14.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat kepuasan terhadap kinerja DP3APPKB	Poin	79,3	0	4%	Sangat Rendah	DP3APPKB
2.09	BIDANG PANGAN							
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja DKPPP	Point	84	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Persen	20	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
		Ketersediaan informasi data distribusi, pasokan dan harga pangan	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
		Tingkat konsumsi sayur dan buah	gr/kap/hari	215	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan yang ditangani	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Persen	80	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
2.10	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM Perangkat Daerah	poin	81	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.10.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang digunakan sebagai bahan rencana pembangunan berkelanjutan	persen	75%	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.10.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan	persen	10%	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.10.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan penataan Taman Keanekaragaman Hayati sesuai permen KLHK No.3 th 2012	persen	58%	0	0%	Sangat Rendah	DLH



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
2.10.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan teknis Pengelolaan Limbah B3	persen	0	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.10.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh pemerintah Daerah Kota	persen	71%	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.10.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase inventarisasi potensi keberadaan MHA yang terkait dengan PPLH	persen	40%	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.10.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	persen	13%	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.10.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	persen	0	0	0%	Sangat Rendah	DLH



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
2.10.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	persen	100%	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.10.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola	persen	99%	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.10.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (UPT TPA)	Persentase sampah yang terkelola	persen	99%	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.10.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (UPT PS)	Persentase sampah yang terkelola	persen	99%	0	0%	Sangat Rendah	DLH
2.11	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	poin	86,00	0	35%	Sangat Rendah	DISDUKCAPIL
2.11.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Identitas Kependudukan	persen	75,05	0	8%	Sangat Rendah	DISDUKCAPIL
2.11.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	99,39	0	0%	Sangat Rendah	DISDUKCAPIL
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase waktu aktif sistem untuk pelayanan dalam setahun	persen	99,18	0	17%	Sangat Rendah	DISDUKCAPIL
2.12	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2.12.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah pemangku kepentingan yang memanfaatkan GDPK	PD/ Sektor/ Institusi	10	1	10%	Sangat Rendah	DP3APPKB



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
2.12.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Current User/Pasangan Usia Subur	persen	64,60%	0	0%	Sangat Rendah	DP3APPKB
2.12.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	DP3APPKB
2.13 BIDANG PERHUBUNGAN								
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan	Persen	1	0,29	29%	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
2.13.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Bertambahnya Titik Lampu PJU	Titik	10	0,15	2%	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan	Rasio	80	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
		Bertambahnya Jumlah Lokasi Parkir yang dikelola	lokasi	93	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persen	78	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
		Menekan angka kecelakaan lalu lintas	kejadian	100	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Perhubungan
2.14 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80	0	0%	Sangat Rendah	DKIS
2.14.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah layanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien	Informasi	0	0	0%	Sangat Rendah	DKIS
2.14.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik dan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	Persen	38	0	0%	Sangat Rendah	DKIS
		Presentase perangkat daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	DKIS
2.17	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja DKUKMPP	poin	83	0	46%	Sangat Rendah	DKUKMPP
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi aktif yang melakukan perijinan sesuai peraturan perundang-undangan (OSS RBA)	Persen	11	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pelaksanaan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Persen	66	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif dengan tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan dengan skor sehat dan cukup sehat	Persen	63	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif yang difasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan perkoperasian tiap tahunnya	Persen	26	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat yang melakukan diversifikasi usaha	Persen	65,30	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL dan USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM terlatih yang bermitra	Persen	10,87	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Penambahan UMKM naik kelas bagi UMKM yang difasilitasi tiap tahunnya	Persen	13	3	20%	Sangat Rendah	DKUKMPP
2.18	BIDANG PENANAMAN MODAL							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	%	100%	0	27%	Sangat Rendah	DPMPSTSP
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Penetapan Kawasan Unggulan Investasi di Kota Cirebon dari Target Penetapan Kawasan Unggulan Investasi	Persen	25%	0	0%	Sangat Rendah	DPMPSTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Penambahan Nilai Investasi	Milyar	100	0	0%	Sangat Rendah	DPMPSTSP



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki legalitas usaha	Persen	10%	0	30%	Sangat Rendah	DPMPTSP
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	Persen	81%	0	0%	Sangat Rendah	DPMPTSP
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Data perizinan dan non perizinan yang dapat disajikan	Sektor	13	23	177%	Sangat Tinggi	DPMPTSP
2.19	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
2.19.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100%	0	19%	Sangat Rendah	DISPORA
2.19.2..	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Organisasi Pemuda Terhadap Penduduk Usia Pemuda	Rasio	5:150	6	6%	Sangat Rendah	DISPORA
2.19.3..	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	100%	45%	45%	Sangat Rendah	DISPORA
2.19.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Wirausaha Muda	Persen	60%	0	0%	Sangat Rendah	DISPORA
2.20	BIDANG STATISTIK							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sebagai bahan perencanaan dan evaluasi (Jumlah PD yang menggunakan data statistik sebagai bahan perencanaan dan evaluasi perbandingan jumlah PD	Persen	0,8	0	0%	Sangat Rendah	DKIS



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
		yang menggunakan data statistik sektoral di Renja dan evaluasi Renja dibagi total PD x 100%)						
2.21	BIDANG PERSANDIAN							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase terselenggaranya layanan persandian dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah kota cirebon	Persen	0,86	0	0%	Sangat Rendah	DKIS
2.22	BIDANG KEBUDAYAAN							
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHSN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	0	100%	Sangat Tinggi	DISBUDPAR
		Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Persen		0	0%	Sangat Rendah	DISBUDPAR
		Cakupan layanan Administrasi Perkantor	Persen		0	0%	Sangat Rendah	DISBUDPAR
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	- Jumlah karya Budaya yang di Revitalisasi dan di Inventarisasi	Karya Budaya	1	1	100%	Sangat Tinggi	DISBUDPAR
2.17.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Persen	29	29	100%	Sangat Tinggi	DISBUDPAR
2.17.04	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagara Budaya yang di kelola secara terpadu	Persen	1	1	100%	Sangat Tinggi	DISBUDPAR
2.17.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Tercapainya persyaratan pendirian dan pengelolaan museum	Persen	50	25	50%	Sangat Rendah	DISBUDPAR
2.23	BIDANG PERPUSTAKAAN							



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat kepuasan terhadap kinerja Perangkat Daerah	Poin	70	82,50	82,5%	Tinggi	DISPUSIP
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dibina	Persen	10	0,00	0,0%	Sangat Rendah	DISPUSIP
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Kuno yang didigitalisasi	Judul	5	0,00	0,0%	Sangat Rendah	DISPUSIP
2.24	BIDANG KEARSIPAN							
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dikelola sesuai Standar Nasional	Persen	80	0,00	0%	Sangat Rendah	DISPUSIP
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Dokumen Arsip yang Terselamatkan	Persen	100	0,00	0%	Sangat Rendah	DISPUSIP
3	URUSAN PILIHAN							
3.25	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4200	1.207	29%	Sangat Rendah	DKPPP
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	273	38	14%	Sangat Rendah	DKPPP
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Ton	8000	2.019	25%	Sangat Rendah	DKPPP
3.26	BIDANG PARIWISATA							
2.26.05	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Hari	1,5	1,5	65%	Sangat Rendah	DISBUDPAR
2.17.06	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Lama Kunjungan Wisata	hari	1	1	100%	Sangat Tinggi	DISBUDPAR



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
2.17.07	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pertumbuhan Lapangan Usaha Kreatif	Persen	2	0	0%	Sangat Rendah	DISBUDPAR
2.17.07	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PAD Sektor Pariwisata	Persen	17	14	14%	Sangat Rendah	DISBUDPAR
3.27 BIDANG PERTANIAN								
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	Persen	5	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dipelihara	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit hewan	Persen	70	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Persen	40	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kualitas kelembagaan penyuluhan	Poin	475	0	0%	Sangat Rendah	DKPPP
3.28 BIDANG PERDAGANGAN								
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan Klaster Perdagangan	Persen	15,15	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi dalam penyerapan barang pokok	Persen	0	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan stok barang pokok	Persen	83	25	30%	Sangat Rendah	DKUKMPP
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor	Persen	3	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Cakupan Pelayanan Wajib Metrologi Legal	Persen	90	20	22%	Sangat Rendah	DKUKMPP
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Cakupan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	60	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP
3.29 BIDANG PERINDUSTRIAN								
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase ketercapaian program RPIK dalam Pengembangan Perwilayahan Industri (Sentra IKM)	Persen	50	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang melakukan perijinan melalui OSS RBA	Persen	56,66%	0	0%	Sangat Rendah	DKUKMPP



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM Berbadan Hukum yang melakukan pelaporan usaha melalui SIINas	Persen	42	1	2%	Sangat Rendah	DKUKMPP
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan di Kota Cirebon yang mengisi data Prodeskel dan Epdeskel tepat waktu	Persen	100	18,18	18%	Sangat Rendah	SETDA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) tertib administrasi	persen	70	22,73	32%	Sangat Rendah	SETDA
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM Perangkat Daerah	poin	84	0	0%	Sangat Rendah	SETDA
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi oleh Bagian lingkup Asisten PEMKESRA	persen	91	2,56	3%	Sangat Rendah	SETDA
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi lingkup Asisten EKBANG	persen	91	10,42	11%	Sangat Rendah	SETDA
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	poin	1	0	27%	Sangat Rendah	SETWAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase program DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD yang terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SETWAN	persen	99,3%	0	20%	Sangat Rendah	SETWAN
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.1 BIDANG PERENCANAAN								
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan terhadap kinerja Perangkat Daerah	Persen	82	0	0%	Sangat Rendah	BAPPELITBANGDA
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian Tahapan Perencanaan Pembangunan	Persen	100	97	97%	Sangat Tinggi	BAPPELITBANGDA
		Persentase Keterisian Data Perencanaan pada SIPD	Persen	82	97	119%	Sangat Tinggi	BAPPELITBANGDA
		Persentase capaian Kinerja Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	71	0	0%	Sangat Rendah	BAPPELITBANGDA



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (Jumlah Program APBD Tahun berkenaan/ Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan x 100%)	Persen	76	0	0%	Sangat Rendah	BAPPELITBANGDA
5.2 BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	BAPPELITBANGDA
5.3 BIDANG KEUANGAN								
2.1.16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81	0	15%	Sangat Rendah	BPKPD
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Persen	100	4	4%	Sangat Rendah	BPKPD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap perencanaan Barang Milik Daerah	Persen	100	11	11%	Sangat Rendah	BPKPD
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	Persen	5	-97%	3%	Sangat Rendah	BPKPD
5.4 BIDANG KEPEGAWAIAN								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	POIN	86	0	19%	Sangat Rendah	BKPSDM
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi (Eseleoon II), administrasi (Eselon III dan IV), dan Jabatan Fungsional yang kosong pada perangkat daerah	orang	7	0	5%	Sangat Rendah	BKPSDM
		Jumlah SK Purna Tugas PNS	SK	0	0	0%	Sangat Rendah	BKPSDM
5.5	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya	persen	4,25	0	21%	Sangat Rendah	BKPSDM
6	UNSUR PENGAWASAN							
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	84	114	114%	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah	Persen	70	10	9,44%	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
		Presentase tindak lanjut hasil pengawasan internal	Persen	42	0	0,00%	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pelaksanaan program kerja pengawasan	Persen	100	0	0,00%	Sangat Rendah	INSPEKTORAT



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
		Persentase penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Persen	91	0	0,00%	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Kecamatan	poin	82	0	0,0%	Sangat Rendah	KECAMATAN KEJAKSAN
		Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Persen	0	0	0,0%	Sangat Rendah	
		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	Persen	0	0	0,0%	Sangat Rendah	
		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	0	0	0,0%	Sangat Rendah	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	persen	100	100	100,0%	Sangat Tinggi	KECAMATAN KEJAKSAN
		Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	0	0	0,0%	Sangat Rendah	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi	persen	50	25	50,0%	Sangat Rendah	KECAMATAN KEJAKSAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Jumlah laporan gangguan Trantibum yang masuk dibagi yang dikoordinasikan dan ditangani dikali 100%)	persen	100	1	1,5%	Sangat Rendah	KECAMATAN KEJAKSAN



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) konflik sosial	persen	100	0	0,0%	Sangat Rendah	KECAMATAN KEJAKSAN
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.13.05.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK Aktif	Persen	100	0	0,0%	Sangat Rendah	KECAMATAN KEJAKSAN
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Kecamatan Kesambi	Persen	0	26	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN KESAMBI
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wil kecamatan (jumlah permohonan pelayanan yg dilayani dibagi jumlah permohonan pelayanan x 100%)	Persen	0	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN KESAMBI
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi (Jumlah LKK yang tertib administrasi dibagi jumlah LKK yang ada dikali 100%)	Persen	0	5	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN KESAMBI
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) gangguan ketentraman dan ketertiban umum (jumlah gangguan trantibum yg ditangani dibagi jumlah lap kejadian trantibum x 100%)	Persen	0	10	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN KESAMBI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) konflik sosial (jumlah konflik sosial yg ditangani dibagi jumlah konflik sosial yg dilaporkan x 100%)	Persen	0	51	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN KESAMBI
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Kecamatan	Poin	100	22	22,1%	Sangat Rendah	KECAMATAN PEKALIPAN
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persen	100	0	0,0%	Sangat Rendah	KECAMATAN PEKALIPAN
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK tertin Administrasi	Persen	100	8	8,2%	Sangat Rendah	KECAMATAN PEKALIPAN
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Jumlah laporan gangguan Trantibum yang masuk dibagi yang dikoordinasikan dan ditangani dikali 100%)	Persen	100	0	0,0%	Sangat Rendah	KECAMATAN PEKALIPAN
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan konflik sosial	Persen	100	0	0,0%	Sangat Rendah	KECAMATAN PEKALIPAN
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Kecamatan	poin	81	100	123%	Sangat Tinggi	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi	persen	50	25	50%	Sangat Rendah	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Jumlah laporan gangguan Trantibum yang masuk dibagi yang dikoordinasikan dan ditangani dikali 100%)	persen	100	1	1%	Sangat Rendah	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) konflik sosial	persen	100	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
2.13.4.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	Meningkatnya Kapasitas ASN sekecamatan Harjamukti	Persen	0	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN HARJAMUKTI
2.13.5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Persen	100	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN HARJAMUKTI
7.1.1..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	18,25	18%	Sangat Rendah	KECAMATAN HARJAMUKTI



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
7.1.2..	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rasio Pelaksanaan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (Jumlah Permohonan Masyarakat yang mengajukan Pelayanan Publik dibagi Pelayanan Publik Yang terlayani X 100%)	Persen	0	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN HARJAMUKTI
7.1.3..	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Status Kualifikasi Kelurahan	Persen	100	3,76	4%	Sangat Rendah	KECAMATAN HARJAMUKTI
7.1.3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Status Kualifikasi Kelurahan	Persen	100	1,10	1%	Sangat Rendah	KECAMATAN HARJAMUKTI
7.1.4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (Jumlah Laporan Gangguan Trantibum yang masuk dibagi yang dikoordinasikan)	Persen	0	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN HARJAMUKTI
7.1.5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kasus konflik sara	Persen	0	0	0%	Sangat Rendah	KECAMATAN HARJAMUKTI
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8.01 BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah	poin	93	22	24%	Sangat Rendah	BAKESBANGPOL
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Pemahaman Ideologi Wawasan Kebangsaan Masyarakat	persen	76	0	0%	Sangat Rendah	BAKESBANGPOL



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	Perangkat Daerah
				Target	Realisasi			
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Pemahaman Politik di Masyarakat	persen	76	0	0%	Sangat Rendah	BAKESBANGPOL
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP)	persen	75	0	0%	Sangat Rendah	BAKESBANGPOL
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Tingkat Pemahaman Masyarakat pada P4GN dan Penanganan Potensi Konflik Antar Umat Beragama	persen	78	0	0%	Sangat Rendah	BAKESBANGPOL
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	persen	75	0	0%	Sangat Rendah	BAKESBANGPOL



Berdasarkan data yang tertera dalam tabel II.7 Ketercapaian Indikator Kinerja Program (outcome) triwulan I tahun 2025, dapat diketahui bahwa terdapat 210 indikator kinerja program (outcome) pembangunan daerah yang dievaluasi.

2.1.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah pada triwulan I tahun 2025 dilaporkan dalam bentuk formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana telah diolah dan disajikan pada Bab III Dokumen Evaluasi Hasil RKPD Kota Cirebon triwulan I tahun 2025. Hasil evaluasi selain menyajikan informasi realisasi kegiatan pada triwulan I tahun 2025, baik target maupun penyerapan anggaran, juga menyajikan tingkat pencapaian setiap sub kegiatan, kegiatan dan rata-ratanya per program dan per Perangkat Daerah. Capaian kinerja dan anggaran program setiap Perangkat Daerah berbeda-beda, namun secara umum dapat disimpulkan berada pada kategori yang sangat rendah.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan I tahun 2025, Perangkat Daerah mengalami berbagai kendala baik eksternal, internal, maupun hal-hal yang mendorong dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga mampu mencapai kinerja dengan baik dan sesuai target. Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja, seperti adanya koordinasi yang baik di lingkup Perangkat Daerah dan faktor penghambat antara lain: adanya penyusunan ulang anggaran, proses pencairan dana terkendala dikarenakan perbaikan aplikasi SIPD, dan sebagainya.

Tabel II-116 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja Kota Cirebon triwulan I tahun 2025

NO.	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1.	Kondisi sosial masyarakat yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.	Adanya sistem antrian online dalam pengurusan dokumen kependudukan yang baru, namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang alur dan mekanismenya sehingga terjadi penumpukan antrian yang menghambat pelayanan kependudukan.
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Cirebon untuk ikut aktif dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang ada seperti jalan, sungai dan jembatan.	Adanya penyesuaian anggaran daerah atau efisiensi APBD dikarenakan pengalihan anggaran untuk penanggulangan inflasi dampak dari naiknya harga bahan bakar minyak di Kota Cirebon.
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan.	Terkendalanya proses penatausahaan keuangan dikarenakan seluruh pemerintah daerah di Indonesia wajib menggunakan aplikasi SIPD yang belum dapat berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kekurangan dalam aplikasi SIPD.



NO.	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
4.	Perencanaan dan penetapan keuangan (APBD) yang tepat waktu.	Kurangnya Sumber Daya Manusia di beberapa perangkat daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat. Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan minus growth dimana penerimaan PNS baru harus lebih kecil dibandingkan dengan PNS Purna Tugas (Pensiun).
5.	Sinergitas yang baik antar perangkat daerah dalam melaksanakan tugas untuk mencapai kinerja sesuai target.	Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa yang mengalami keterlambatan disebabkan oleh berbagai faktor.
6.	Koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah maupun kabupaten/kota dalam penyediaan data dan informasi.	Adanya mutasi/rotasi pejabat struktural sehingga pelaksanaan program kegiatan di perangkat daerah membutuhkan penyesuaian kembali.
7.	Tersedianya Fungsional Peneliti, Perencana serta beberapa fungsional tertentu di perangkat daerah dengan berbagai macam kepakaran.	Dampak pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Kota Cirebon, yang masih terasa terutama di sektor perekonomian sehingga pelaksanaan program kegiatan menjadi terhambat.
8.	Kolaborasi dan koordinasi yang baik antar unit kerja di dalam Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan membentuk jaringan perencanaan hingga tingkat sub bidang atau sub bagian, sehingga eksekusi bisa dilaksanakan pada level tersebut. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan bertugas dalam mengendalikan, mengevaluasi, dan memberikan persetujuan melalui aplikasi.	Keterlambatan peraturan tentang petunjuk teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal.

2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Kota Cirebon telah menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Berdasarkan realisasi indikator makro pembangunan, memperlihatkan angka yang terus meningkat dengan capaian yang cukup menggembirakan. Namun demikian, angka-angka tersebut tidak lantas membuat Kota Cirebon berhenti berbenah untuk terus mengatasi permasalahan dan isu strategis yang muncul. Permasalahan di berbagai aspek pembangunan harus segera ditangani melalui pembangunan yang berkelanjutan. Disamping itu, menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan memunculkan isu-isu strategis yang perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah pada subbab aspek



demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2023, maka ada beberapa permasalahan pembangunan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Cirebon secara makro yaitu:

2.2.1.1 Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan yang multidimensional melibatkan banyak aspek yang kompleks, termasuk aspek sosial, ekonomi dan politik. Masalah kemiskinan sebagai hal utama yang harus dianalisis untuk perencanaan pembangunan ke depan secara holistik. Faktor penyebab masyarakat menjadi miskin antara lain karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan yang buruk, pengangguran dan ketidakstabilan pekerjaan, tidak setara sosial dan ekonomi, infrastruktur dan akses sumber daya yang buruk termasuk akses yang terbatas terhadap air bersih, sanitasi, dan listrik serta adanya siklus kemiskinan dimana kemiskinan seringkali diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Faktor-faktor lain seperti tidak setara gender, kondisi alam, faktor budaya dan kebijakan pemerintah dapat memperburuk masalah kemiskinan di Kota Cirebon.

Jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon Tahun 2023 sebesar 29.490 jiwa atau sekitar 9,16% jauh di atas persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat yang sebesar 7,62%. Jika dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 1,29 di Tahun 2023 menandakan jarak pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin dekat, angka ini masih di atas angka Provinsi Jawa Barat yang sebesar 1,17. Sedangkan berdasarkan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,29 di tahun 2023 menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin kecil, angka ini masih di atas angka Provinsi Jawa Barat yang sebesar 0,27. Menghapus kemiskinan menjadi tujuan pertama dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu penurunan kemiskinan ekstrim menjadi 0% di tahun 2030. Jumlah penduduk miskin ekstrim kota Cirebon tahun 2022 sebesar 5.320 jiwa atau sekitar 1,66% yang harus ditangani oleh Pemerintah Kota Cirebon menuju 0%.

2.2.1.2 Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cirebon masih lamban di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 perlu menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kota Cirebon. Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon sebelum terjadi pandemi tercatat 6,29 persen di tahun 2019 berada di atas LPE Provinsi Jawa Barat yang sebesar 5,65 persen dan berada diposisi ke 8 nilai LPE Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Namun pada tahun 2022 LPE Kota Cirebon sebesar 5,10 persen berada di bawah LPE Provinsi Jawa Barat yang sebesar 5,45 persen dan berada diperingkat 15 nilai LPE Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Posisi LPE yang belum mampu menembus angka rata-rata menjadi hal yang sangat penting untuk diantisipasi karena menunjukkan masih terdapat pelemahan untuk pencapaian LPE tahun selanjutnya. Hal ini dibuktikan dengan capaian LPE tahun 2023 menurun menjadi sebesar 5,01%. Angka ini hampir menyentuh angka LPE tahun 2013 yang sebesar 4,90%. Perlambatan LPE ini disebabkan oleh menurunnya sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Beban perlambatan LPE ini juga perlu mendapatkan perhatian pada Indeks Gini dimana pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon belum dapat merata dirasakan oleh semua masyarakat kota Cirebon. Indeks Gini Kota Cirebon tahun 2023 masih sebesar 0,468 persen. Angka ini masih berada di atas angka Indeks Gini Provinsi Jawa Barat yang sebesar 0,425 persen



dan Indeks Gini Nasional yang sebesar 0,388.

Beberapa permasalahan pokok lain selain Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi telah dirangkum berdasarkan aspek Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Lingkungan Hidup, Infrastruktur Wilayah, dan Tata Kelola Pemerintahan:

A. Aspek Sumber Daya Manusia

Permasalahan pokok yang terjadi pada Aspek Sumber daya Manusia adalah Kesenjangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan seperti:

1. Masih terdapat penduduk usia produktif yang memiliki daya saing rendah
2. Rendahnya penggunaan identitas budaya Cirebon di masyarakat.
3. Belum meratanya derajat Kesehatan masyarakat.
4. Masih adanya kesenjangan kualifikasi pendidikan di masyarakat.

B. Aspek Ekonomi

Permasalahan pokok yang terjadi pada aspek Ekonomi yaitu Belum optimalnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal yang disebabkan oleh beberapa hal seperti:

1. Masih terbatasnya pemasaran produk UMKM & IKM
2. Masih terbatasnya akses keuangan UMKM pada lembaga keuangan
3. Masih terbatasnya inovasi dalam pengembangan produk UMKM & IKM
4. Belum optimalnya pemanfaatan shelter bagi sektor informal
5. Belum maksimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional dari kualitas layanan dan okupansi kios pasar
6. Kurang signifikannya peningkatan kualitas koperasi
7. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata lokal dan industri kreatif sebagai sektor ekonomi potensial
8. Belum optimalnya sinkronisasi pelayanan izin usaha dengan pemanfaatan ruang dan assessment jenis usaha
9. Tingginya ketergantungan terhadap ketersediaan dan produksi pangan

C. Aspek Infrastruktur Wilayah

Permasalahan pokok yang terjadi pada aspek infrastruktur Wilayah adalah belum mantapnya kondisi infrastruktur dasar diantaranya:

1. Sistem transportasi massal belum optimal
2. Penanganan banjir/genangan di Kota Cirebon
3. Tingkat kemacetan di Kota Cirebon belum tertangani
4. Pengelolaan sampah di TPA belum optimal
5. Kondisi infrastruktur perkotaan kurang merata
6. Perlu peremajaan terhadap kondisi infrastruktur non fisik/jaringan informasi digital

D. Aspek Lingkungan Hidup

Permasalahan pokok yang terjadi pada aspek Lingkungan Hidup yaitu: Degradasi kualitas lingkungan hidup perkotaan yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Belum terpenuhinya 20 persen Luasan RTH publik di Kota Cirebon
2. Belum optimalnya pengelolaan persampahan.
3. Kualitas lingkungan hidup belum mencapai kategori baik
4. Tingkat kerentanan bencana di Kota Cirebon relatif tinggi
5. Dampak perubahan iklim di lingkungan perkotaan meningkat



6. Degradasi ekosistem lingkungan di kawasan pesisir
7. Pengendalian tutupan lahan yang rendah
8. Potensi Keanekaragaman hayati yang rendah

E. Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan pokok yang terjadi pada tata kelola pemerintahan di Kota Cirebon antara lain:

1. Belum Optimalnya Sistem Kerja Birokrasi.
2. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik.

2.2.2 ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil analisis internal berupa identifikasi berbagai permasalahan pembangunan yang ada di Kota Cirebon dan analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kota Cirebon ke depan, maka diperoleh rumusan isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia.

Kota Cirebon mengutamakan peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang mengacu pada Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Beberapa kebijakan tersebut termasuk dalam upaya penguatan pemberdayaan masyarakat, akselerasi pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan produktivitas daya saing daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan kota kreatif berbasis budaya dan sejarah serta mengatasi permasalahan seperti peningkatan angka kemiskinan, penurunan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kenaikan jumlah pengangguran. Selain itu, terdapat juga upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran di wilayah Kota Cirebon.

2. Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing Tinggi, Inklusif, dan Berkelanjutan

Potensi ekonomi lokal yang memiliki daya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi lokal Kota Cirebon mengacu pada aktivitas ekonomi yang tumbuh dan memiliki potensi daya saing. Cakupan aktivitas ekonomi lokal di Kota Cirebon seperti UMKM, IKM, sektor ekonomi kreatif, pariwisata lokal, perikanan, termasuk aktivitas yang terjadi pada pasar tradisional dan modern.

Pertama-tama, fokus pada daya saing tinggi menuntut pemanfaatan sumber daya lokal, pengembangan inovasi, dan peningkatan produktivitas. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif, komunitas lokal dapat menonjolkan sektor-sektor unggulannya dalam pasar global. Selanjutnya, inklusifitas dalam konteks ini menekankan pentingnya memberdayakan semua



lapisan masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah serta industri kecil dan menengah. Dengan menyediakan akses terhadap pelatihan, pendanaan, dan pasar, ekonomi lokal inklusif menciptakan peluang yang setara untuk pertumbuhan usaha bagi semua. Terakhir, aspek berkelanjutan merujuk pada prinsip-prinsip pembangunan yang memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan, mendukung pekerjaan yang layak, dan mempromosikan inklusif sosial adalah kunci untuk mencapai ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan memadukan ketiga dimensi ini, potensi ekonomi lokal dapat dioptimalkan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan memperkuat daya saing di tingkat yang lebih luas.

Dampak yang akan ditimbulkan ketika isu ini mampu diintervensi dengan baik yaitu peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas pelaku usaha dari segi akses keuangan, inovasi produk, pemasaran, dan adaptasi teknologi, peningkatan jaringan infrastruktur pendukung sarana ekonomi, peningkatan daya saing potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan industri kreatif, dan peningkatan peluang investasi

3. Ketahanan Pangan

Masalah pokok ketahanan pangan di Kota Cirebon mencakup tingginya ketergantungan terhadap ketersediaan dan produksi pangan, yang dapat menyebabkan kerentanan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga pangan. Pertama-tama, ketergantungan pada pasokan pangan luar kota atau bahkan luar provinsi dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan pasokan, terutama dalam situasi darurat atau krisis kesehatan seperti pandemi. Terbatasnya produksi lokal juga dapat berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, mengingat adanya risiko gangguan dalam rantai pasokan yang panjang. Faktor perubahan iklim dan bencana alam dapat mempengaruhi produksi pangan lokal di Kota Cirebon. Jika kota ini terlalu bergantung pada pasokan dari luar wilayah, kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam dapat meningkat, menyebabkan ketidakpastian dalam ketersediaan pangan. Dalam konteks ini, diversifikasi sumber pasokan pangan dan mendorong produksi lokal menjadi krusial. Mendorong pertanian perkotaan, mendukung petani lokal, dan membangun sistem distribusi pangan yang efisien dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar kota. Inisiatif ini juga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan lokal dan budaya makanan sehat dapat memberikan dukungan kepada usaha lokal dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat komunitas. Pembangunan kebijakan yang mendukung inisiatif pertanian perkotaan dan penyediaan insentif bagi pelaku usaha lokal juga menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah ketergantungan pada pasokan dan produksi pangan di Kota Cirebon. Dengan demikian, upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat membantu membangun ketahanan pangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan di tingkat lokal.

4. Optimalisasi Ruang Kota Tanpa Melampaui Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan

Optimalisasi ruang kota menjadi sangat penting dalam konteks pertumbuhan perkotaan yang cepat dan berkelanjutan. Untuk menjawab kebutuhan populasi yang terus berkembang, diperlukan perencanaan perkotaan yang bijak dan berkelanjutan. Optimalisasi ruang kota adalah langkah untuk memastikan bahwa pertumbuhan



perkotaan tidak melampaui daya dukung daya tampung lingkungan. Ruang kota bukanlah sumber daya tidak terbatas, melainkan suatu ekosistem yang memerlukan pemeliharaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Optimalisasi ruang kota mencakup penggunaan lahan yang efisien, pelestarian ruang terbuka hijau, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal ini, harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, keseimbangan ekosistem perkotaan, dan kemampuan alam untuk menanggung beban dari aktivitas manusia. Integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan perkotaan diharapkan dapat mengoptimalkan pertumbuhan perkotaan, menjaga keanekaragaman lingkungan, serta memastikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi penduduk kota.

5. Kemantapan Jaringan Infrastruktur Perkotaan Yang Inklusif Dan Berketahanan Di Seluruh Wilayah

Jaringan infrastruktur perkotaan yang inklusif dan berketahanan menjadi pilar utama dalam membangun kota yang berkelanjutan. Kemantapan infrastruktur perkotaan merupakan landasan bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat termasuk di Kota Cirebon. Penyediaan akses yang adil dan merata terhadap layanan dasar seperti transportasi yang terjangkau, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi, dan infrastruktur perkotaan lainnya yang inklusif akan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu dan rentan, dapat menikmati manfaat termasuk masyarakat di daerah selatan Kota Cirebon. Ketahanan infrastruktur terhadap bencana alam merupakan aspek penting dalam membangun kota yang berketahanan. Perencanaan tata ruang yang tepat, konstruksi yang tahan bencana, dan sistem peringatan dini yang efektif, infrastruktur perkotaan dapat meminimalkan kerugian akibat bencana dan memastikan kelangsungan hidup masyarakat.

6. Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif Dan Kolaboratif.

Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif mengacu pada upaya pemerintah Kota Cirebon untuk mengembangkan sistem tata kelola yang lebih baik dan efektif dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah dapat mencakup digitalisasi pelayanan publik, kolaborasi antar daerah dan pelaku pembangunan, koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk percepatan pembangunan, serta peluang dan tantangan dalam penerapan kontrak kinerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Transformasi riset dan inovasi juga dapat membantu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Prevalensi Stunting, Tuberkulosis Dan HIV/AIDS.

Prevalensi balita kurus dan pendek Kota Cirebon yang tinggi ini tentu akan menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Ini biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang bagian tubuh lainnya seperti tulang, otak, atau ginjal.



8. Optimalisasi Pemajuan Kebudayaan Dan Pariwisata.

Dengan jumlah sanggar seni sebanyak 197 unit dan jumlah wisatawan ke Kota Cirebon yang naik signifikan, maka jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya harus ditingkatkan. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi kegiatan untuk terwujudnya rencana pariwisata buatan yang akan dikembangkan di Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Kesenden, dan Taman Ade Irma Suryani di Kelurahan Lemahwungkuk, termasuk juga optimalisasi pengelolaan kampung wisata yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan. Untuk pengembangan kebudayaan, diperlukan peningkatan pengelolaan cagar budaya dan pelestarian warisan budaya Cirebon dalam kehidupan, baik di pemerintahan maupun masyarakat.

9. Potensi Gangguan Stabilitas Politik Daerah Dalam Menghadapi Pemilu Dan Pilukada

Berdasarkan Buku Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, ada 6 (enam) isu utama kerawanan yang memerlukan kebijakan antisipasi berdasarkan pemetaan IKP Pemilu dan Pemilihan 2024, yaitu 1) jumlah partai politik peserta pemilu, 2) pelaksanaan tahapan pemilu di provinsi baru, 3) Netralitas penyelenggara pemilu dalam tahapan pemilu berikutnya, 4) polarisasi masyarakat dan dukungan politik, 5) penggunaan media sosial untuk konstataasi, serta 6) Pemenuhan hak memilih dan dipilih untuk perempuan dan kelompok rentan.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2025. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2025.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Keberhasilan pembangunan ekonomi di Kota Cirebon tentunya tidak lepas dari usaha Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam mewujudkan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religious, Aman dan Berkelanjutan Tahun 2029”.



untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, antara lain:

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
2. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:** Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah juga dapat diukur melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang dapat digunakan antara lain tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
3. **Investasi dan Peningkatan Lapangan Kerja:** Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah juga dapat diukur melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Indikator yang dapat digunakan antara lain jumlah investasi yang masuk ke daerah, jumlah perusahaan baru yang didirikan, dan tingkat pengangguran.
4. **Infrastruktur dan Aksesibilitas:** Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah juga dapat diukur melalui peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas. Indikator yang dapat digunakan antara lain panjang jalan, ketersediaan listrik, akses internet, dan ketersediaan transportasi publik.
5. **Diversifikasi Ekonomi:** Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah juga dapat diukur melalui diversifikasi sektor ekonomi. Indikator yang dapat digunakan antara lain kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB, seperti sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa.
6. **Kualitas Sumber Daya Manusia:** Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah juga dapat diukur melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator yang dapat digunakan antara lain tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.
7. **Keberlanjutan Lingkungan:** Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah juga dapat diukur melalui keberlanjutan lingkungan. Indikator yang dapat digunakan antara lain tingkat polusi udara dan air, pengelolaan limbah, dan penggunaan energi terbarukan.

Tolak ukur di atas dapat digunakan secara bersama-sama atau terpisah untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

Memperhatikan arah kebijakan nasional tahun 2025 difokuskan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, serta dukungan terhadap ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan Nasional Tahun 2025 yaitu :



a. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif:

Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi tetapi juga merata di berbagai sektor dan wilayah, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas.

b. Peningkatan Kualitas SDM:

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja, serta mendukung penguatan karakter dan jati diri bangsa.

c. Penguatan Infrastruktur:

Pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur konektivitas, energi, pangan, dan digital terus dipercepat untuk mendukung transformasi ekonomi dan sosial.

d. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan:

Kebijakan ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, mendorong pemberdayaan UMKM, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.

e. Dukungan terhadap Program Prioritas:

Kebijakan nasional juga mendukung program-program prioritas seperti makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan, ketahanan pangan, dan reformasi subsidi untuk meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) dan ketahanan pangan.

f. Penguatan Belanja Negara:

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

g. Pemerataan Pembangunan:

Kebijakan nasional juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang masih tertinggal.

h. Penguatan Keuangan Negara:

Penerimaan negara dalam APBN 2025 direncanakan melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

i. Arah Kebijakan Fiskal:

Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan, serta berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran

.Prioritas pembangunan nasional tahun 2025 adalah memperkuat ideologi Pancasila dan hak asasi manusia, meningkatkan pertahanan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air,



serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.

Selain itu, prioritas pembangunan nasional tahun 2025 juga mencakup pembangunan infrastruktur, penanganan kemiskinan, dan pembangunan sosial budaya masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 memuat lebih detail mengenai strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga, dan kerangka ekonomi makro.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Barat tahun 2025 fokus pada pemenuhan layanan dasar, percepatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan ini mencakup peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.

Kebijakan tersebut dijabarkan melalui :

- a. Peningkatan Layanan Dasar:
Pemerintah Jawa Barat berupaya meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan dan pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil.
- b. Percepatan Pembangunan Infrastruktur:
Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi akan dipercepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemudahan mobilitas masyarakat.
- c. Peningkatan Kualitas Hidup:
Kebijakan pembangunan Jawa Barat juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan mereka, seperti pembangunan rumah rakyat dan penataan lingkungan.
- d. Pembangunan Berbasis Desa:
Pemerintah Jawa Barat akan melanjutkan pembangunan dari desa dan dari bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberantasan kemiskinan.
- e. Hilirisasi dan Pengembangan Industri:
Akan ada fokus pada hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- f. Reformasi dan Pencegahan Korupsi:
Pemerintah Jawa Barat akan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan judi.
- g. Penyelarasan dengan Lingkungan:



Akan ada fokus pada penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan April 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2025, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Hal ini selaras dengan Tema pembangunan Kota Cirebon tahun 2025 adalah " Penguatan sarana prasarana public dan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan public dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat yang SETARA berkelanjutan". Tema ini mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, tata kelola pemerintahan yang berkualitas, serta peningkatan infrastruktur dan kualitas ruang publik.

Point penting dalam Tema Pembangunan tersebut adalah :

Penguatan sarana prasarana publik dan tata kelola pemerintahan merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat secara setara dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas publik yang memadai, penerapan prinsip-prinsip good governance, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

1. Penyediaan fasilitas publik yang memadai

Pemerintah perlu memastikan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana publik seperti jalan, jembatan, transportasi umum, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Peningkatan aksesibilitas:

Fasilitas publik harus dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Sarana dan prasarana publik yang ada perlu dipelihara secara rutin dan diperbaiki jika mengalami kerusakan agar tetap berfungsi optimal dan aman digunakan.

2. Penerapan prinsip-prinsip good governance

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum.

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik



Pelayanan publik yang berkualitas dicirikan oleh kecepatan, kemudahan, keamanan, dan biaya yang terjangkau. Pemerintah perlu terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi (e-government).

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2025 Untuk Perubahan RKPD berfokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efisiensi belanja, dan sinergi dengan kebijakan pusat untuk mendukung pembangunan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai acuan untuk perubahan RKPD Tahun 2025, juga mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Menyelaraskan dengan Prioritas Daerah berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025-2029.

Pemerintah daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD melalui berbagai cara, seperti perbaikan administrasi pajak daerah, penggalan potensi baru, dan optimalisasi retribusi daerah. Kebijakan juga diarahkan untuk meningkatkan belanja modal dan infrastruktur guna mendukung akselerasi pembangunan. Efisiensi belanja operasional juga menjadi fokus utama.

Kebijakan keuangan daerah perlu disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait dengan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan kebijakan fiskal.

Kebijakan keuangan daerah juga diarahkan untuk reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025 serta strategi pencapaiannya. Arah kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah pendapatan daerah secara umum diproyeksikan turun sebesar 0,73 persen atau sebesar Rp10.723.545.292,00 menjadi Rp1.741.975.001.330,00 dari APBD Tahun Anggaran 2025 (Murni) sebesar Rp1.754.624.268.694,00.



Penurunan pendapatan tersebut bersumber dari PAD diproyeksikan turun sebesar 2,04 persen.

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 diproyeksikan tetap.

Upaya untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah, yang meliputi :

1. Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
2. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak daerah.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
6. Pemberian *reward* kepada wajib pajak baik untuk jenis pajak PBB P2 dan BPHTB, juga untuk objek pajak lainnya di luar PBB P2 dan BPHTB seperti pajak hotel, pajak restoran dan lainnya, yang melakukan pembayaran dan pelaporan tepat waktu, serta wajib pajak yang membayar pajak reklame tertinggi.
7. Mengoptimalkan pengelolaan aset.
8. Meningkatkan kinerja BUMD.
9. Meningkatkan koordinasi baik dengan organisasi perangkat daerah pengelola pendapatan, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Arah kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 dituangkan dalam tabel di bawah ini :



Tabel 3.1
Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPD Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	779,879,929,358	764,303,301,534	(15,576,627,824)
4.1.01	Pajak Daerah	384,669,545,456	379,092,917,632	(5,576,627,824)
4.1.02	Retribusi Daerah	339,822,727,989	339,822,727,989	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15,900,000,000	15,900,000,000	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	39,487,655,913	29,487,655,913	(10,000,000,000)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	974,744,339,336	977,671,699,796	2,927,360,460
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	929,209,799,000	925,497,600,000	(3,712,199,000)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45,534,540,336	52,174,099,796	6,639,559,460
	Jumlah Pendapatan	1,754,624,268,694	1,741,975,001,330	12,649,267,364

Sumber : SIPD Kota Cirebon data diolah



Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dikelompokkan atas :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan turun sebesar Rp15.576.627.824,00 menjadi R764.303.301.534,00 dari APBD Murni 2025 sebesar Rp779.879.929.358,00 yang terdiri dari:

- Pajak daerah turun sebesar Rp5.576.627.824,00 menjadi Rp379.092.917.632,00 dari APBD 2025 Murni sebesar Rp384.669.545.456,00
- Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp339.822.727.989,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp 15.900.000.000,00
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp29.487.665.913,00

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer diproyeksikan naik sebesar 0,3 persen atau sebesar Rp2.927.360.460,00 dari APBD 2025 Murni sebesar Rp974.744.339.336,00 menjadi Rp977.671.669.796,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan turun sebesar Rp3.712.199.000,00 menjadi Rp925.497.600.000,00 dari APBD 2025 Murni sebesar Rp929.209.799.000,00.
- Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan sebesar Rp 52.174.099.796,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.639.559.460,00 atau naik sebesar 12,73 persen dari APBD 2025 Murni sebesar Rp45.534.540.336,00.



3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan naik 1,37 persen atau sebesar Rp 24.144.767.534,00 dari APBD 2025 Murni sebesar Rp1.734.419.135.944,00 menjadi Rp1.758.563.903.478,00.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 meliputi:

1. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah serta program asta cita;
2. Menyelaraskan dengan prioritas nasional; dan
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.
4. Membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, study banding, percetakan publikasi dan seminar.
5. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;
6. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
7. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
8. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
9. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
10. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).



Alokasi anggaran untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

11. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja dalam rangka peningkatan indeks pendidikan.
12. Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan.

Arah kebijakan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 dituangkan dalam tabel di bawah ini :



Tabel 3.2
Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1,572,792,670,586	1,579,178,040,675	6,385,370,089
5.1.01	Belanja Pegawai	842,584,903,680	847,505,343,007.06	4,920,439,327.06
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	671,620,997,296	673,050,928,057.94	1,429,930,761.94
5.1.03	Belanja Subsidi	1,880,000,000	1,880,000,000	-
5.1.04	Belanja Hibah	54,618,769,610	54,653,769,610	35,000,000
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	2,088,000,000	2,088,000,000	
5.2	BELANJA MODAL	156,626,465,358	174,363,129,141	17,736,663,783
5.2.01	Belanja Modal Tanah	879,241,030	879,241,030	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95,716,552,015	99,211,472,506	3,494,920,491
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44,825,752,892	44,296,281,452	(529,471,440)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11,474,847,267	26,759,555,465	15,284,708,198
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,480,072,154	2,966,578,688	(513,493,466)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	250,000,000	250,000,000	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000	5,022,733,662	22,733,662
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	5,022,733,662	22,733,662
	Jumlah Belanja	1,734,419,135,944	1,758,563,903,478	24,144,767,534

Sumber : SIPD Kota Cirebon



Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan 1,37 persen atau sebesar Rp24.144.767.543,00 menjadi Rp1.758.563.903.478,00 dari APBD 2025 Murni sebesar Rp1.734.419.135.944,00 belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.579.178.040.675,00 terdapat kenaikan sebesar Rp6.385.370.089,00 atau naik 0,4 persen dari APBD 2025 Murni sebesar Rp1.572.792.670.586,00.

2) Belanja Modal

Belanja Modal pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp174.363.129.141,00 terdapat peningkatan 10,17 persen atau sebesar Rp17.736.663.783,00 dari APBD 2025 Murni sebesar Rp.156.626.465.358,00.

3) Belanja Tidak terduga

Belanja tak terduga pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp5.022.733.662,00 mengalami peningkatan sebesar Rp22.733.662,00 atau sebesar 0,4 persen dari APBD 2025 Murni sebesar Rp5.000.000.000,00.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam dua (2) tahun, proyeksi/target tahun rencana serta satu (1) tahun



rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.3
Pembiayaan Daerah Pada Perubahan RKPD Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6,437,417,188	43,231,452,086	36,794,034,898
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6,437,417,188	43,231,452,086	36,794,034,898
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	6,437,417,188	43,231,452,086	36,794,034,898
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26,642,549,938	26,642,549,938	-
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	17,500,000,000	17,500,000,000	-
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9,142,549,938	9,142,549,938	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	26,642,549,938	26,642,549,938	-

Sumber : SIPD Kota Cirebon



Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp43.231.452.086,00 terdapat kenaikan sebesar Rp36.794.034.898,00 dari APBD 2025 Murni sebesar Rp6.437.417.188,00. Kenaikan tersebut bersumber dari SiLPA sebesar Rp43.231.452.086,00. SiLPA tersebut merupakan SiLPA berhadapan yang berasal dari antara lain Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi dan sisa Kas BLUD yang sudah jelas peruntukannya sehingga tidak dapat dipakai untuk membiayai usulan tambahan belanja yang diusulkan oleh perangkat daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo diproyeksikan tetap sebesar Rp26.642.549.938,00.

3.3 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun menurut setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.



Tabel 3.4
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2025 Perubahan berdasarkan RKPD 2025

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,89	77,45	77,08	78,53
2	Gini Rasio	Poin	0,468	0,468	0,428	0,419 - 0,428
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,82	9,16	9,02	7,58 – 8,37
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,50	7,66	6,29	6,15 – 6,64
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,10	5,01	5,02	5,06

Sumber : Bappelitbangda Kota Cirebon, data diolah. Berdasarkan RKPD 2025

Tabel 3.5
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah
Kota Cirebon Tahun 2025 untuk Perubahan Tahun 2025 berdasarkan
Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	77,91
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06
3	PDRB per kapita	Rupiah Juta	91.98 - 92.34
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6.57 - 7.16
5	Indeks Gini	Indeks	0.455 - 0.462
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	85,24
7	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,00
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	tonCO2eq/2010 IDR Milyar	0,15
9	Tingkat kemiskinan	Persen	7,58 - 8,37

Sumber : Bappelitbangda Kota Cirebon, data diolah. Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah didasarkan pada hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Cirebon 2025-2029, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, kerangka ekonomi beserta pendanaan daerah.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta indikator prioritas kegiatannya, memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun yang bersangkutan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024-2026, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan. Selain itu, berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, untuk mewujudkan keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan di Kota Cirebon, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 harus memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 direpresentasikan dengan tema pembangunan **“Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Kota Cirebon Yang Mandiri”**. Penentuan tema pembangunan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang telah ditetapkan pada dokumen RPD. Dalam perjalanannya, maka Rancangan Akhir penyusunan Perubahan RKPD Kota Cirebon Tahun 2025 harus menyelaraskan dengan Tema Pembangunan dalam Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 yaitu : **“Penguatan sarana prasarana publik dan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat yang SETARA berkelanjutan”** , sehingga prioritas program menyelaraskan dengan amanat perubahan tersebut.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cirebon diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan dengan target yang akan dicapai per satu tahun periode perencanaan. Adapun target capaian indikator tujuan dan sasaran untuk tahun 2025 dan perubahan pada RKPD 2025 adalah sebagaimana tabel 4.1.



Tujuan/Sasaran		Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target 2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Tujuan: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat										
			a.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	75,73	75,89	75,93	77,45	76,76	78,09	77,28
			b.	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	8,55	9,82	8,35	9,16	8,94	9,02	8,87
			c.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	56,76	53,11	56,82	50,04	56,08		56,13
	Sasaran:										
1.1		Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	a.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,85	13,14	13,99	13,16	13,15	13,17	13,17
			b.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,48	10,33	10,61	10,37	10,75	10,53	10,96
			c.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)					10,00		10,50
1.2		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Cirebon	a.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,51	72,74	72,64	75,17	75,18	75,48	72,90
			b.	Prevalensi Balita Stunting (Persen)		17			14		13
			c.	Angka Kejadian TB (/100 ribu pddk)		588			497		
			d.	Skor Pola Pangan Harapan/PPH (Poin)	93,5	88,1	95,15	92,26	92	92,60	88,3



Tujuan/Sasaran		Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target 2025
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.3		Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup	a. Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	12.307	12.090	12.628	12.506	12.550	12,869	12.750
			b. Tingkat Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Jangkauan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		12,15			12,20		12,30
1.4		Terkendalinya jumlah penduduk	a. Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0,50	0,47	0,47	0,71	0,98	1,22	0,96
1.5		Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga	a. Angka Partisipasi Masyarakat Olahraga (Persen)		NA			54,00		55,00
			b. Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda terbina (Persen)		67,00			65,00		70,00
1.6		Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dan Perlindungan Anak	a. Indeks Pembangunan Gender/IPG (Poin)	94,41	94,46	94,46	94,91	94,47	95,55	94,52
			b. Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (Poin)	77.73	7764	78.47	78,07	78,70	77,03	79,93



Tujuan/Sasaran		Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target 2025
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
			c. Jumlah Skor Evaluasi Kota Layak Anak (Poin)		535			550		575
1.7		Menurunnya Dampak Perubahan Iklim	a. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Persen)	7.11	5.73	7.72	7,25	7,87	7,99	7,96
1.8		Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	a. Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya (Persen)	76.21	76.47	78.41	79,83	76,50	77,45	69,63
1.9		Menurunnya Tingkat Pengangguran	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	9.00	8.42	8.50	7,66	7,65	6,29	10,00
	Tujuan:									
2	Meningkatkan potensi, kapasitas dan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah		a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Persen)	5.17-5.81	5.10	5.50-6.15	5,01	4,49	5,18	5,08
	Sasaran:									
2.1		Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan	a. Kontribusi PDRB dari Sektor Industri (ADHB) (Persen)	11.15-11.22	10.37	11.80-11.87	10,44	10,87	10,09	11,33
			b. Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (ADHB) (Persen)	5.57-5.61	5.59	5.90-5.93	6,07	5,60	5,72	5,72



Tujuan/Sasaran		Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target 2025
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
			c. Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (ADHB) (Persen)	32.48-32.67	28.77	34.37-34.58	28,77	30,46	27,31	31,27
			d. Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian dan Perikanan (ADHB) (Persen)	0.32	0.34	0.32	0,34	0,34	0,32	0,34
2.2		Meningkatnya Investasi Penanaman Modal	a. Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Persen)		420			4,68		5,59
	Tujuan:									
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa		a. Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	77	63,53	80	73,91	67,50		70,00
	Sasaran:									
3.1		Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Poin)	3,1	3,17	3,2	3,55	3,40	4,13	3,30
3.2		Meningkatnya tindak lanjut hasil kelitbangan dan inovasi daerah	a. Persentase rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kelitbangan yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh	70	NA	80	92,11	71	71,43	71,00



Tujuan/Sasaran	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target 2025
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3.3	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan	a. Nilai SAKIP (Poin)		68,08			71,00		71,50
		b. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah (Peringkat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		c. Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)		NA			82,00		83,00
		d. Tingkat Maturitas SPIP (Poin)	3	3	4	3	3	3,2	3,100
		e. Indeks Perencanaan Pembangunan (Poin)		NA			95,58		97,34
		f. Indeks Profesionalitas ASN (Poin)		52,15			70,00		72,00
3.4	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat	a. Persentase Kelurahan Cepat Berkembang (Persen)	59,09	59,09	59,09	86,00	90,91	90,91	90,91
		b. Persentase Kelurahan		41,00			40,91		40,91



Tujuan/Sasaran	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target 2025
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3.5	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah	Swasembada (Persen)							
		a. Indeks Ketahanan Daerah (Poin)		NA			0,50		0,51
		b. Jumlah Daerah Rawan Gangguan Trantibum (Lokasi)	25	25	15	15	12	0	10
		c. Kejadian Konflik Kebangsaan, Nasionalisme dan Antar Umat Beragama (Kasus)	0	0	0	0	0	0	



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 merupakan penjabaran Tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cirebon 2024-2026 dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I. Juga merupakan Penyelarasan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota serta Program Prioritas Daerah pembangunan Tahun 2025 dan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Kota Cirebon 2025-2029 yaitu **“TERWUJUDNYA KOTA CIREBON YANG SEJAHTERA, TERTATA, ASPIRATIF, RELIGIUS, AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029 “**

Berdasarkan Visi pembangunan tersebut, ditetapkan 5 (empat) Misi Pembangunan Kota Cirebon 2025-2029, yaitu:

Visi ini menggambarkan cita-cita kolektif Kota Cirebon untuk menjadi kota yang setara dalam pelayanan publik, setara dalam pembangunan antar wilayah di Kota Cirebon, setara dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya dan setara dengan kota-kota maju lainnya dengan mengedepankan kekuatan budaya lokal sebagai basis identitas dan sumber daya ekonomi.

Berikut ini penjelasan pernyataan Visi “Terwujudnya Kota Cirebon yang “SETARA Berkelanjutan” Tahun 2029”:

SEJAHTERA

Pembangunan di Kota Cirebon berorientasi pada kemajuan di segala bidang, berbasis pada budaya dan kearifan lokal yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon yang secara materiil dapat terpenuhi melalui :

1. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat yang diikuti dengan pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,
2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat,
3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,
4. Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat,
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur penunjang lainnya.

TERTATA

1. Bahwa aparaturnya Pemerintah Kota Cirebon perlu ditata agar menjadi birokrasi yang berintegritas, akuntabel, kapabel, adaptif dan responsif terhadap kemajuan jaman.
2. Bahwa wilayah Kota Cirebon perlu untuk ditata agar sesuai dengan peruntukan wilayah dalam rencana tata ruang dan tata wilayahnya, agar



tertib dan teratur berlandaskan pada keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

ASPIRATIF

1. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi hubungan, koordinasi dan kerjasama antar lembaga (eksekutif, legislatif, yudikatif, forkopimda, instansi vertikal lainnya dan antar pemerintah daerah).
2. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (LKK, Posyandu, Pihak Swasta, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Pers/Media, LSM, Kelompok Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Pemangku Adat, Budayawan, Ormas dan Unsur Masyarakat lainnya).

RELIGIUS

1. Nilai-nilai luhur keagamaan dan budaya menjadi spirit Aparatur Pemerintahan untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Good and Clean Governance) dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa, efektif, efisien, berintegritas, akuntabel, kapabel, adaptif dan responsif terhadap kemajuan jaman.
2. Nilai-nilai luhur keagamaan dan budaya tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat

AMAN

1. Semua pihak taat peraturan dan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban bersama.
2. Dalam penegakkan Peraturan Daerah tetap dengan pendekatan manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kemaslahatan bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Kondusifitas kamtibmas untuk mendorong stabilitas ekonomi dan peningkatan iklim investasi serta pengembangan usaha.

BERKELANJUTAN

Kemampuan kota untuk menjaga dan mendukung produktifitas masyarakat dan lingkungan dengan aman dan nyaman secara terus menerus tanpa terbatas waktu.

Untuk mendukung pencapaian visi Terwujudnya Kota Cirebon Yang “SETARA Berkelanjutan” Tahun 2029, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan



pembangunan daerah selama periode RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja. Misi ini berfokus pada pengembangan manusia agar mampu menghadapi tantangan zaman, dunia kerja dan perubahan global. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam arti memiliki tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan keterampilan yang tinggi, mendorong karakter yang religi, mandiri, dan produktif serta mampu berdaya saing di tingkat lokal maupun nasional dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada.

Misi II: Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal

Pembangunan diprioritaskan pada penguatan ekonomi kota berbasis sektor unggulan. Misi ini berfokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi lokal seperti perdagangan dan jasa, pariwisata heritage dan religi, seni dan budaya, kuliner dan kerajinan.

Misi III: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pembangunan diprioritaskan pada meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Misi ini berfokus pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik diyakini sebagai salah satu strategi utama dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien.

Misi IV: Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan berketahanan

Pembangunan diprioritaskan pada penataan lingkungan perkotaan yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Misi ini berfokus pada upaya penataan ruang kota berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan, dengan memperhatikan mitigasi bencana melalui pengendalian pemanfaatan lahan di daerah rawan bencana serta menjaga daerah resapan air agar tetap hijau dan berfungsi optimal. Pengelolaan sampah yang terpisah antara organik dan



anorganik, serta larangan membuang sampah di sungai, menjadi bagian penting untuk mencegah pencemaran dan bencana lingkungan. Hal ini disertai upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, khususnya pengembangan dan pemeliharaan ruang hijau sebagai paru-paru kota yang berfungsi menurunkan suhu udara, menyerap polutan, mengendalikan erosi, serta meningkatkan daya serap air hujan sehingga dapat mengurangi risiko banjir dan kekeringan. Dalam hal itu juga dilakukan upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi lingkungan, seperti gerakan penanaman pohon, sedekah air, dan pengelolaan sampah secara masif sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan memperkuat ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan bencana alam

Misi V: Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal

Pembangunan diprioritaskan pada terwujudnya kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan.

Misi ini berfokus pada upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi sosial dan budaya lokal sebagai modal utama dalam membangun kota yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pemberdayaan sosial dan budaya lokal tidak hanya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya dan tradisi yang menjadi identitas masyarakat, namun sekaligus meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Lebih jauhnya, hal ini diyakini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mampu beradaptasi dan berperan aktif dalam proses pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat tanpa kecuali.

Tujuan pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon ke dalam arah pembangunan yang lebih terukur dan sistematis. Tujuan ini disusun sebagai bagian penting dalam menyusun kerangka kerja pembangunan jangka menengah daerah yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai selama periode perencanaan 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dalam RPJMD Kota Cirebon bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi pencapaian pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kondisi faktual, potensi lokal, serta tantangan strategis yang dihadapi. Tujuan ini juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, sehingga diharapkan mampu menciptakan sinergi antar lembaga pemerintahan. Tujuan dari Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, kompetitif dan berkarakter

Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan berkarakter merupakan salah satu tujuan dari misi pertama yaitu **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing**. Tujuan ini menggambarkan pembangunan manusia, yang tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas individu dari segi intelektual dan keterampilan, tetapi juga menekankan pentingnya karakter dan daya saing. Tujuan mewujudkan SDM unggul yang memiliki kapasitas tinggi dari segi intelektual dan keterampilan, kreatifitas hingga kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Membangun SDM yang kompetitif dan berkarakter dalam arti mampu bersaing secara sehat baik di tingkat lokal maupun nasional, mendorong terciptanya tenaga kerja yang tidak hanya siap kerja tapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. Pembangunan manusia tidak hanya dari aspek kognitif dan keterampilan tetapi juga karakternya. Karakter menjadi pondasi utama agar SDM memiliki moral/etika, integritas, dan tanggungjawab. Karakter yang kuat akan menjadi penyangga utama agar tercipta SDM unggul yang kompetitif dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Tujuan ini sejalan dengan agenda Pembangunan Nasional dan global (SDGs), serta menjadi dasar bagi pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Pencapaian tujuan ini akan mendorong peningkatan daya saing daerah maupun negara secara keseluruhan, dan menjadi investasi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah.

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah merupakan salah satu tujuan dari misi ke dua yaitu **Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal**. Tujuan ini menggambarkan upaya untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah secara merata dan berkesinambungan berbasis pada potensi khas Kota Cirebon yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin, rentan dan pelaku UMKM. Pembangunan ekonomi dikuatkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar yang memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon seperti perdagangan, jasa, pariwisata heritage dan religi, seni dan budaya, kuliner dan kerajinan.



Tujuan ini sejalan dengan visi Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya *economic growth with equity* dan keberlanjutan. Dengan memaksimalkan potensi lokal, daerah dapat membangun ketahanan ekonomi sendiri, mengurangi ketimpangan antar wilayah, dan menjadi kontributor signifikan terhadap perekonomian nasional.

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu tujuan dari misi ke tiga yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Tujuan ini menggambarkan pembangunan pemerintahan yang bertumpu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana pemerintah hadir sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat secara efektif, efisien, dan terpercaya. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjamin keterbukaan informasi, memperkuat kepercayaan publik, mengurangi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, memastikan masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan secara aktif. Penyelenggara pemerintahan juga harus bertanggungjawab terhadap kebijakan, pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran secara terbuka dan jujur. Pemerintahan yang partisipatif membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Fokus utama dari peningkatan tata kelola pemerintahan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, ditandai dengan layanan yang cepat, murah, mudah, adil, dan ramah dengan sistem layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menjawab tuntutan masyarakat secara efektif.

4. Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan

Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan merupakan salah satu tujuan dari misi ke empat yaitu **Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan berketahanan**. Tujuan ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Cirebon mewujudkan kota yang tertata rapi, nyaman dan ramah lingkungan dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara



berkelanjutan dan berketahanan guna mendukung kualitas hidup masyarakat dan keberlangsungan pembangunan kota.

5. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan.

Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan merupakan salah satu tujuan dari misi ke lima yaitu **Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal**. Tujuan ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan fokus utama pada penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan. Penurunan kemiskinan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh melalui pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, pelestarian budaya lokal, serta pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap tahapan pembangunan.

Secara lebih rinci, Tujuan dan Sasaran pada Perubahan RKPD 2025 menyelaraskan dengan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PD
			2025	
TUJUAN 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, kompetitif dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	77,91	
1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah	Persen	13,18	DISDIK
	Angka Literasi/Numerasi	Skor	82,00	DISDIK, DISPUSIP
	Rata-rata Lama Sekolah	Persen	13,18	
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara merata	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	75,48	DINKES
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,385	DINKES, DP3APPKB
	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk*	per 100.000 pddk	451	DINKES
3. Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif	Tingkat produktivitas tenaga kerja kota	Rupiah Per Tenaga Kerja	49.360.000	DISNAKER
4 Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius	Tingkat Pengembangan SDM Berkarakter*			DISDIK, DISPORA, SETDA
Tujuan 2 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06	
	PDRB per kapita	Rupiah Juta	91.98 - 92.34	



TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PD
			2025	
berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6.57 - 7.16	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,21	
	Indeks Gini	Indeks	0.455 - 0.462	
1. Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran	persen	28.33%	DKUKMPP
	Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan		14,47	DKUKMPP, DISHUB
	Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	persen	5.82%	DISBUDPAR
	Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif	persen	18.80	DISBUDPAR, DKUKMPP
	Kontribusi PDRB sektor Jasa keuangan dan asuransi			SETDA
2. Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	persen	13.25%	DPMPSTSP
3. Meningkatnya kinerja BUMD	Return on Asset (ROA) BUMD	persen	2,51	SETDA
4. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	persen	2.39%	DKUKMPP
	Rasio Volume Usaha UMKM terhadap PDRB	persen	0.30%	DKUKMPP
	Pengeluaran perkapita anggota koperasi	Rupiah	Rp14,200,000	
5. Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	persen	94,71	DISNAKER
6. Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru	Indeks ekonomi hijau pilar Ekonomi	Indeks	71,71	DLH, DKP3
	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	persen	0,25	DKP3
7. Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Indeks	84,12	DKP3
Tujuan 3 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	85,24	
	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,00	
1. Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	97,95	BAPPELITB ANGDA
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,100	INSPEKTORAT
	Nilai SAKIP Kota	Skor	69,25	SETDA
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		66,75	BPKPD
	Indeks SPBE	Poin	4,19	DKIS



TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PD
			2025	
2. Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat	Indeks ketenteraman dan ketertiban umum*	Indeks		SATPOL PP, BPBD, DPKP, KESBANGPOL
3. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	79,00	BPKSDM
4. Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Skor	4,04	DISDUKCA PIL, DPMPTSP
	Indeks Kepuasan Masyarakat			SETDA, DISDUKCA PIL, DPMPTSP, SETWAN
5. Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah		53,74	BAPPELITB ANGDA
Tujuan 4 Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	Penurunan Intensitas Emisi GRK	tonCO₂eq/ 2010 IDR Milyar	0,15	
1. Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,29	DLH, DPUTR
2. Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	Indeks Layanan Infrastruktur Kota*			DPUTR, DPRKP
	Proporsi ruang terbuka hijau*			DLH
	Indeks Smart City	Indeks	3,44	SETDA
3. Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi	Rasio Konektivitas Kota		0,18	DISHUB
4. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Indeks	125,06-124,84	BPBD, DPKP
	Intensitas Emisi GRK Kumulatif	tonCO ₂ eq	8.381,49	DLH
Tujuan 5 Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan	Tingkat kemiskinan		7,58 - 8,37	
1. Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat akses layanan dasar*			DINSOS



TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PD
			2025	
2. Meningkatnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan.	Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	persen	69,63%	DISBUDPAR
3. Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan*			DP3APPKB, DISDUKCAPIL
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	61,54	DP3APPKB
	Indeks ketimpangan gender			
	Indeks Pemberdayaan Gender/IDG			
	Indeks Ketimpangan Gender		405	DP3APPKB
	IPA (Indeks Perlindungan Anak)*		69.36	DP3APPKB
4. Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis.	Indeks Harmoni Indonesia	skor	6,65	KESBANGPOL



Tabel 4.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pada Perubahan RKPD 2025 Berdasarkan Penyelarasan dengan rancangan Akhir RPJMD 2025-2029

TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Tujuan 1. Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter		
1.1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Optimalisasi partisipasi dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Mengoptimalkan partisipasi dan menyelenggarakan pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah).
	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter	Memperkuat kurikulum pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter.
	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang merata di seluruh wilayah kota	Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini secara merata di seluruh wilayah kota.
	Kebijakan peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik sesuai dengan keahliannya	Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik sesuai keahlian.
	Penataan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur layanan pendidikan yang sesuai standar.	Menata dan memenuhi kebutuhan infrastruktur layanan pendidikan sesuai standar.
	Kebijakan pendidikan nonformal dan pendidikan terbuka, serta penyiapan akses dan pembangunan pendidikan bagi warga tidak mampu sebagai upaya peningkatan inklusi sosial, pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan.	Menerapkan kebijakan pendidikan nonformal dan terbuka serta menyediakan akses pendidikan bagi warga tidak mampu untuk inklusi sosial.
	Penyiapan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan.	Menyiapkan masyarakat lokal sebagai guru dan tenaga kependidikan.
1.2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara merata	Peningkatan akses terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta dapat menjangkau seluruh wilayah untuk pelayanan primer dan rujukan	Meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan berkualitas untuk pelayanan primer dan rujukan.
	Pemenuhan sarana dan prasarana air minum, sanitasi, ruang terbuka hijau untuk mendukung aktivitas fisik dan pola hidup sehat	Memenuhi sarana air minum, sanitasi, dan ruang terbuka hijau untuk mendukung gaya hidup sehat.
	Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan	Memeratakan distribusi tenaga kesehatan.
	Pencegahan dan penuntasan stunting dengan dukungan integrasi data melalui pemanfaatan sistem informasi geospasial dan pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan lokal untuk mendukung upaya menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi	Mencegah dan menuntaskan stunting dengan integrasi data dan pemenuhan gizi seimbang berbasis pangan lokal.
	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
	Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim	Mencegah dan menangani penyakit menular, tropis, dan dampak perubahan iklim.



TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	Kebijakan layanan jaminan kesehatan nasional	Menerapkan kebijakan layanan jaminan kesehatan nasional.
	Pengawasan kualitas produk peternakan yang beredar, dengan pemeriksaan organoleptis dan pengujian laboratorium, serta sosialisasi kualitas dan penanganan produk asal hewan	Mengawasi kualitas produk peternakan dan mencegah penyakit hewan menular.
	Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis	
1.3. Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif	Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling yang terintegrasi dengan pemagangan dan penempatan tenaga kerja.	Menyiapkan, memetakan, dan meningkatkan kualitas SDM usia produktif melalui upskilling dan reskilling yang terintegrasi dengan pemagangan dan penempatan tenaga kerja.
	Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan	Meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses layanan keuangan dan permodalan.
1.4. Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius	Penguatan karakter dan identitas bangsa melalui pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan kedaulatan politik hukum dan ketentraman serta ketertiban umum	Memperkuat karakter dan identitas bangsa melalui pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan kedaulatan politik, hukum, ketentraman, dan ketertiban umum.
Tujuan 2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah.		
2.1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan jasa, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan kinerja BUMD	Peningkatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor jasa dan perdagangan didukung fasilitas MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran) yang sinergis dengan rencana pengembangan kawasan Rebana	Meningkatkan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik andal, termasuk fasilitas MICE yang sinergis dengan pengembangan kawasan.
	Penguatan tata kelola sektor perdagangan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, peningkatan ekspor, pembukaan pasar baru, pengembangan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia	Memperkuat tata kelola sektor perdagangan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, ekspor, pembukaan pasar baru, dan pengembangan SDM.
	Penataan dan penguatan daya tarik wisata budaya dan wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif sejalan dengan pengembangan MICE.	Menata dan memperkuat daya tarik wisata budaya dan perkotaan secara kolaboratif.
	Penataan dan restrukturisasi BUMD.	Menata dan restrukturisasi BUMD.
	Industrialisasi koperasi terutama pada komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna	Mengindustrialisasi koperasi pada komoditas unggulan, memperkuat proses bisnis, kelembagaan, dan mengadopsi teknologi tepat guna.
	Peningkatan pengendalian inflasi daerah.	Meningkatkan pengendalian inflasi daerah.
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak dan retribusi, pembiayaan alternatif, kualitas belanja, dan sinergi perencanaan.



TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
2.2. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis serta akses terhadap jasa keuangan. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	Memperkuat proses bisnis UMKM dengan memperluas ekosistem digital, ruang inovasi, kreasi, inkubator bisnis, dan akses jasa keuangan. Memberdayakan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.
2.3. Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha bagi IKM/UMKM maupun usaha yang dapat menyerap tenaga kerja padat karya terampil.	Meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha bagi IKM/UMKM dan usaha padat karya terampil.
2.4. Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha ekonomi lokal berbasis ekonomi hijau dan biru Penyediaan sarana prasarana pendukung untuk pengembangan varietas unggul komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan Pengembangan perikanan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak dalam peningkatan produksi hasil perikanan Penyediaan sarana dan prasarana bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha ekonomi lokal berbasis ekonomi hijau dan biru. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan varietas unggul pertanian, perikanan, dan peternakan. Menata kelembagaan dan pembiayaan koperasi bagi petani, peternak, nelayan, serta memperkuat kolaborasi dengan pasar, bank, dan asuransi. Mengembangkan perikanan berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan. Menyediakan sarana peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk.
2.5. Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Peningkatan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan infrastruktur yang terintegrasi Pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta perluasan penerapan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pertanian Peningkatan produksi peternakan, melalui peningkatan jumlah populasi ternak Perluasan pembentukan kampung perikanan budidaya serta peningkatan kapasitas pembudidaya Pembangunan pasar atau jaringan distribusi untuk makanan yang tersisa atau mendekati tanggal kadaluarsa yang aman dan terstruktur	Meningkatkan produktivitas pertanian berdaya saing dengan infrastruktur terintegrasi. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan memperluas pemanfaatan lahan pekarangan untuk pertanian. Meningkatkan produksi peternakan dan populasi ternak. Memperluas kampung perikanan budidaya dan meningkatkan kapasitas pembudidaya. Membangun pasar atau jaringan distribusi makanan aman dan terstruktur.
	Penguatan kerja sama dan kelembagaan sektor pangan serta pengembangan produksi pangan di rumah tangga	Memperkuat kerja sama dan kelembagaan sektor pangan serta mengembangkan produksi pangan di rumah tangga.



TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	Peningkatan knowledge, attitude and practice masyarakat tentang pentingnya kualitas konsumsi dan pemenuhan gizi seimbang serta pentingnya mengurangi pemborosan pangan (stop boros pangan) sejalan	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang konsumsi berkualitas, gizi seimbang, dan pengurangan pemborosan pangan.
	Peningkatan pengetahuan dan akses masyarakat tentang pemanfaatan lahan pertanian di perkotaan salah satunya dengan pemanfaatan pekarangan atau <i>rooftop farming</i> untuk mendukung produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	Memanfaatkan lahan pertanian perkotaan seperti rooftop farming.
	Penerapan praktik pertanian Tangguh untuk mendorong system produksi pangan yang berkelanjutan	Menerapkan praktik pertanian tangguh untuk produksi berkelanjutan.
Tujuan 3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas		
3.1. Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	Membentuk regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan pemerintahan sesuai karakteristik daerah, termasuk pelayanan publik lintas wilayah.
	Pembangunan sistem pengelolaan dan penyusunan regulasi daerah.	Membangun sistem pengelolaan dan penyusunan regulasi daerah.
	Pembangunan infrastruktur digital yang merata, penguatan kapasitas SDM, dan peningkatan keamanan SPBE untuk percepatan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital.	Mengembangkan infrastruktur digital merata, memperkuat kapasitas SDM, dan meningkatkan keamanan SPBE untuk percepatan pelayanan publik digital.
	Pengembangan infrastruktur manajemen risiko untuk pengendalian pembangunan.	Mengembangkan infrastruktur manajemen risiko untuk pengendalian pembangunan.
	Penguatan peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah yang terkoordinasi dan sinergis	Memperkuat peran perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah yang terkoordinasi dan sinergis.
	Peningkatan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan berbagai aspek pembangunan daerah	Meningkatkan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan pembangunan daerah.
3.2. Menerapkan penerapan smart city dalam pembangunan	Penataan kelembagaan berbasis evaluasi yang tepat fungsi serta penguatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan sistem informasi digital.	Menata kelembagaan berbasis evaluasi fungsi dan penguatan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sistem informasi digital.
	Pengembang infrastruktur digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital	Mengembangkan infrastruktur digital untuk transformasi digital.
3.3. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme ASN	Pengembangan sistem meritokrasi untuk pengembangan karir ASN berbasis kinerja.	Mengembangkan sistem meritokrasi berbasis kinerja untuk pengembangan karir ASN.
3.4. Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap	Kebijakan partisipasi masyarakat sipil dan adat dalam kegiatan Musrembang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota	Menerapkan kebijakan partisipasi masyarakat sipil dan adat dalam Musrenbang di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.



TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		
3.5. Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global.	Mengembangkan ekosistem riset dan inovasi IPTEK daerah untuk mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang berdaya saing global.
Tujuan 4. Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan		
4.1. Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan daya dukung lingkungan hidup	Penguatan regulasi dan tata kelola Lingkungan Hidup dengan partisipasi masyarakat Penyusunan strategi pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem serta jasa lingkungannya. Pengelolaan keanekaragaman hayati, pelestarian kawasan lindung, dan ekosistem alami Persiapan Pemulihan ex TPA Grenjeng menjadi kawasan lindung Percepatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pencapaian target pengurangan sampah dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah Penerapan pengelolaan air limbah melalui rekayasa teknis berupa pembuatan kolam retensi, biopori, dan perbaikan dan pengembangan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan sebagai bagian dari konservasi air yang berkelanjutan dengan peningkatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim Pengintegrasian tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota Peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, yang masuk kedalam badan air dan secara signifikan meningkatkan daur ulang	Memperkuat regulasi dan tata kelola lingkungan hidup dengan partisipasi masyarakat. Menyusun strategi pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem dan jasa lingkungan. Mengelola keanekaragaman hayati, melestarikan kawasan lindung, dan ekosistem alami. Memulihkan eks TPA menjadi kawasan lindung. Mempercepat pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Mengurangi sampah dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Mengelola air limbah melalui rekayasa teknis (kolam retensi, biopori, drainase berwawasan lingkungan). Meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, dan literasi masyarakat terhadap bencana. Melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Mengintegrasikan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan pembangunan kota. Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi dan meningkatkan daur ulang.
4.2. Meningkatnya ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	Penyediaan dan pengembangan perumahan yang layak dan terjangkau, infrastruktur air baku dan air minum, serta sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. Pengembangan layanan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan untuk peningkatan ketahanan bencana.	Menyediakan dan mengembangkan perumahan layak dan terjangkau, infrastruktur air baku dan minum, serta sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju zero waste city dan circular economy.



TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	Pemenuhan sarana dan prasarana persampahan	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana persampahan sesuai standar.
	Peningkatan TPS menjadi TPS 3R serta optimalisasi Pusat Daur Ulang Sampah (PDU)	Meningkatkan TPS menjadi TPS 3R dan mengoptimalkan Pusat Daur Ulang Sampah.
	Clean and Clear lahan TPA Kopi Luhur dan revitalisasi TPA Kopi Luhur dengan pembangunann TPST dengan RDF Tahap I (240 ton/ hari)	Merevitalisasi TPA dengan pembangunan TPST dan RDF.
	Penguatan kolaborasi dan kemitraan penyediaan air bersih serta pengembangan strategi dan rencana darurat untuk mengatasi krisis air	Memperkuat kolaborasi penyediaan air bersih dan strategi darurat krisis air.
	Penyediaan dan penataan basis data potensi sumber daya air untuk ketersediaan air yang berkelanjutan	Menyediakan dan menata basis data potensi sumber daya air berkelanjutan.
	Pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh.	Mengembangkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan tangguh.
	Pengembangan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air dengan mengoptimalkan sumber-sumber air baku alternatif, antara lain Jatigede.	Mengoptimalkan sumber-sumber air baku alternatif dan memperkuat kerjasama untuk alternatif supply air bersih.
	Penyediaan dan pengelolaan data sarana prasarana pelayanan dasar yang terintegrasi dengan berbasis spasial	Membangun platform data spasial terintegrasi untuk pengelolaan saras layanan dasar
	Perencanaan penyediaan hunian layak di perkotaan sesuai kebutuhan pengguna dan karakteristik wilayah antara lain melalui penyediaan hunian vertikal, rumah deret, dan optimalisasi kawasan campuran serta penataan kawasan kumuh dengan memperhatikan alternatif skema pembiayaan yang terjangkau.	Menyusun perencanaan perumahan untuk hunian vertikal dengan memperhatikan alternatif skema pembiayaan yang terjangkau.
	Penyediaan, pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum yang merata, aman dan terjangkau bagi semua.	Meningkatkan akses air minum yang merata, aman, dan terjangkau dan menguatkan kolaborasi penyediaan air bersih dan siapkan rencana darurat krisis air.
	Peningkatan akses terhadap sanitasi yang memadai dan merata bagi semua orang	Meningkatkan akses sanitasi dengan membangun MCK komunal dan sistem pengelolaan limbah domestik yang terpusat.
4.3. Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas yang efisien dan merata, termasuk di Cirebon bagian selatan.	Memperluas cakupan layanan sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi yang saling terintegrasi antar moda pada wilayah kota dengan memperhatikan aksesibilitas terhadap prasarana umum



TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas perdagangan dan jasa yang inklusif dan berdaya saing, termasuk antara lain kemudahan aksesibilitas, ketersediaan prasarana sarana umum yang memadai serta penyediaan akses telekomunikasi dan digital.	Menyediakan infrastruktur penunjang aktivitas perdagangan dan jasa yang inklusif dan berdaya saing, termasuk antara lain kemudahan aksesibilitas, ketersediaan prasarana sarana umum yang memadai serta penyediaan akses telekomunikasi dan digital.
	Pembangunan dan perluasan cakupan layanan sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi yang saling terintegrasi antar moda pada wilayah kota dengan memperhatikan aksesibilitas terhadap prasarana umum dan obyek strategis serta kepentingan pengembangan MICE tourism.	Membangun transportasi publik massal rendah emisi yang terintegrasi.
	Perencanaan dan penataan jaringan pergerakan yang mendukung mobilitas yang humanis dan berkelanjutan antara lain jalur pedestrian dan jalur sepeda.	Menata dan mengembangkan jaringan pergerakan yang mendukung mobilitas yang humanis dan berkelanjutan antara lain jalur pedestrian dan jalur sepeda.
4.4. Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan	Perencanaan dan penataan Kawasan pesisir yang sinergis dengan rencana tata ruang.	Melakukan penataan pesisir yang sesuai arahan rencana tata ruang.
	Peningkatan kapasitas dalam upaya pembangunan rendah karbon serta penguatan adaptasi perubahan iklim	Meningkatkan kapasitas dalam upaya pembangunan rendah karbon serta penguatan adaptasi perubahan iklim
	Penyediaan dan penataan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan yang dibutuhkan untuk proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas pembangunan daerah maupun nasional diantaranya penyediaan lahan untuk pembangunan Jalan Lingkar Cirebon, pembangunan embung, serta pendukung pengembangan MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran).	Membangun basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan yang dibutuhkan untuk proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas pembangunan daerah maupun nasional
	Penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan.	Membangun sistem pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan.
	Perencanaan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pemanfaatan energi rendah emisi berbasis energi baru dan terbarukan, khususnya sistem ketenagalistrikan skala kecil pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi	Mengembangkan sistem ketenagalistrikan skala kecil pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi
	Penyelenggaraan penataan ruang yang mengarah pada penerapan compact city dalam penyediaan layanan perkotaan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketersediaan ruang terbuka hijau, keanekaragaman hayati, serta mempertimbangkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim serta wilayah kesatuan lanskap ekologis.	Menerapkan compact city dalam penyediaan layanan perkotaan.
	Penyusunan rencana pengembangan kawasan, antara lain termasuk revisi RDTR, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, standar pelayanan, dsb.	Menyediakan rencana pengembangan kawasan untuk kawasan strategis dan potensial.



TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	Perencanaan dan implementasi penatagunaan tanah	Menyusun penatagunaan tanah yang terintegrasi
	Perencanaan penyediaan cadangan lahan untuk kepentingan pembangunan daerah.	Menyusun rencana penyediaan cadangan lahan untuk kepentingan pembangunan daerah.
	Sinkronisasi periodisasi dan substansi serta integrasi rencana tata ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan berbasis spasial	Melakukan sinkronisasi periodisasi dan substansi serta integrasi rencana tata ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan berbasis spasial
4.5. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Mainstreaming Transisi Energi di masyarakat	Mainstreaming Transisi Energi di masyarakat
	Pengelolaan risiko bencana	Melakukan pengelolaan risiko bencana yang terpadu
	Perencanaan dan penyiapan kerangka implementasi standar bangunan dan penataan lingkungan yang berketahanan bencana dan iklim	Menyusun perencanaan kerangka implementasi standar bangunan dan penataan lingkungan yang berketahanan bencana dan iklim
Tujuan 5. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan yang berkelanjutan.		
5.1. Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Penguatan kebijakan pengendalian penduduk yang didukung sistem database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif yang dapat menyediakan data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.	Menyusun sistem database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif yang dapat menyediakan data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.
	Pemenuhan akses sanitasi dasar pada rumah tangga	Meningkatkan akses sanitasi dasar pada rumah tangga
	Penyediaan dan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar yang merata, meliputi antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi dan penunjang konektivitas, termasuk di kawasan Cirebon selatan.	Meningkatkan akses infrastruktur pelayanan dasar yang merata, meliputi antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi dan penunjang konektivitas di seluruh wilayah
	Penyediaan, pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum yang merata, aman dan terjangkau bagi semua.	Meningkatkan akses layanan air minum yang merata, aman dan terjangkau bagi semua.
	Kebijakan masyarakat penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Menetapkan kebijakan bagi penyandang disabilitas untuk dapat bekerja di sektor formal
	Penataan dan Pemenuhan penyediaan Jaminan Sosial terutama Bagi Kelompok Rentan dan Masyarakat	Menyediakan Jaminan Sosial terutama Bagi Kelompok Rentan dan Masyarakat
	Penguatan peran keluarga dalam pembentukan karakter masyarakat dengan kemudahan akses edukasi dan informasi publik	Menguatkan peran keluarga dalam pembentukan karakter masyarakat dengan kemudahan akses edukasi dan informasi publik
	Perlindungan anak, perempuan, disabilitas, lansia dan pemuda	Meningkatkan perlindungan anak, perempuan, disabilitas, lansia dan pemuda
	Pemberdayaan perempuan, disabilitas, lansia dan pemuda	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, disabilitas, lansia dan pemuda



TUJUAN DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
5.3. Meningkatnya perlindungan dan pelestarian warisan budaya daerah yang berkelanjutan.	Penguatan peran masyarakat dalam pelestarian kebudayaan dan tradisi masyarakat Cirebon	Menguatkan peran masyarakat dalam pelestarian kebudayaan dan tradisi masyarakat Cirebon
	Penguatan karakter dan identitas budaya lokal melalui penggunaan atribut budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya Cirebon.	Menggunakan atribut budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya Cirebon.
5.4. Meningkatnya pemanfaatan budaya lokal dalam pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata.	Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah	Menyiapkan dan menetapkan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah
5.5. Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis.	Penguatan individu dan masyarakat dalam penghargaan dalam keberagaman etnis dan agama	Menguatkan individu dan masyarakat dalam penghargaan dalam keberagaman etnis dan agama

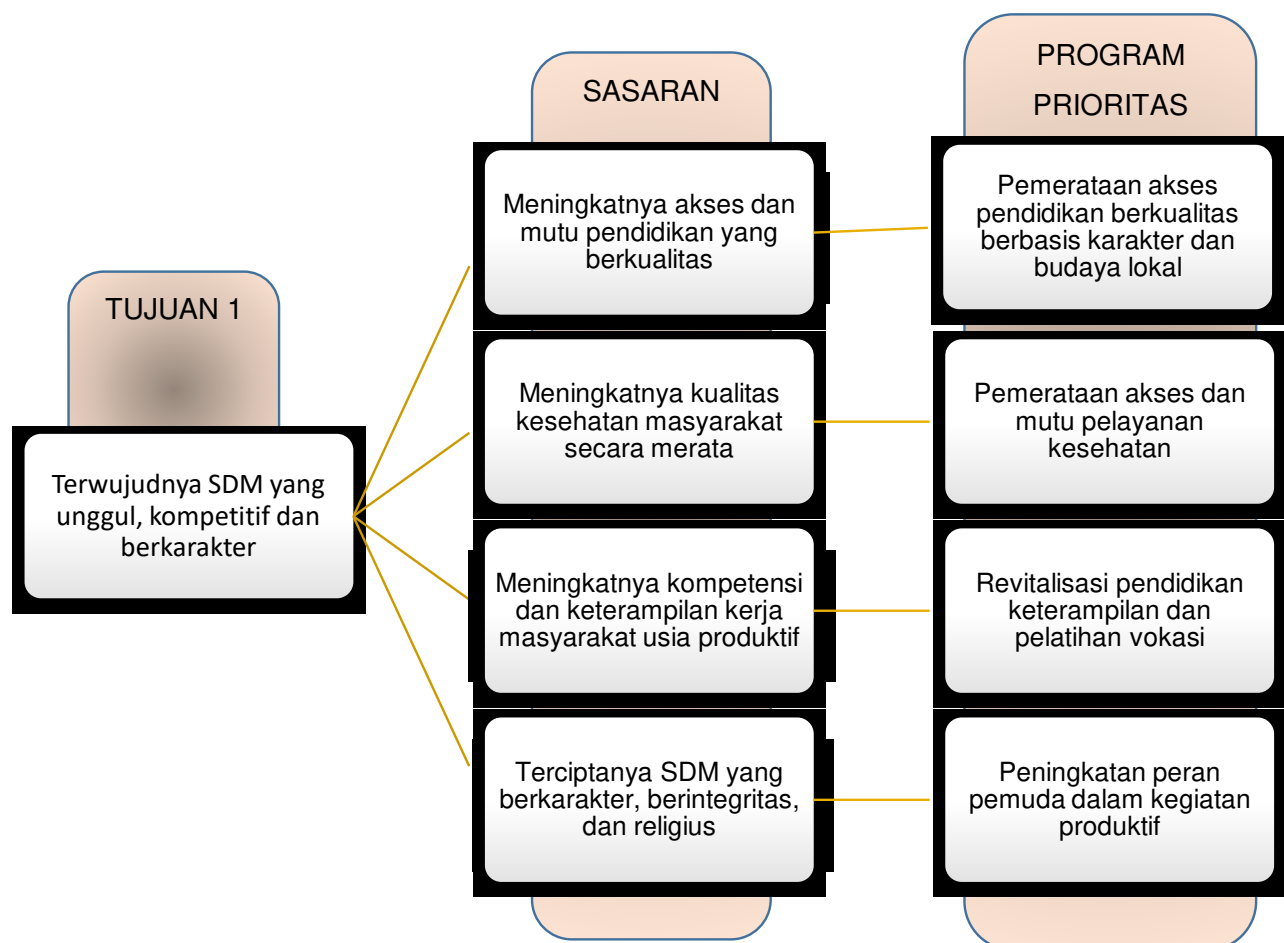
Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029

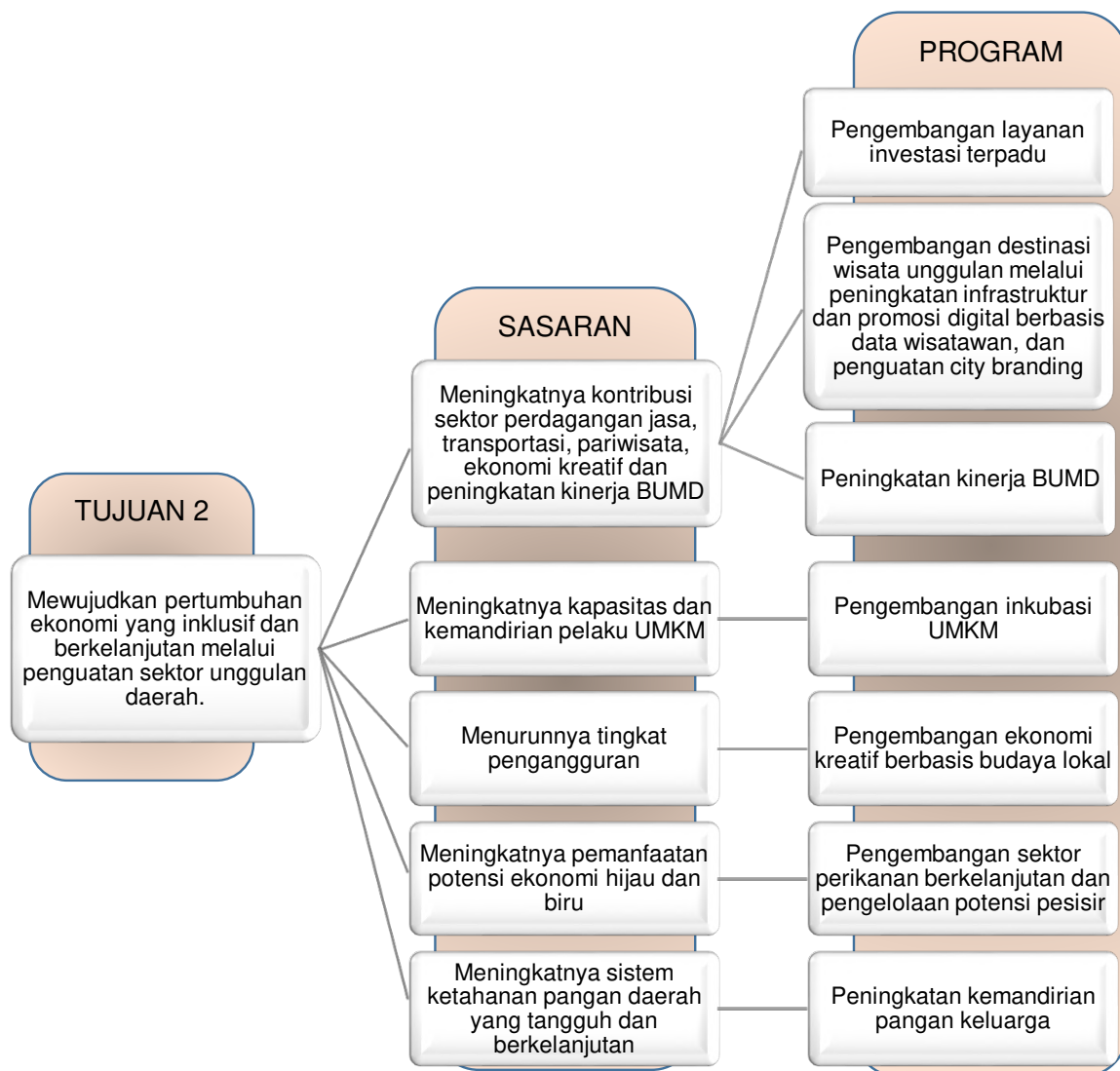


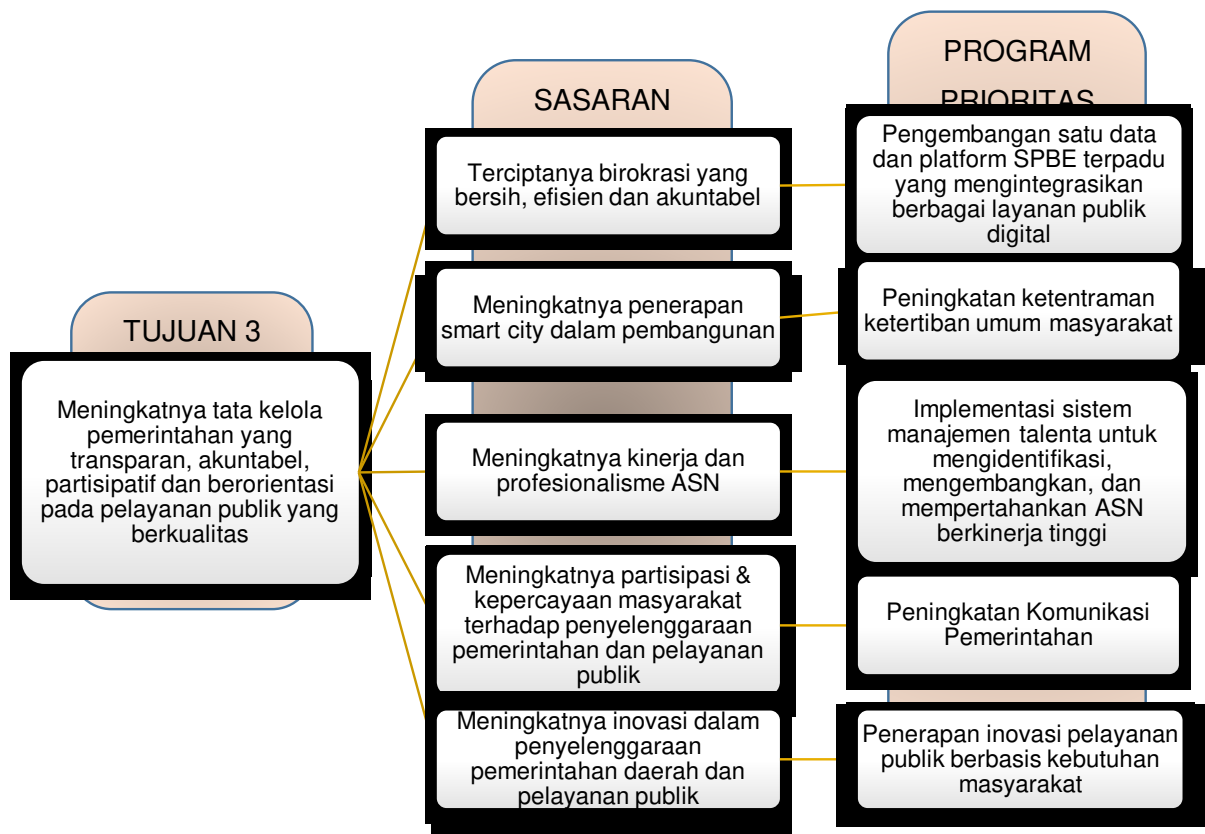
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

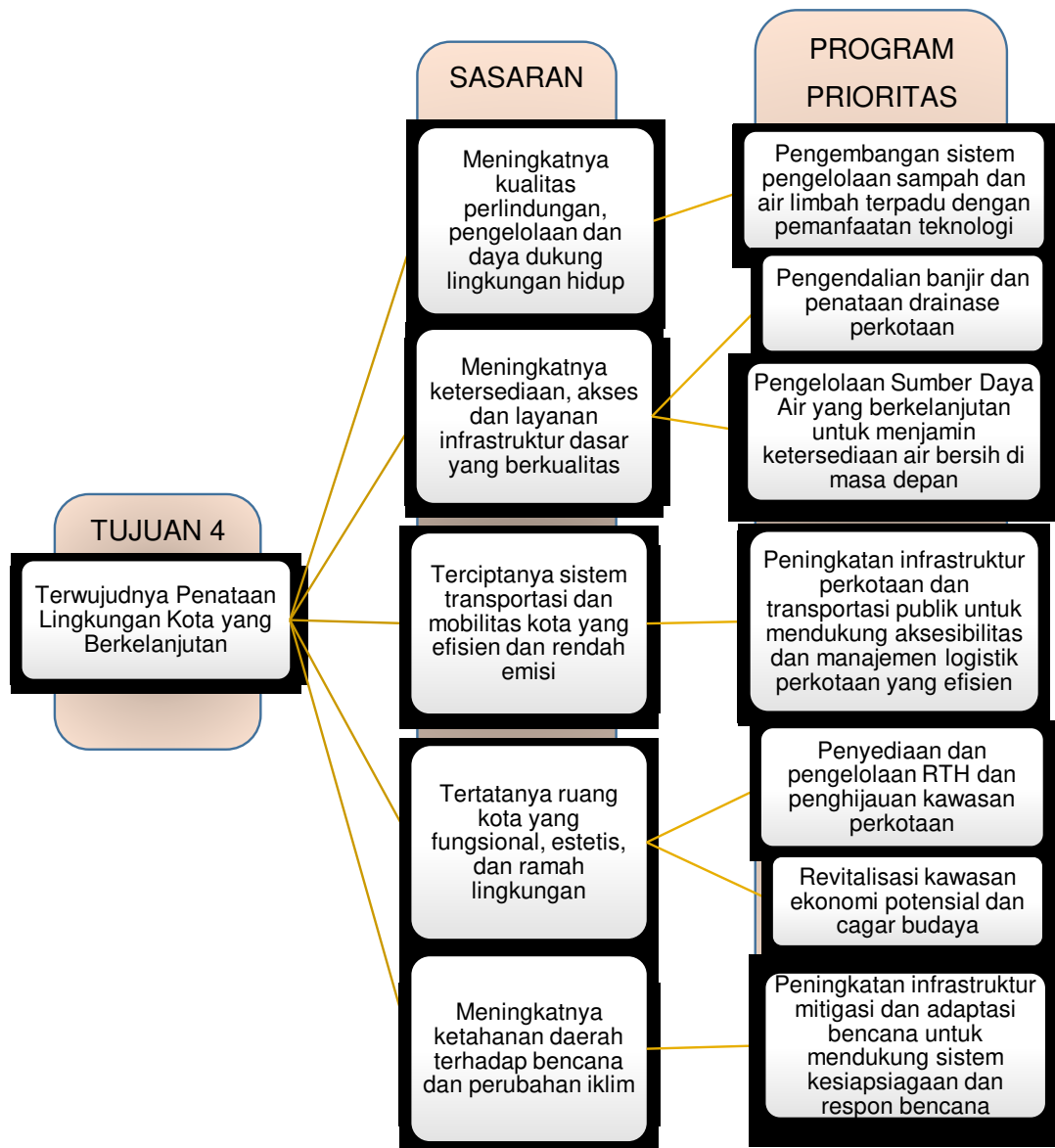
Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2025 – 2029.

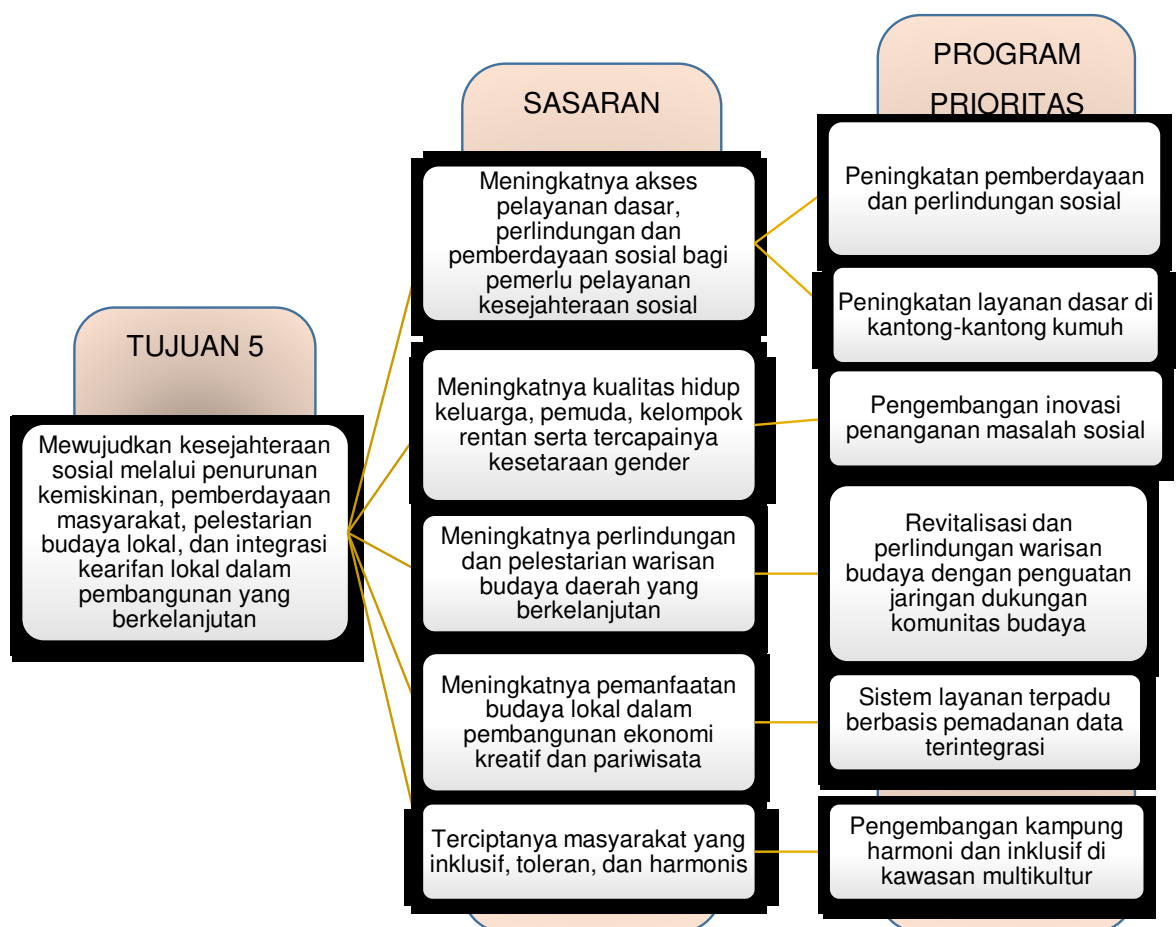
Tema Perencanaan Pembangunan Kota Cirebon untuk Tahun 2025 adalah : **Penguatan sarana prasarana public dan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan public dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat yang SETARA berkelanjutan.** Berdasarkan dari Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, maka diperlukan penyesuaian dengan Prioritas Pembangunan. Prioritas Pembangunan tersebut adalah :











Adapun Penyusunan Program dan Kegiatan untuk Prioritas Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN	TAHUN
					2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	P1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,17	13,18
			Angka Literasi/Numerasi	Skor	67	82
			Rata-rata lama sekolah	Persen	13,16	13,18
		Meningkatnya kualitas pelayanan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,48	75,48
			Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,381	0,385



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
		kesehatan secara merata	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Per 100.000 pddk	1.136/100.000 pddk	451
		Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif	Tingkat produktivitas tenaga kerja kota	Rupiah/tenaga kerja	47.920.181,23	49.360.000
		Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius	Tingkat Pengembangan SDM Berkarakter	Poin		
2	P2. Penguatan ekonomi kota berbasis sektor unggulan	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan jasa, transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	27,31	28,33
			Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan	Persen		14,47
			Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	Persen	5,72	5,82
			Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif	Persen		18,79
			Kontribusi PDRB sektor Jasa keuangan dan asuransi	Persen		
		Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	Persen	12,83	13,25
		Meningkatnya kinerja BUMD	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen		2,51
		Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	2,38	2,39
			Rasio Volume Usaha UMKM terhadap PDRB	Persen	0,28	0,3
			Pengeluaran perkapita anggota koperasi	Rupiah	14.011.999	14.200.000
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	93,71	94,71
		Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru	Indeks ekonomi hijau pilar ekonomi	indeks		



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
			Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	0,25	0,25
		Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Indeks	83,78	84,12
3	P3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas	Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	97,94	97,95
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3.074	3.100
			Nilai SAKIP Kota	Skor	69,04	69,25
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	N/A	66,75
		Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat	Indeks ketenteraman dan ketertiban umum	Poin		
		Meningkatnya kinerja dan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	77,75	79
		Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Skor	3,97	4,04
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86,59	86,64
		Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Indeks inovasi Daerah	Poin		53,24
4	P4. Penataan lingkungan perkotaan yang berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	59,2	59,29
		Tertatanya ruang kota yang	Indeks Layanan Infrastruktur Kota	Poin		



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
		fungsional, estetik, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	Proporsi ruang terbuka hijau	Persen		
			Indeks Smart City	Indeks	3,31	3,44
		Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi	Rasio konektivitas	Persen	N/A	0,18
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Indeks	112,32	125,06- 124,84
			Intensitas Emisi GRK Kumulatif	tonCO2eq	5587,79	8.381,49
5	P5. Terwujudnya kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan	Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan akses layanan dasar	Persen		
		Meningkatnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan.	Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Persen	65,59	69,63
		Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan serta tercapainya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Poin		
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	Na	61,54
			Indeks Ketimpangan Gender	Poin		405
			Indeks Pemberdayaan Gender/IDG	Poin		



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
			IPA (Indeks Perlindungan Anak)	Poin		69,36
		Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis.	Indeks Harmoni Indonesia	Skor	-	6,65

4.3 Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas nasional tahun 2025, yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, berfokus pada penguatan fondasi transformasi untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Terdapat 8 program prioritas yang meliputi penguatan ideologi Pancasila, pertahanan keamanan, dan kemandirian bangsa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Berikut adalah uraian lebih detail mengenai prioritas nasional tahun 2025:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM:

Program ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, meningkatkan kualitas demokrasi, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut CNBC Indonesia.

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa:

Fokus pada peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

Peningkatan kualitas pendidikan, sains, teknologi, dan kesehatan.

Penguatan karakter bangsa, kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

4. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan:

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan terjangkau, termasuk perumahan, serta pengembangan kota-kota inovatif dan mandiri.

Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM.

5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial:

Penanggulangan kemiskinan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial.



6. Pelestarian Lingkungan Hidup:

Pencegahan dan penanggulangan bencana serta perubahan iklim.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

7. Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum:

Peningkatan efisiensi dan transparansi birokrasi, Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil.

8. Penguatan Hubungan Internasional:

Peningkatan kerjasama dan diplomasi dengan negara lain.

Prioritas-prioritas ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategis dan program kerja masing-masing

Sasaran dan prioritas penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui Asta Cita , sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM): Menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, demokrasi yang kuat, dan perlindungan HAM.
2. Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional: Meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa.
3. Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan: Menciptakan lapangan kerja yang layak dan mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan di masyarakat.
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesenjangan Gender: Fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga, serta memastikan kesetaraan gender.
5. Meneruskan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
6. Mewujudkan Kemandirian Pangan, Energi, dan Ekonomi Hijau: Mencapai kemandirian dalam sektor pangan dan energi, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



7. Mempercepat Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi: Mendorong hilirisasi industri dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
8. Meningkatkan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dan Desa: Meningkatkan efektivitas desentralisasi dan otonomi daerah, serta penyaluran pembangunan nasional dan daerah.

Secara keseluruhan, visi dan misi ini bertujuan untuk membawa Indonesia menuju kemajuan dan kemakmuran, dengan fokus pada pembangunan manusia, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan yang berkelanjutan.

4.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025, difokuskan pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan perlintasan kereta api, juga menjadi fokus utama. Selain itu, peningkatan kapasitas UMKM, petani, dan nelayan, serta inovasi pelayanan publik juga menjadi prioritas. Secara rinci sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

- a. Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, dan Nelayan:
Membuka lapangan kerja seluas-luasnya dengan meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta petani dan nelayan, termasuk budidaya.
- b. Pembangunan Infrastruktur:
Fokus pada penyelesaian pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan provinsi dalam dua tahun ke depan.
- c. Inovasi Pelayanan Publik:
Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik, termasuk penataan daerah dan stabilitas politik, hukum, HAM, dan keamanan.

2. Pemerataan Pembangunan

- a. Mengurangi Kesenjangan: Mengurangi kesenjangan antar daerah, baik perkotaan maupun perdesaan, serta antara masyarakat miskin dan kaya.
- b. Pembangunan Daerah: Membangun daerah secara merata dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
- c. Konvergensi Antar Daerah: Memastikan pembangunan antar daerah terintegrasi dan saling mendukung.



3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Inovasi Pelayanan Publik:
Mendorong inovasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan mutu dan efisiensi.
- b. Transformasi Birokrasi:
Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi pada mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih.
- c. Peningkatan Kualitas Kesehatan:
Meningkatkan kapasitas rumah sakit di seluruh wilayah Jawa Barat agar setara dan mengurangi antrean panjang.
- d. Penyediaan Listrik:
Memastikan penyediaan listrik bagi seluruh masyarakat yang belum terlayani.

4. Isu Strategis Lainnya

- a. Perlintasan Kereta Api:
Prioritas pada penyelesaian perlintasan sebidang kereta api untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan.
- b. Infrastruktur Jalan:
Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan memastikan perbaikan jalan sesuai dengan fungsinya.
- c. Pendidikan:
Pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk meningkatkan fasilitas pendidikan.
- d. Elektrifikasi:
Program elektrifikasi untuk mendukung elektrifikasi 100%.

Prioritas-prioritas ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, yang bertujuan untuk menjembatani perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

4.5 Program Pembangunan Tahun 2025

Prioritas pembangunan tahun 2025 terdiri dari sasaran pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya, program pembangunan daerah dijabarkan kedalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Cirebon pada tahun 2025. Program Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 telah menggunakan Program dan Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi



dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari :

Tabel PAGU Anggran Perangkat Ddaerah Tahun 2025

NAMA URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN
Kode Urusan : 1	1,186,676,964,634
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,186,676,964,634
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7,897,752,117
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1,603,847,463
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,293,904,654
DINAS KESEHATAN	630,792,478,267
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1,248,096,739
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	451,191,341,545
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	502,410,960
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	177,605,483,523
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	245,145,500
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	71,651,027,681
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100,000,000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	11,188,968,816
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4,605,588,576
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6,303,843,002
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	355,829,033
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8,382,938,535
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	437,946,085
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	302,755,800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,422,448,429
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	22,249,842,934
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	300,866,471
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	15,317,906,578
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	6,118,339,562
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,199,567,016
DINAS PENDIDIKAN	393,092,387,432
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1,631,583,922
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	93,764,846,424
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	756,585,025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	296,939,372,061
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	38,930,440,831
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6,105,619,650
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	349,848,150
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	19,339,317,157



NAMA URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,942,637,874
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1,193,018,000
DINAS SOSIAL	11,442,558,819
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	354,749,352
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	302,695,874
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	87,999,604
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,039,805,276
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	988,575,556
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	668,733,157
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17,552,412,909
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,499,384,873
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,053,028,036
2	223,006,832,754
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	223,006,832,754
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	11,284,817,785
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	904,466,385
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	165,769,300
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,947,244,566
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,267,337,534
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8,889,996,356
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	77,327,302
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	183,534,961
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	380,677,250
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,248,456,843
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	15,692,107,326
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	143,818,323
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	128,800,116
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1,307,397,697
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,112,091,190
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	22,066,000,774
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2,874,977,084
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4,570,707,002
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,034,083,123
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1,270,794,052
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	315,439,513
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	14,873,621,759
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	29,399,187
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	379,910,489



NAMA URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	276,097,337
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	34,728,030
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	80,383,602
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	638,115,702
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	15,744,630
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,419,242,782
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	47,003,821,903
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	84,358,812
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	84,917,822
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	188,220,489
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	19,517,284,098
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	89,848,637
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	373,340,859
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	158,160,194
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	162,575,956
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26,148,488,744
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	196,626,292
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	129,999,800
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	129,999,800
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14,777,855,905
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,010,303,813
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1,610,440,550
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	160,720,926
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	39,923,487
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8,632,100
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	234,308,730
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	281,138,653
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,106,715,587
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	165,312,184
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	160,359,875
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	19,053,146,972
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	9,503,396,654
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	996,983,806
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	453,015,610
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,099,750,902



NAMA URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9,125,273,707
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	289,776,309
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	216,217,431
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	237,038,155
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	190,641,088
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,020,780,772
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	170,819,952
DINAS PERHUBUNGAN	34,286,468,665
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26,035,146,699
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8,251,321,966
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12,145,908,373
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	259,204,197
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1,982,219,755
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	343,765,264
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,469,329,037
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	91,390,120
DINAS TENAGA KERJA	12,395,546,684
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	397,628,342
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4,356,855,341
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	468,669,564
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,149,225,582
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	23,167,855
SEKRETARIAT DAERAH	1,282,266,745
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	328,624,156
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	953,642,589
3	8,821,201,778
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8,821,201,778
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,601,891,737
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	925,267,295
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	120,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	393,019,695
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,163,604,747
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	4,160,973,724
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,179,637,973
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	184,503,950
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	14,696,721
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	495,507,432
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	211,992,041



NAMA URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	198,523,589
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,755,695,631
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	120,416,387
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2,058,336,317
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	34,308,180
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	154,032,695
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	19,682,067
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	333,327,490
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	9,274,408
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,009,033,724
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	9,752,204
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	186,380,163
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	302,545,386
4	148,234,384,435
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	148,234,384,435
SEKRETARIAT DAERAH	66,752,178,232
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5,097,585,432
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60,230,160,949
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,424,431,851
SEKRETARIAT DPRD	81,482,206,203
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10,997,389,057
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70,484,817,146
5	93,662,721,987
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	93,662,721,987
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16,236,349,137
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3,022,740,305
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3,859,373,388
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,354,235,444
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	63,403,059,257
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,862,898,980
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12,793,258,379
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3,514,358,755
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45,232,543,143
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14,023,313,593
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	614,364,610
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	623,115,601
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,469,740,067
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	316,093,315
6	15,019,072,125
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	15,019,072,125



NAMA URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN
INSPEKTORAT DAERAH	15,019,072,125
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,260,708,505
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	337,863,140
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	420,500,480
7	78,679,904,016
UNSUR KEWILAYAHAN	78,679,904,016
KECAMATAN HARJAMUKTI	18,960,031,915
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	59,117,600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6,692,993,073
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,146,393,882
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30,763,680
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30,763,680
KECAMATAN KEJAKSAN	13,429,746,879
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34,936,491
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,618,454,297
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,557,516,968
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	207,446,575
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11,392,548
KECAMATAN KESAMBI	17,717,256,596
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34,364,278
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6,226,796,550
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,412,515,424
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20,230,344
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23,350,000
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	15,361,892,832
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24,795,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4,866,966,110
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,272,586,928
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	170,782,794
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	26,762,000
KECAMATAN PEKALIPAN	13,210,975,794
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23,818,600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,255,406,482
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,767,272,393
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	132,973,175
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31,505,144
8	14,982,676,408
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	14,982,676,408
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14,982,676,408
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	894,841,910
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	332,203,836



NAMA URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,311,923,145
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2,378,588,072
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,995,500,518
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,069,618,927
JUMLKAH ANGGARAN	1,769,083,758,137



PROGRAM DAN TARGET PROGRAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Non Urusan			
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi keuangan	100,00 Persen	Seluruh Perangkat Daerah
		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100,00 Persen	
		Cakupan layanan administrasi kepegawaian	100,00 Persen	
		Persentase LKIP Perangkat Daerah yang sesuai dengan Sistematika Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	100,00 Persen	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			Dinas Pendidikan
	Program Pengelolaan Pendidikan	a. A P K PAUD	57,43 Persen	
		b. A P M SD/MI	98,10 Persen	
		c. A P M SMP/MTs	84,00 Persen	
		d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	85,00 Persen	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru satuan pendidikan dasar, PAUD, PNF yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	47,25 Persen	
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan			
2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan SPM Bidang Kesehatan	100,00 Poin	



NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar	87,50 Persen	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	a. Cakupan Sarana Kefarmasian yang memenuhi standar	85,00 Persen	
		b. Cakupan Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi standar	80,00 Persen	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Persentase Strata Mandiri RW Siaga Aktif	15,00 Persen	
		b. Cakupan PHBS yang dipantau	83,00 Persen	
2.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase sungai dalam kondisi baik	75,00 Persen	Dinas PUTR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pemenuhan kebutuhan air bersih perpipaan non PDAM	93,00 Persen	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga berakses sanitasi baik	86,16 Persen	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio gedung pemerintah kondisi baik	90,00 Persen	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase ketersediaan BAPERKAM dan sarana prasarana lingkungan RW	1,40 Persen	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	94,00 Persen	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan pelaku jasa konstruksi yang memiliki sertifikat aktif	100,00 Persen	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan dalam pemanfaatan ruang	36,50 Persen	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah titik genangan air yang tertangani	5 Titik	



NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase penyediaan infrastruktur permukiman	100,00 Persen	
2.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			DPRKP
	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	90,16 Persen	
	Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan	10,65 Persen	
	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	16,67 Persen	
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rasio tenaga ahli yang tersertifikasi	2,00 Persen	
2.5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Cakupan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu pada TPS	0,00 Persen	Satuan Polisi Pamong Praja
		b. Cakupan Rasio LINMAS per RT	100,00 Persen	
		c. Penyelesaian jumlah kasus pelanggaran K3	100,00 Persen	
	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah personil penanggulangan bencana yang bersertifikat	70 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	85,00 Persen	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2.6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			



NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Program Pemberdayaan Sosial	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	100,00 Persen	Dinas Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Data base keluarga miskin dan data base Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	
	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan PSKS yang melaksanakan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	67,00 Persen	
	Program Penanganan Bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100,00 Persen	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Standarisasi pembangunan, pemugaran, pemeliharaan, dan pengelolaan TMPN dan MPN	1 Lokasi	
3	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
3.1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			DINAS TENAGA KERJA
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	25,00 Persen	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	30,00 Persen	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30,00 Persen	
	Program Hubungan Industrial	a. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	1,00 Persen	
		b. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	63,00 Persen	
3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan PUG	40,00 Persen	
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan layanan perlindungan perempuan	100,00 Persen	



NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan keluarga yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan ekonomi	100,00 Persen	
	Program Pengelolaan Sistem Gender dan Anak	Cakupan Perangkat Daerah yang memiliki data terpilah gender dan anak	12,00 Persen	
	Program Pemenuhan Hak Anak	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Madya Tingkat	
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Penanganan anak korban kekerasan	100,00 Persen	
3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	a. Ketersediaan informasi data distribusi, pasokan dan harga serta pangan lainnya	90,00 Persen	
		b. Penguatan cadangan pangan daerah	25,00 Persen	
		c. Peningkatan konsumsi sayur dan buah	185 Gr/Kapita/ Hari	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	75,00 Persen	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	89,00 Persen	
3.4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah milik pemerintah yang sudah bersertifikat terhadap bidang tanah yang menjadi milik pemerintah	50,00 Persen	
	Program Pengelolaan Ijin Lokasi	Persentase ijin lokasi yang diterbitkan terhadap permohonan ijin lokasi	85,00 Persen	
3.5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	a. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota;	Ada Ada/Tidak Ada	
		b. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	Ada Ada/Tidak Ada	



NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	a. Indeks kualitas air, kualitas tutupan lahan, dan kualitas udara	50,10;37,80;73,20 Poin	
		b. Persentase Inventarisasi GRK	100,00 Persen	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100,00 Persen	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ijin pengelolaan limbah B3 oleh swasta yang diterbitkan	100,00 Persen	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan.a.tau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota.	65,00 Persen	
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Penetapan Hak MHA	1 Kali	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	1 Kali	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada Ada/Tidak Ada	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten /Kota .	100,00 Persen	



NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Program Pengelolaan Persampahan	a. Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani	73,00 Persen	
		b. Persentase cakupan jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	26,00 Persen	
3.6	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan Swasembada	22,00 Persen	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ LPM	3 Kelompok	
		Persentase LPM Berprestasi	13,60 Persen	
		Persentase Posyandu aktif	87,00 Persen	
		Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	20,00 Persen	
		Persentase PKK aktif	100,00 Persen	
3.7	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	10 Sektor	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Current User / Pasangan Usia Subur	62,54 Persen	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	70,00 Persen	
				DINAS PERHUBUNGAN



NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Persentase rambu lalu lintas yang terpasang	10,00 Persen	
		b. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	80,00 Persen	
		c. Persentase pelayanan parkir kendaraan	93,00 Persen	
		d. Persentase uji berkala kendaraan bermotor	78,00 Persen	
		e. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100,00 Persen	
		f. Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	100,00 Persen	
		g. Persentase layanan angkutan darat	1,53 Persen	
3.8	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah layanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien	400 Informasi	
	Program Aplikasi Informatika	a. Persentase layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan	75,00 Persen	
		b. Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100,00 Persen	
3.9	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Koperasi Usaha Simpan Pinjam	19,70 Persen	
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	100,00 Persen	
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif menjadi Sehat	63,42 Persen	
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	64,09 Persen	
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina	64,70 Persen	



NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	95,91 Persen	
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Jumlah UMK yang Berkembang	35,87 Persen	
3.10	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	80 Investor	
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.9 Milyar Rupiah	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai persepsi waktu penyelesaian perijinan	3,10 Poin	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio daya serap tenaga kerja	16,00 Persen	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan nilai realisasi PMDN	75,00 Persen	
3.11	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga			Dinas Pemuda Dan Olah Raga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Organisasi Pemuda Terhadap Penduduk Usia Pemuda	1.083 Rasio	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	a. Sarana dan Prasarana Olahraga yang sesuai standar	40,00 Persen	
		b. Cakupan pembinaan atlet muda	40,00 Persen	



NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		c. Jumlah prestasi cabang olahraga	10 Cabor Cabor	
		d. Cakupan pembinaan olah raga	100,00 Persen	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Mencetak Pramuka Garuda	40,00 Persen	
3.12	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			Dinas Komunikasi, Informasi Dan Statistik
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sebagai bahan perencanaan dan evaluasi (Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral di Renja dan Evaluasi Renja dibagi total Perangkat Daerah dikali 100%)	75,00 Persen	
3.13	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase layanan persandian dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan publik (Jumlah layanan yang diselenggarakan dibagi jumlah layanan keamanan informasi dikali 100%)	70,00 Persen	
3.14	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah karya Budaya yang di Revitalisasi dan di Inventarisasi	1 Karya Budaya	
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	16 Kali	
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	10 Cagar Budaya	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	5,00 Persen	
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Prosentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	38,46 Persen	



NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3.15	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang dikelola sesuai standar nasional	80,00 Persen	
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Dokumen arsip yang terselamatkan	90,00 Persen	
4	Urusan Pemerintahan Pilihan			
4.1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	4 Ton	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budi Daya	265 Ton	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	7.8 Ton	
4.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kunjungan Wisata	75,00 Persen	
	Program Pemasaran Pariwisata	Lama Kunjungan Wisata	1 Hari	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PAD sektor pariwisata	14,00 Persen	
4.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas pertanian (komoditas daging dan tanaman pangan)	3,00-5,00 Persen	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dipelihara	50,00 Persen	



NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan	30,00 Persen dari populasi	
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan nilai kualitas kelembagaan penyuluhan	10,00 Persen	
4.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan Pelayanan Perizinan Klaster Perdagangan	100,00 Persen	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengelola Pasar yang sesuai Standar	10,00 Persen	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tersedianya kebutuhan pokok dan stok barang	77,00 Persen	
	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor dan Berkembangnya Produk Ekspor	66,00 Persen	
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Pelayanan Wajib Metrologi Legal	86,00 Persen	
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan pemahaman masyarakat terhadap produk dalam negeri	40,00 Persen	
4.5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan menengah	222 IKM	
	Program Pengendalian dan Izin Usaha Industri	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian izin usaha industri	5 Izin Usaha	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan IKM yang berizin yang mendaftarkan SIINas	100,00 Persen	
5	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
5.1	Sekretariat Daerah			Sekretariat Daerah



NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penetapan dan pengundangan Perda dan Perwal dari rancangan Perda dan rancangan Perwali	52,00 Persen	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan	75,00 Persen	
5.2	Sekretariat DPRD			Sekretariat Dprd
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terfasilitasinya program-program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran	100,00 Persen	
6	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
6.1	Perencanaan			Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100,00 Persen	
		b. Rasio realisasi program dan kegiatan terhadap rencana program dan kegiatan dalam RKPD	98,65 Persen	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	98,00 Persen	
6.2	Keuangan			Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu dalam penetapan APBD	Tepat Waktu Tepat waktu/ Tidak tepat waktu	



NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap perencanaan Barang Milik Daerah	100,00 Persen	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5,00 Persen	
6.3	Kepegawaian			Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Kepegawaian Daerah	a. Jumlah SK Purna Tugas PNS	287 SK	
		b. Jumlah Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II), Administrator (Eselon III), dan Pengawas (Eselon IV) yang kosong pada Perangkat Daerah	50 Orang	
		c. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Yang kosong pada Perangkat Daerah	290 Orang	
		d. Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,33 Persen	
6.4	Pendidikan dan Pelatihan			Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2,00 Persen	
		b. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	16,00 Persen	
6.5	Penelitian dan Pengembangan			
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan	100,00 Persen	
7	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
7.1	Inspektorat Daerah			Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan	80,00 Persen	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Laporan perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	4 Laporan	
8	Unsur Kewilayahan			Kecamatan



NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
8.1	Kecamatan			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	100,00 Persen	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	80,00 Persen	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100,00 Persen	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kasus konflik SARA	0 Kasus	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	100,00 Persen	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	25,00 Persen	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100,00 Persen	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kasus konflik SARA	0 Kasus	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	100,00 Persen	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	50,00 Persen	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100,00 Persen	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kasus konflik SARA	0 Kasus	



NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	100,00 Persen	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	25,00 Persen	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100,00 Persen	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kasus konflik SARA	0 Kasus	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rasio pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan	100,00 Persen	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan status kualifikasi kelurahan	25,00 Persen	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100,00 Persen	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kasus konflik SARA	0 Kasus	
8	Unsur Pemerintahan Umum			
8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik			Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat pemahaman Ideologi Wawasan Kebangsaan Masyarakat	65,00 Persen	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat pemahaman politik di masyarakat	70,00 Persen	



NO.	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tingkat pengetahuan dan pemahaman Ormas, LSM dan OKP tentang 4 (empat) pilar.	70,00 Persen	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	70,00 Persen	
		Tingkat keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan	100,00 Persen	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan pencegahan/ tangkal dini konflik	80,00 Persen	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 yang dituangkan dalam bab ini diwujudkan dalam serangkaian pergeseran dan perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Pergeseran dan perubahan tersebut menjadi bagian dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2025 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

Adapun penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam perubahan RKPD terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Isu-isu strategis terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan terbaru;
- c. Upaya menjamin pencapaian target indikator program;
- d. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Semester I tahun 2025

5.1. Rencana Penyesuaian Program dan Kegiatan Tahun 2025 dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

Penyesuaian-penyesuaian yang telah dijelaskan sebelumnya yang menjadi bagian dari Perubahan RKPD Tahun 2025, diwujudkan dalam perubahan kebijakan belanja dan pembiayaan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 dengan Arah

Kebijakan dan Prioritas pembangunan Walikota dan Wakil walikota Periode 2025-2030;

- b. Penyesuaian kerangka pendanaan akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan dan penganggaran yang sudah berjalan berdasarkan evaluasi Tahun 2025 sampai dengan triwulan I;
- c. Pemenuhan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Pemenuhan kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka pemenuhan prioritas daerah ;
- e. Penggunaan Dana SILPA Tahun 2025.

5.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan rekapitulasi dari hasil Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disusun menggunakan matrik program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah berdasarkan keluaran dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Perubahan RKPD.

Penjelasan lebih rinci. terkait program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kota Cirebon pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel Rumusan Rencana Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah di bawah ini.

Tabel V.1 Rekapitulasi Usulan Perubahan Belanja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA CIREBON
TAHUN 2025

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	427.590.636,00	462.042.936,00	353.311.160,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			406.304.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	00	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	127.104.892,00	380.983.245,00	330.606.030,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			292.709.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen laporan keuangan perangkat daerah	-			1 Jenis	1 Jenis	260.222.924.148,00	292.474.059.392,00	292.474.059.392,00			-	-	-		307.249.094.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	00	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2245 Orang/bulan	2387 Orang/bulan	260.003.059.332,00	292.170.962.136,00	291.373.095.236,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamtil Guru RMSD.	-	-			307.030.145.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	00	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	198.310.816,00	199.322.731,00	79.071.215,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			202.718.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	00	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	21.554.000,00	103.774.525,00	79.462.625,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.231.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen administrasi barang milik daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	49.940.000,00	49.908.000,00	49.908.000,00			-	-	-		58.992.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	00	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	49.940.000,00	49.908.000,00	49.908.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			58.992.000,00	DINAS PENDIDIKAN

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	590.282.000,00	604.388.000,00	604.388.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			934.231.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	00	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	620.886.200,00	720.535.920,00	720.535.920,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			687.158.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	-			5 Jenis	5 Jenis	571.000.800,00	861.100.585,00	861.100.585,00			-	-	-		1.309.507.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	00	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	41.712.500,00	48.864.000,00	48.864.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.530.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	00	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				75 Unit	75 Unit	244.131.900,00	252.652.000,00	264.036.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			504.217.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	00	05	Pemeliharaan Mebel																
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.196.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	00	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				188 Unit	140 Unit	162.296.000,00	162.332.000,00	142.177.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			199.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	00	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	2 Unit	47.799.800,00	312.065.600,00	359.047.200,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			306.373.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.0	00	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.060.600,00	85.186.985,00	85.186.985,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			187.491.000,00	DINAS PENDIDIKAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
							Sebelum	Sesudah						Nasional		Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN			
1	01	02	00	2.0	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				25392 Peserta Didik	25392 Peserta Didik	10.120.411.804,00	9.698.570.050,00	8.925.641.100,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.0	Pengadaan Alat Praktikk dan Peraga Peserta Didik																00	
				Jumlah Alat Praktikk dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	0 Paket	3.809.840.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	-			4.957.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	0 Ruang	186.111.400,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	-			1.543.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
1	01	02	2.0	00	67	Pengadaan Alat Praktikk dan Peraga Peserta Didik																				
							Jumlah Alat Praktikk dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	0 Paket	3.815.505.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	-			4.558.257.000,00	DINAS PENDIDIKAN			

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							38,68 Persen	38,68 Persen	8.447.332.492,00	7.689.647.637,00	7.689.647.637,00			-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Satuan Pendidikan		13.379.049.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0.00.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD															
								0 Unit	0 Unit	0,00	0,00		0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran		992.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.0.00.02	Pengadaan Mebel PAUD															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				215 Satuan Pendidikan	215 Satuan Pendidikan	441.526.636,00	577.582.756,00	567.832.756,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	-		579.209.000,00	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	2.0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																00	
			3	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	-		330.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah			12	13			Nasional	Daerah							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
								4 Dokumen	4 Dokumen	71.444.669,00	150.000.006,00	105.687.006,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN			
1	01	03	2.0	00	07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																	
								2 Dokumen	2 Dokumen	46.254.496,00	109.999.774,00	109.999.774,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							1 Dokumen	14 Dokumen	28.029.575,00	28.083.045,00	28.083.045,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			29.431.053,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.001.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
							1 Dokumen	1 Dokumen	55.185.502,00	55.185.132,00	55.185.132,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			57.944.777,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.001.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
							1 Dokumen	1 Dokumen	10.587.059,00	10.586.889,00	9.665.649,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			11.116.411,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.001.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
							1 Dokumen	1 Dokumen	6.746.059,00	6.745.152,00	6.745.152,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			7.083.361,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.001.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD																			
							1 Dokumen	2 Dokumen	7.420.666,00	10.421.858,00	10.421.858,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			7.791.699,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.001.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
							1 Laporan	6 Laporan	39.117.421,00	39.195.850,00	50.733.350,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			41.073.292,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.001.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							1 Laporan	20 Laporan	112.901.021,00	161.878.847,00	102.287.680,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			118.546.072,00	DINAS KESEHATAN				

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional				Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							1 Dokumen	1 Dokumen	31.500.000,00	25.291.000,00	25.291.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis	-		33.075.000,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.0	5			1 Dokumen	1 Dokumen	393.610.340,00	170.414.175,00	170.414.175,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis	-		413.290.855,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.0	00	5	02	Pengadaan Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							1 Paket	1 Paket	377.128.075,00	93.792.000,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis	-		395.984.478,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.0	00	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
							120 Orang	120 Orang	16.482.265,00	76.622.175,00	65.985.900,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis	-		17.306.377,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.0	6			1 Dokumen	1 Dokumen	747.740.965,00	671.111.897,00	671.111.897,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis	-		785.128.010,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.0	00	6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							1 Paket	1 Paket	116.323.340,00	98.761.792,00	98.761.792,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis	-		122.139.506,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.0	00	6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							12 Paket	8 Paket	141.211.924,00	58.895.270,00	58.895.270,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis	-		148.272.520,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.0	00	6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							5 Dokumen	7 Dokumen	19.180.823,00	12.960.000,00	104.757.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis	-		20.139.863,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	01	2.0	00	6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu																

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	985.659.426,00	910.495.924,00	870.490.912,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			1.034.942.397,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	678.150.915,00	567.427.567,00	567.427.567,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		712.058.458,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	1 Unit	30.027.550,00	47.130.000,00	47.130.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			31.528.927,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	6 Unit	326.245.106,00	214.267.000,00	214.267.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			342.557.361,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2 Unit	236.787.087,00	220.939.886,00	220.939.886,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			248.626.441,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				115 Unit	115 Unit	85.091.172,00	85.090.681,00	85.090.681,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			89.345.729,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.1	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen Peningkatan Pelayanan BLUD	-			1 Dokumen	1 Dokumen	15.750.000,00	0,00	0,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		16.537.500,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.1	00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				24 Unit Kerja	24 Unit Kerja	15.750.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			16.537.500,00	DINAS KESEHATAN	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	1 Dokumen	3.889.307.980,00	3.841.239.361,00	8.554.926.165,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			4.083.773.378,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.002.16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	54.702.218,00	34.932.850,00	125.547.850,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			57.437.328,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.002.17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	510.338.322,00	300.868.186,00	2.060.106.936,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			535.855.237,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.002.18		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	306.849.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.002.19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	38.248.481,00	32.239.950,00	27.439.950,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			40.160.905,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 02 02 2.0 00 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	396.693.557,00	215.418.904,00	394.660.425,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			416.528.235,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 00 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	22 Orang	69.372.559,00	131.694.980,00	96.235.006,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			72.841.187,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 00 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.798.724,00	61.609.046,00	61.619.321,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			63.838.660,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 00 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				9 Dokumen	9 Dokumen	6.098.882.277,00	1.823.053.669,00	5.406.184.368,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			6.403.826.390,00	DINAS KESEHATAN
	1 02 02 2.0 00 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	30.190.838.902,00	27.305.220.300,00	38.036.852.450,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			32.644.433.388,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	1	02	02	2.0002.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			2 Dokumen	1 Dokumen	929.522.243,00	431.172.375,00	303.836.675,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		975.998.355,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	2.0002.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	43.305.045,00	23.129.275,00	5.720.875,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		45.470.297,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	2.0002.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	1 Dokumen		0,00	0,00	71.500.000,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	2.0002.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				23 Unit	23 Unit	707.199.505,00	48.480.000,00	48.400.000,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		742.559.480,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	2.0002.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	21.530.749,00	22.322.840,00	42.830.000,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		22.607.286,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	2.0002.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedian, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	202.396.950,00	108.580.625,00	108.423.825,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		212.516.798,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
				41		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-	171 Orang	0,00	0,00	22.000.000,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																
				42		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		-	996 Orang	0,00	0,00	30.960.000,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
				44		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-	1 Dokumen	0,00	0,00	183.400.000,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
				46		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-	1 Dokumen	0,00	0,00	241.800.000,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Layanan Imunisasi																
				48		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		-	1 Dokumen	0,00	0,00	511.600.000,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		0,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.0	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi kesehatan yang di kelola	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100.487.119,00	100.369.999,00	100.369.999,00		-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		105.511.474,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.0	00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
				02		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	100.487.119,00	100.369.999,00	100.369.999,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		105.511.474,00	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	02	02	2.04				33 Faskes	33 Faskes	512.618.295,00	352.342.536,00	352.342.536,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		538.249.209,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.04	00	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
								11 Unit	263 Unit	20.006.700,00	117.447.352,00	192.951.497,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			21.007.035,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04	00	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan															
								22 Unit	263 Unit	256.135.950,00	117.447.344,00	50.997.144,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			268.942.747,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04	00	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan															
							1 Dokumen	1 Dokumen	236.475.645,00	117.447.840,00	45.743.375,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			248.299.427,00	DINAS KESEHATAN	
7	1	02	03				90,00 Persen	77,5 Persen	2.774.953.098,00	399.487.960,00	502.410.960,00							2.913.700.751,00		
1	02	03	2.02				1 Dokumen	1 Dokumen	403.809.410,00	121.337.960,00	121.337.960,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		423.999.879,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2.00	00	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan															
							1 Dokumen	1 Dokumen	222.641.849,00	77.535.330,00	22.015.330,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			233.773.941,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2.00	00	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar															
							220 Orang	220 Orang	181.167.561,00	43.802.630,00	17.012.630,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			190.225.938,00	DINAS KESEHATAN	

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	86.625.119,00	86.624.750,00	83.241.525,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			90.956.374,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki PIRT dan Memenuhi Standar	-		85 Persen	85 Persen	63.000.000,00	62.999.850,00	62.999.850,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		66.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	04.2.003.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	63.000.000,00	62.999.850,00	62.872.050,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			66.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi	-		1 Dokumen	1 Dokumen	84.525.120,00	0,00	0,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		88.751.376,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	04.2.004.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	84.525.120,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			88.751.376,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Industri Rumah tangga Pangan memenuhi kesesuaian standar post market	-			48 Unit	48 Unit	99.032.155,00	99.031.950,00	99.031.950,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		103.983.763,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																	
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				48 Unit	48 Unit	99.032.155,00	99.031.950,00	99.031.925,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			103.983.763,00	DINAS KESEHATAN
9	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Kampung Siaga Aktif				20,00 Persen	20,00 Persen	1.129.879.371,00	824.222.015,00	1.248.096.739,00							1.186.373.339,00	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Dokumen UKBM yang dibina dalam mendukung GERMAS	-			70 Persen	70 Persen	837.523.370,00	634.850.500,00	634.850.500,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		879.399.538,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.01	00	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	837.523.370,00	634.850.500,00	634.850.500,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			879.399.538,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rumah Tangga Ber PHBS dalam mendukung GERMAS	-			1 Dokumen	1 Dokumen	229.356.001,00	144.979.614,00	144.979.614,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		240.823.801,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.02	00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	229.356.001,00	144.979.614,00	144.979.538,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			240.823.801,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		100 Orang	100 Orang	1.701.696.570,00	109.000.000,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			1.786.781.398,00	DINAS KESEHATAN				
					UPT Puskesmas Kejaksan				585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00					
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00					
12	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Capaian Penilaian Kinerja (PKP) Cakupan Kinerja Layanan P2P		0,37 100 70 Persen Persen	0,37 70 100 Persen Persen	411.760.484.907,00	438.148.487.097,00	451.191.341.545,00						426.731.799.873,00					
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat	-	100 Persen	100 Persen	391.078.588.902,00	371.973.198.775,00	371.973.198.775,00		-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		10 Dokumen	10 Dokumen	1.976.995.391,00	2.330.812.399,00	1.685.814.399,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			2.075.845.160,00	DINAS KESEHATAN				
					UPT Puskesmas Pamitran				585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00					
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00					
13	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Penilaian Kinerja (PKP) Cakupan Kinerja Layanan P2P Indeks Keluarga Sehat		0,37 100 70 Persen Persen	70 100 0,37 Persen Persen	411.760.484.907,00	438.148.487.097,00	451.191.341.545,00						426.731.799.873,00					
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat	-	100 Persen	100 Persen	391.078.588.902,00	371.973.198.775,00	371.973.198.775,00		-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		10 Dokumen	10 Dokumen	1.311.287.677,00	1.615.373.652,00	1.024.021.652,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			1.376.852.061,00	DINAS KESEHATAN				
					UPT Puskesmas Jl. Kembang				585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00					

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00						608.702.126.942,00		
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00						608.702.126.942,00		
14	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kinerja Layanan P2P Indeks Keluarga Sehat Capaian Penilaian Kinerja (PKP)			70 100 0,37 Persen Persen	100 0,37 70 Persen Persen		411.760.484.907,00	438.148.487.097,00	451.191.341.545,00						426.731.799.873,00		
1	02	02	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat	-		100 Persen	100 Persen		391.078.588.902,00	371.973.198.775,00	371.973.198.775,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-	409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			10 Dokumen	10 Dokumen		1.447.500.777,00	1.800.632.599,00	1.165.085.599,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		1.519.875.816,00	DINAS KESEHATAN	
				UPT Puskesmas Nelayan							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00						608.702.126.942,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00						608.702.126.942,00		
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00						608.702.126.942,00		
15	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Cakupan Kinerja Layanan P2P Capaian Penilaian Kinerja (PKP)			0,37 100 70 Persen Persen	0,37 100 70 Persen Persen		411.760.484.907,00	438.148.487.097,00	451.191.341.545,00						426.731.799.873,00		
1	02	02	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat	-		100 Persen	100 Persen		391.078.588.902,00	371.973.198.775,00	371.973.198.775,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-	409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			10 Dokumen	10 Dokumen		1.148.109.849,00	1.372.979.037,00	776.657.037,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		1.205.515.341,00	DINAS KESEHATAN	
				UPT Puskesmas Kesambi							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00						608.702.126.942,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00						608.702.126.942,00		
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00						608.702.126.942,00		

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
16	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Penilaian Kinerja (PKP) Cakupan Kinerja Layanan P2P Indeks Keluarga Sehat			100 70 0,37 Persen Persen	70 100 0,37 Persen Persen	411.760.484.90 7,00	438.148.487.097 ,00	451.191.341.545,00					426.731.799.873,00				
	1	02	02	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat	-		100 Persen	100 Persen	391.078.588.90 2,00	371.973.198.775 ,00	371.973.198.775,00		-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-	409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.00 2 33	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1.466.370.614,00	1.732.248.467,00	1.125.049.966,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		1.539.689.145,00	DINAS KESEHATAN		
					UPT Puskesmas Gunungsari						585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,00						608.702.126.942,00			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,00						608.702.126.942,00			
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,00						608.702.126.942,00			
17	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Penilaian Kinerja (PKP) Indeks Keluarga Sehat Cakupan Kinerja Layanan P2P			70 100 0,37 Persen Persen	70 100 0,37 Persen Persen	411.760.484.90 7,00	438.148.487.097 ,00	451.191.341.545,00					426.731.799.873,00				
	1	02	02	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat	-		100 Persen	100 Persen	391.078.588.90 2,00	371.973.198.775 ,00	371.973.198.775,00		-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-	409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.00 2 33	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1.810.863.638,00	2.129.251.000,00	1.403.483.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		1.901.406.820,00	DINAS KESEHATAN		
					UPT Puskesmas Sunyaragi						585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,00						608.702.126.942,00			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,00						608.702.126.942,00			
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,00						608.702.126.942,00			
18	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kinerja Layanan P2P Indeks Keluarga Sehat Capaian Penilaian Kinerja (PKP)			100 0,37 70 Persen Persen	100 0,37 70 Persen Persen	411.760.484.90 7,00	438.148.487.097 ,00	451.191.341.545,00					426.731.799.873,00				

No	1	2	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional				Daerah				
1	1	02	02	2.0	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP pada masyarakat	-			100 Persen	100 Persen	391.078.588.902,00	371.973.198.775,00	371.973.198.775,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis	-		409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.00	00	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1.500.645.260,00	1.774.706.000,00	1.109.033.500,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis			1.575.677.523,00	DINAS KESEHATAN		
					UPT Puskesmas Majasem							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00			
19	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Cakupan Kinerja Layanan P2P Capaian Penilaian Kinerja (PKP)				100 70 0,37 Persen Persen	0,37 100 70 Persen Persen	411.760.484.907,00	438.148.487.097,00	451.191.341.545,00							426.731.799.873,00			
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP pada masyarakat	-			100 Persen	100 Persen	391.078.588.902,00	371.973.198.775,00	371.973.198.775,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis	-		409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.00	00	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1.959.781.634,00	2.468.597.914,00	1.768.147.914,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis			2.057.770.716,00	DINAS KESEHATAN		
					UPT Puskesmas Drajat							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00			
20	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kinerja Layanan P2P Indeks Keluarga Sehat Capaian Penilaian Kinerja (PKP)				100 0,37 70 Persen Persen	100 0,37 70 Persen Persen	411.760.484.907,00	438.148.487.097,00	451.191.341.545,00							426.731.799.873,00			
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP pada masyarakat	-			100 Persen	100 Persen	391.078.588.902,00	371.973.198.775,00	371.973.198.775,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis	-		409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.00	00	Operasional Pelayanan Puskesmas																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah		17		18
1					3	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										10 Dokumen	10 Dokumen	1.410.721.476,00	1.771.877.620,00	1.103.291.620,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			1.481.257.550,00	DINAS KESEHATAN
					UPT Puskesmas Jagasatru						585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00		
21	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Penilaian Kinerja (PKP) Indeks Keluarga Sehat Cakupan Kinerja Layanan P2P				70 0,37 100 Persen Persen	70 0,37 100 Persen Persen	411.760.484.907,00	438.148.487.097,00	451.191.341.545,00							426.731.799.873,00	
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	391.078.588.902,00	371.973.198.775,00	371.973.198.775,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1.500.861.671,00	1.742.460.779,00	1.098.482.679,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			1.575.904.755,00	DINAS KESEHATAN
					UPT Puskesmas Pulasaren						585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00		
22	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Cakupan Penilaian Kinerja (PKP) Cakupan Kinerja Layanan P2P				100 70 0,37 100 Persen Persen	0,37 70 100 Persen Persen	411.760.484.907,00	438.148.487.097,00	451.191.341.545,00							426.731.799.873,00	
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat	-			100 Persen	100 Persen	391.078.588.902,00	371.973.198.775,00	371.973.198.775,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1.095.207.111,00	1.396.313.102,00	814.334.102,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			1.149.967.466,00	DINAS KESEHATAN
					UPT Puskesmas Astanagarib						585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1									585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00		
1	02								585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00		
23	1	02	02						411.760.484.907,00	438.148.487.097,00	451.191.341.545,00							426.731.799.873,00		
1	02	02	2.0						100 Persen	100 Persen	391.078.588.902,00	371.973.198.775,00	371.973.198.775,00		-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-	409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.00																	

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
25	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kinerja Layanan P2P Indeks Keluarga Sehat Capaian Penilaian Kinerja (PKP)			0,37 100 70 Persen Persen	100 0,37 70 Persen Persen	411.760.484.90 7,00	438.148.487.097 ,00	451.191.341.545,0 0					426.731.799.873,0 0				
	1	02	02	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat	-		100 Persen	100 Persen	391.078.588.90 2,00	371.973.198.775 ,00	371.973.198.775,0 0		-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-	409.907.070.880,0 0	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.0 2	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			10 Dokumen	10 Dokumen	1.710.521.535,00	1.883.196.373,0 0	1.263.442.373,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		179.047.612,00	DINAS KESEHATAN		
					UPT Puskesmas Pegambiran						585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,0 0					608.702.126.942,0 0				
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,0 0					608.702.126.942,0 0				
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,0 0					608.702.126.942,0 0				
26	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Capaian Penilaian Kinerja (PKP) Cakupan Kinerja Layanan P2P			70 0,37 100 Persen Persen	70 0,37 100 Persen Persen	411.760.484.90 7,00	438.148.487.097 ,00	451.191.341.545,0 0					426.731.799.873,0 0				
	1	02	02	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat	-		100 Persen	100 Persen	391.078.588.90 2,00	371.973.198.775 ,00	371.973.198.775,0 0		-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-	409.907.070.880,0 0	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.0 2	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			10 Dokumen	10 Dokumen	2.233.504.161,00	2.643.575.900,0 0	1.935.910.900,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		2.345.179.369,00	DINAS KESEHATAN		
					UPT Puskesmas Pesisir						585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,0 0					608.702.126.942,0 0				
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,0 0					608.702.126.942,0 0				
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,0 0					608.702.126.942,0 0				
27	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kinerja Layanan P2P Indeks Keluarga Sehat Capaian Penilaian Kinerja (PKP)			70 0,37 Persen Persen	100 0,37 70 Persen Persen	411.760.484.90 7,00	438.148.487.097 ,00	451.191.341.545,0 0					426.731.799.873,0 0				

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2025				RPKD 2025		APBD 2025		RPKD Perubahan 2025	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	10	11	12	Nasional	Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	02	02	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP pada masyarakat	-			100 Persen	100 Persen	391.078.588.90 2,00	371.973.198.775 ,00	371.973.198.775.0 0			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis	-	409.907.070.880.0 0	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.0 2	Operasional Pelayanan Puskesmas																					
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1.197.100.269,00	1.600.388.779.0 0	939.580.779,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis		1.256.955.282,00	DINAS KESEHATAN					
				UPT Puskesmas Cangkol							585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,0 0						608.702.126.942,0 0						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,0 0					608.702.126.942,0 0						
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,0 0					608.702.126.942,0 0						
28	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Penilaian Kinerja (PKP) Cakupan Kinerja Layanan P2P Indeks Keluarga Sehat	-			70 100 0,37 Persen Persen	70 100 0,37 Persen Persen	411.760.484.90 7,00	438.148.487.097 ,00	451.191.341.545,0 0						426.731.799.873,0 0						
1	02	02	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP pada masyarakat	-			100 Persen	100 Persen	391.078.588.90 2,00	371.973.198.775 ,00	371.973.198.775.0 0			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis	-	409.907.070.880,0 0	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.0 2	Operasional Pelayanan Puskesmas																					
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1.281.922.938,00	1.552.280.000,0 0	929.812.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis		1.346.019.085,00	DINAS KESEHATAN					
				UPT Puskesmas Kaltanjang							585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,0 0						608.702.126.942,0 0						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,0 0					608.702.126.942,0 0						
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								585.065.558.32 4,00	623.202.066.991 ,00	630.792.478.267,0 0					608.702.126.942,0 0						
29	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Cakupan Kinerja Layanan P2P Capaian Penilaian Kinerja (PKP)	-			100 0,37 70 Persen Persen	0,37 100 70 Persen Persen	411.760.484.90 7,00	438.148.487.097 ,00	451.191.341.545,0 0						426.731.799.873,0 0						
1	02	02	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP pada masyarakat	-			100 Persen	100 Persen	391.078.588.90 2,00	371.973.198.775 ,00	371.973.198.775.0 0			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis	-	409.907.070.880,0 0	DINAS KESEHATAN					
1	02	02	2.0 2	Operasional Pelayanan Puskesmas																					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	2.137.813.917,00	2.650.616.844,00	1.942.124.844,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			2.244.704.613,00	DINAS KESEHATAN	
					UPT Puskesmas Larangan							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00					608.702.126.942,00				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00					608.702.126.942,00				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00					608.702.126.942,00				
30	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Capaian Penilaian Kinerja (PKP) Cakupan Kinerja Layanan P2P				0,37 70 100 Persen Persen	0,37 70 100 Persen Persen	411.760.484.907,00	438.148.487.097,00	451.191.341.545,00							426.731.799.873,00		
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat	-			100 Persen	100 Persen	391.078.588.902,00	371.973.198.775,00	371.973.198.775,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	2.158.874.751,00	2.564.257.508,00	1.875.211.508,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			2.266.818.488,00	DINAS KESEHATAN	
					UPT Puskesmas Perummas Utara							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00					608.702.126.942,00				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00					608.702.126.942,00				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00					608.702.126.942,00				
31	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kinerja Layanan P2P Capaian Penilaian Kinerja (PKP) Indeks Keluarga Sehat				0,37 70 100 Persen Persen	100 70 0,37 Persen Persen Persen	411.760.484.907,00	438.148.487.097,00	451.191.341.545,00							426.731.799.873,00		
1	02	02	2.0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat	-			100 Persen	100 Persen	391.078.588.902,00	371.973.198.775,00	371.973.198.775,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0	00	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1.406.662.955,00	1.736.255.564,00	1.036.339.564,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			1.476.996.103,00	DINAS KESEHATAN	
					UPT Puskesmas Sitopeng							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00					608.702.126.942,00				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00		
32	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Capaian Penilaian Kinerja (PKP) Cakupan Kinerja Layanan P2P				411.760.484.907,00	438.148.487.097,00	451.191.341.545,00							426.731.799.873,00		
1	02	02	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat	-			100 Persen	100 Persen	391.078.588.902,00	371.973.198.775,00	371.973.198.775,00		-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-	409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	Operasional Pelayanan Puskesmas																
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					10 Dokumen	10 Dokumen	2.599.727.320,00	2.744.384.315,00	2.065.170.315,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		2.729.713.686,00	DINAS KESEHATAN
				UPT Puskesmas Kalijaga Permai							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00					608.702.126.942,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00		
33	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat Cakupan Kinerja Layanan P2P Capaian Penilaian Kinerja (PKP)				411.760.484.907,00	438.148.487.097,00	451.191.341.545,00							426.731.799.873,00		
1	02	02	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat	-			100 Persen	100 Persen	391.078.588.902,00	371.973.198.775,00	371.973.198.775,00		-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-	409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2	Operasional Pelayanan Puskesmas																
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					10 Dokumen	10 Dokumen	2.411.147.360,00	2.800.291.533,00	2.067.946.633,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		2.531.704.728,00	DINAS KESEHATAN
				Upt Laboratorium Kesehatan Daerah							585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00					608.702.126.942,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00							608.702.126.942,00		

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
34	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kinerja Layanan P2P Capaian Penilaian Kinerja (PKP) Indeks Keluarga Sehat			100 70 0,37 Persen Persen	100 70 0,37 Persen Persen	411.760.484.907,00	438.148.487.097,00	451.191.341.545,00				426.731.799.873,00				
	1	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat	-		100 Persen	100 Persen	391.078.588.902,00	371.973.198.775,00	371.973.198.775,00	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-	409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	2.002		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Dokumen	10 Dokumen	2.411.147.360,00	1.276.739.485,00	1.276.739.485,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		2.531.704.728,00	DINAS KESEHATAN	
					Upt Pelayanan Kesehatan Khusus						585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00				608.702.126.942,00				
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00				608.702.126.942,00				
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						585.065.558.324,00	623.202.066.991,00	630.792.478.267,00				608.702.126.942,00				
35	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Penilaian Kinerja (PKP) Indeks Keluarga Sehat Cakupan Kinerja Layanan P2P			70 100 0,37 Persen Persen	70 100 0,37 Persen Persen	411.760.484.907,00	438.148.487.097,00	451.191.341.545,00				426.731.799.873,00				
	1	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP pada masyarakat	-		100 Persen	100 Persen	391.078.588.902,00	371.973.198.775,00	371.973.198.775,00	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-	409.907.070.880,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	2.002		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	557.638.774,00	513.262.455,00	475.022.455,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		585.520.713,00	DINAS KESEHATAN	
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						87.478.623.673,00	58.586.706.584,00	71.781.027.481,00					0,00			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						87.348.623.673,00	58.456.706.784,00	71.651.027.681,00					0,00			
	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						87.348.623.673,00	58.456.706.784,00	71.651.027.681,00					0,00			
36	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran			100 persen	100 persen	18.195.439.377,00	18.423.231.013,00	17.422.448.429,12					0,00			

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	31.929.900,00	31.928.730,00	31.928.730,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya informasi keuangan perangkat daerah sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	10.396.957.360,00	11.620.567.507,00	11.620.567.507,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.0	00	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	10.329.127.860,00	11.552.773.107,00	11.671.158.584,12	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.0	00	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	21.629.700,00	21.612.840,00	21.612.840,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.0	00	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	46.199.800,00	46.181.560,00	46.181.560,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebagai Bahan Audit	-			100 persen	100 persen	29.282.625,00	28.743.125,00	28.743.125,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.0	00	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	3 Laporan	29.282.625,00	28.743.125,00	98.572.398,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi						Sumber Dana
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	03	01	2.0.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-			100 persen	100 persen	158.158.800,00	20.160.000,00	20.160.000,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.0.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	125.058.800,00	0,00	0,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.0.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	0 Dokumen	8.300.000,00	0,00	0,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.0.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	80 Orang	24.800.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.0.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhihya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	1.491.436.640,00	1.446.740.189,00	1.446.740.189,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.0.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	174.998.700,00	174.997.356,00	115.233.582,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.0.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.870.000,00	58.859.121,00	31.046.305,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.0.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.449.850,00	90.449.680,00	79.361.835,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				71 Unit	38 Unit	625.811.789,00	619.829.129,00	402.855.610,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.007.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				28 Unit	15 Unit	212.663.031,00	136.918.664,00	109.019.693,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 persen	100 persen	1.819.890.400,00	1.813.136.275,00	1.813.136.275,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	526.426.400,00	526.426.000,00	526.426.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.293.464.000,00	1.286.710.275,00	1.265.178.512,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 persen	100 persen	2.652.138.257,00	2.159.647.242,00	2.159.647.242,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	374.003.540,00	289.836.096,00	258.090.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				97 Unit	97 Unit	673.300.160,00	398.844.132,00	373.519.400,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	01	2.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	250.444.157,00	129.807.606,00	129.807.606,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				0.5 Ton/hari	0.5 Ton/hari	0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	04	2.0	00	15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.999.800,00	49.999.800,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	04	2.0	00	16	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																	
							Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				5 Unit	4 Unit	307.500.000,00	249.780.000,00	252.756.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40	1	03	05	2.0		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi layak				91.29 Persen	91.29 Persen	4.487.684.336,00	3.380.361.480,00	4.605.588.576,00							0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	05	2.0	1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pengelolaan air limbah melalui SPALD-T dan SPALD-S	-			72520 Rumah Tangga	72520 Rumah Tangga	4.487.684.336,00	3.380.361.480,00	3.380.361.480,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	05	2.0	00	24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																	
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi				2 Unit	4 Unit	256.762.758,00	195.792.110,00	999.034.039,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	05	2.0	00	29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																	
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi				5 Unit	3 Unit	250.000.000,00	215.091.720,00	210.711.640,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	05	2.0	00	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																	
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				120 Rumah Tangga	61 Rumah Tangga	1.147.249.999,00	866.387.493,00	1.049.503.002,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	05	2.0	00	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				3 Dokumen	2 Dokumen	142.000.000,00	53.582.168,00	153.167.504,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	4.900.000.000,00	3.537.570.740,00	3.432.672.740,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	08	2.0	00	1.23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				100 Dokumen	100 Dokumen	318.000.000,00	300.000.066,00	284.673.958,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
43	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase ketersediaan baperkam dan sarana prasarana lingkungan RW			82,6 Persen	82,6 Persen	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							0,00	
1	03	09	2.0	1		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya bangunan peningkatan bangunan kondisi rusak berat menjadi rusak sedang dalam 1 kawasan	-		1 Kawasan	1 Kawasan	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	09	2.0	00	1.08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																
						Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	0 Kawasan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	09	2.0	00	1.10	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
44	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kondisi mantap			96 Persen	94,5 Persen	29.659.999.960,00	14.852.168.433,00	22.249.842.934,01							0,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	1	03	10	2.01	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Presentasi Luas Jalan yang menuju kawasan strategis dalam kondisi mantap	-			100 Persen	100 Persen	29.659.999.960,00	14.852.168.433,00	14.852.168.433,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	1	03	10	2.01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun					13 Dokumen	6 Dokumen	1.293.048.620,00	261.913.500,00	431.477.500,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	1	03	10	2.01	38	Pemeliharaan Rutin Jembatan																	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin					20 Jembatan	20 Jembatan	688.568.740,00	548.793.936,00	548.793.902,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opser Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opser PKB	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	1	03	10	2.01	39	Rehabilitasi Jembatan																	
					Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi					2 Jembatan	0 Jembatan	6.680.000.000,00	4.226.350.000,00	0,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	1	03	10	2.01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya					159.172 KM	159.172 KM	610.004.596,00	569.075.830,00	550.722.065,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	1	03	10	2.01	44	Rehabilitasi Jalan																	
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi					9 KM	5 KM	17.905.429.520,00	7.088.091.000,00	16.719.722.795,01	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opser Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opser PKB	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	1	03	10	2.01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan																	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin					4 KM	3.8 KM	2.482.948.484,00	2.157.944.167,00	3.999.126.672,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opser Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opser PKB	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45	1 03 11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi			100 Persen	100 Persen	600.000.000,00	499.772.389,00	437.946.085,00								
	1 03 11 2.0 1		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedia dokumen Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	414.929.615,00	414.929.615,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03 11 2.0 00 1 11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				70 Lembaga	70 Lembaga	80.000.000,00	69.099.975,00	31.032.459,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03 11 2.0 00 1 16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				125 Orang	90 Orang	420.000.000,00	345.829.640,00	316.191.810,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03 11 2.0 2		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	34.999.984,00	34.999.984,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03 11 2.0 00 2 15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																	
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	50.000.000,00	34.999.984,00	46.673.501,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03 11 2.0 4		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedianya dokumen kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.842.790,00	49.842.790,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03 11 2.0 00 4 04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				120 Paket Pekerjaan	120 Paket Pekerjaan	50.000.000,00	49.842.790,00	44.048.315,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
46	1 03 12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan dalam pemanfaatan ruang			80 Persen	80 Persen	445.000.000,00	442.353.295,00	300.866.471,00							0,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	03	12	2.0	1			1 Dokumen	1 Dokumen	155.000.000,00	154.999.777,00	154.999.777,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	12	2.0	00	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
							1 Laporan	1 Laporan	155.000.000,00	154.999.777,00	95.740.497,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	12	2.0	2			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	12	2.0	00	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang														
							0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	12	2.0	3			100 Persen	100 Persen	215.000.000,00	214.993.381,00	214.993.381,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	12	2.0	00	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
							1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	215.000.000,00	214.993.381,00	163.548.342,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	12	2.0	4			1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	72.360.137,00	72.360.137,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	12	2.0	00	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														
							1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	72.360.137,00	41.577.632,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	12	2.0	00	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal														
							0 Berita Acara	0 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				130.000.000,00	129.999.800,00	129.999.800,00								0,00

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	10			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							130.000.000,00	129.999.800,00	129.999.800,00							0,00		
47	2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Milik Pemerintah yang sudah bersertifikat terhadap bidang tanah yang menjadi milik pemerintah	-			100 Persen	100 Persen	130.000.000,00	129.999.800,00	129.999.800,00							0,00		
	2	10	10	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Data dan Informasi Penggunaan Tanah	-			1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	129.999.800,00	129.999.800,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	2	10	10	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	129.999.800,00	129.999.800,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
					UPT Peralatan dan Perbengkelan							87.478.623.673,00	58.586.706.584,00	71.781.027.481,00							0,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	0,00	
	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	0,00	
48	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	-			100 persen	100 persen	18.195.439.377,00	18.423.231.013,00	17.422.448.429,12							0,00		
	1	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai fasilitas kinerja ASN pada Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	2.652.138.257,00	2.159.647.242,00	2.159.647.242,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1	03	01	2.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya																		
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				14 Unit	13 Unit	1.200.000.000,00	1.199.941.408,00	1.151.115.494,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
					UPT Pengelolaan Air Limbah							87.478.623.673,00	58.586.706.584,00	71.781.027.481,00							0,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	0,00	
	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	0,00	
49	1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi layak	-			91.29 Persen	91.29 Persen	4.487.684.336,00	3.380.361.480,00	4.605.588.576,00							0,00		
	1	03	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pengelolaan air limbah melalui SPALD-T dan SPALD-S	-			72520 Rumah Tangga	72520 Rumah Tangga	4.487.684.336,00	3.380.361.480,00	3.380.361.480,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	

No		Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		
								Sebelum	Sesudah								Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		05133	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				150 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	266.666.579,00	252.717.261,00	252.717.261,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1	03	05138	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2.425.005.000,00	1.796.790.728,00	1.940.455.130,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							43.339.274.698,00	37.145.953.061,00	38.930.440.831,00						21.793.400.170,20	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							43.339.274.698,00	37.145.953.061,00	38.930.440.831,00						21.793.400.170,20	
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							43.339.274.698,00	37.145.953.061,00	38.930.440.831,00						21.793.400.170,20	
50	1	0401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah				80 Persen	80 Persen	13.283.562.209,00	11.390.428.148,00	11.942.637.873,91						14.478.821.973,00	
1	04	01201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			7 Dokumen	7 Dokumen	1.763.571.720,00	2.009.917.040,00	2.009.917.040,00			-	1. Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	2.215.782.969,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	28.571.720,00	36.392.475,00	20.970.475,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan		9.435.716,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01202	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.948.025,00	2.948.025,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan		3.241.441,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01203	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.948.025,00	2.948.025,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan		2.636.228,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01204	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.948.025,00	2.948.025,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan		5.039.848,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	04	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.948.025,00	2.948.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan		2.636.228,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.700.000.000,00	1.870.357.000,00	1.808.067.106,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan		2.162.523.189,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	91.375.465,00	41.301.465,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis		30.270.319,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.0	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen laporan keuangan perangkat daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	8.377.895.489,00	6.717.648.995,00	6.717.648.995,00		-	1. Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	8.589.407.775,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	50 Orang/bulan	8.375.395.489,00	6.715.450.970,00	7.078.025.338,91	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	1. Penanggulangan Kemiskinan		8.584.780.376,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.198.025,00	2.198.025,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan		4.627.399,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	23.000.000,00	18.400.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			79.784.673,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	224.000.000,00	237.202.160,00	165.178.080,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			905.117.955,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dokumen hasil pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	-	3 Dokumen	3 Dokumen	995.000.000,00	359.765.588,00	359.765.588,00			-	1. Penanggulangan Kemiskinan	-		535.398.567,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	270.000.000,00	114.512.665,00	535.459.665,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	20 Unit	617.000.000,00	154.846.660,00	330.164.189,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			162.348.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	53 Unit	108.000.000,00	90.406.263,00	90.399.755,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			23.049.767,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah	-	2 Dokumen	2 Dokumen	614.000.000,00	662.957.427,00	662.957.427,00			-	1. Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		809.263.921,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.0008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	12 Laporan	139.000.000,00	106.194.000,00	106.194.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			221.545.478,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.0008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	475.000.000,00	556.763.427,00	556.763.427,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			587.718.443,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp) RKPD Perubahan 2025	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah							Nasional				Daerah			
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	04	01	2.0.0.9	3			4	Dokumen	4	Dokumen	772.000.000,00	843.882.105,00	843.882.105,00			2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman		768.260.233,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	01	2.0.0.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							1	Unit	1	Unit	42.000.000,00	42.669.000,00	42.669.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.		57.980.868,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	01	2.0.0.02	3			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							27	Unit	27	Unit	583.000.000,00	604.376.000,00	604.376.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan		498.241.755,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	01	2.0.0.09	3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							2	Unit	2	Unit	94.000.000,00	139.425.805,00	139.425.805,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan		139.150.422,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	01	2.0.0.10	3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							2	Unit	2	Unit	53.000.000,00	57.411.300,00	57.411.300,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan		72.887.188,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
51	1	04	02				100	Persen	100	Persen	401.375.000,00	401.375.000,00	349.848.150,00					421.443.750,00				
1	04	02	2.0.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota			100	%	100	%	29.625.000,00	29.625.000,00	29.625.000,00			1. Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat terdampak bencana atau relokasi program kabupaten/kota	31.106.250,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	02	2.0.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		

No					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	29.625.000,00	29.625.000,00	24.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			31.106.250,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.0	3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terwujudnya acuan dalam penyediaan dan rehab rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota Terwujudnya acuan dalam penyediaan dan rehab rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota (deleted)	-			100 %	100 %	268.000.000,00	268.000.000,00	268.000.000,00			-	1. Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat terdampak bencana atau relokasi program kabupaten/kota		281.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.0	00	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																	
						Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-			10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	268.000.000,00	268.000.000,00	246.272.200,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			281.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.0	5	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	terselenggaranya pengelolaan rumah susun dan/atau rumah khusus	-			100 %	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	1. Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat umum dan/atau khusus		42.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.0	00	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	-			1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	27.200.950,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			42.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.0	6	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	63.750.000,00	63.750.000,00	63.750.000,00			-	1. Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Kota Cirebon		66.937.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-			1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	22.500.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			31.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02	2.0	00	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan																	
						Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	33.750.000,00	33.750.000,00	29.250.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			35.437.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00								16.743.977.310,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00								16.743.977.310,00	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00								16.743.977.310,00	
55	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah				78 Persen	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00		
	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	-			12 Laporan	12 Laporan	34.545.000,00	22.939.847,00	22.939.847,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	ASN Satpol PP Kota Cirebon		44.761.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.947.812,00	4.947.812,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			24.255.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1					NON URUSAN							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00								16.743.977.310,00	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00								16.743.977.310,00	

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.447.162,00	1.447.162,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat at pengengaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			1.543.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1					NON URUSAN							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00					16.743.977.310,00			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00					16.743.977.310,00			
58	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah				78 Persen	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	-			12 Laporan	12 Laporan	34.545.000,00	22.939.847,00	22.939.847,00			Memperkuat at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat at pengengaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	ASN Satpol PP Kota Cirebon		44.761.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.001	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00					16.743.977.310,00			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00					16.743.977.310,00			
59	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah				78 Persen	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana					Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	05	01	2.01				12 Laporan	12 Laporan	34.545.000,00	22.939.847,00	22.939.847,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	ASN Satpol PP Kota Cirebon		44.761.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	01	2.003				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
							1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.858.875,00	1.858.875,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			1.984.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1										14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00					16.743.977.310,00					
1	05									14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00					16.743.977.310,00					
60	1	05	01				78 Persen	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00				

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp) RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah						Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	496.000,00	496.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat at penganggahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			2.094.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1			NON URUSAN						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00		
62	1	05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah			78 Persen	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00		
1	05 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	-		12 Laporan	12 Laporan	34.545.000,00	22.939.847,00	22.939.847,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat at penganggahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	ASN Satpol PP Kota Cirebon		44.761.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01	2.001.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00		
63	1	05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah			78 Persen	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	05	01	2.0	1			12 Laporan	12 Laporan	34.545.000,00	22.939.847,00	22.939.847,00			Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	ASN Satpol PP Kota Cirebon		44.761.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.0	00	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
							1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		1.984.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1							NON URUSAN			14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00					16.743.977.310,00		
1	05						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00					16.743.977.310,00		
64	1	05	01				78 Persen	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00						12.296.242.750,00		

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp) RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah						Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			1.874.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1			NON URUSAN						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00		
66	1	05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah			78 Persen	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00		
1	05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	-			12 Laporan	12 Laporan	34.545.000,00	22.939.847,00	22.939.847,00			Memperkuat at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	ASN Satpol PP Kota Cirebon		44.761.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00		
67	1	05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah			78 Persen	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00		

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	-			12 Laporan	12 Laporan	34.545.000,00	22.939.847,00	22.939.847,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	ASN Satpol PP Kota Cirebon		44.761.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.00		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
1			07		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00				16.743.977.310,00				
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00				16.743.977.310,00				
69	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah				-	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00						12.296.242.750,00		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan pengelolaan keuangan	-			5 Dokumen	5 Dokumen	8.937.575.000,00	11.113.985.740,00	11.113.985.740,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah		9.415.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	74 Orang/bulan	0,00	11.101.357.315,00	11.184.968.674,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			9.371.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1					NON URUSAN							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBS 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi		Sumber Dana	Nasional				Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
70	1	05	01				-	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00										
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah																	
	1	05	01	2	2		5 Dokumen	5 Dokumen	8.937.575.000,00	11.113.985.740,00	11.113.985.740,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	9.415.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan pengelolaan keuangan	-																
	1	05	01	2	00	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														16.743.977.310,00
									14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00										
	1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														16.743.977.310,00
									14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00										
71	1	05	01				-	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah																	
	1	05	01	2	2		5 Dokumen	5 Dokumen	8.937.575.000,00	11.113.985.740,00	11.113.985.740,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	9.415.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan pengelolaan keuangan	-																
	1	05	01	2	00	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							1 Laporan	1 Laporan	0,00	5.628.425,00	5.628.425,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		33.075.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1						NON URUSAN														16.743.977.310,00
									14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00										
	1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														16.743.977.310,00
									14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00										
72	1	05	01				-	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah																	
	1	05	01	2	2		5 Dokumen	5 Dokumen	8.937.575.000,00	11.113.985.740,00	11.113.985.740,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	9.415.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan pengelolaan keuangan	-																
	1	05	01	2	00	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														16.743.977.310,00
									14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00										
	1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														16.743.977.310,00
									14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00										
73	1	05	01				-	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah																	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional		Daerah		17	18
1	05	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan pengelolaan keuangan	-			5 Dokumen	5 Dokumen	8.937.575.000,00	11.113.985.740,00	11.113.985.740,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya penyelenggaraan perangkat daerah		9.415.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			11.025.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1					NON URUSAN							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00		
74	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah			-	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00		
1	05	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan pengelolaan keuangan	-			5 Dokumen	5 Dokumen	8.937.575.000,00	11.113.985.740,00	11.113.985.740,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah		9.415.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00		
75	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah			-	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00		
1	05	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	-			3 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	37.428.000,00	37.428.000,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah		42.446.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.0	00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				27 Dokumen	41 Dokumen	35.000.000,00	37.428.000,00	37.428.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			42.446.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen peningkatan disiplin pegawai perangkat daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	95.000.000,00	90.520.000,00	90.520.000,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah		165.375.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	74 Paket	0,00	90.520.000,00	95.490.500,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			165.375.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1					NON URUSAN							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional				Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00				
76	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah		-	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00				
1	05	01	2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen peningkatan disiplin pegawai perangkat daerah	-	2 Dokumen	2 Dokumen	95.000.000,00	90.520.000,00	90.520.000,00		-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah			165.375.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	01	2.0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00				
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00				
77	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah		-	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00				
1	05	01	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	-	8 Laporan	3 Laporan	442.675.000,00	435.198.455,00	435.198.455,00		-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah			719.381.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	01	2.0	Penyediaan Komponen Instalasi																		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	0,00	8.053.550,00	8.053.550,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			30.318.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1				NON URUSAN						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00				
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00				
78	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah			78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00				
1	05	01	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	-	8 Laporan	3 Laporan	442.675.000,00	435.198.455,00	435.198.455,00		-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah			719.381.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	01	2.0	Penyediaan Komponen Instalasi																		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00				
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00				
79	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah		-	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional				Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	05	01	2.0	6			8 Laporan	3 Laporan	442.675.000,00	435.198.455,00	435.198.455,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah		719.381.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
1	05	01	2.0	6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					47 Paket	1 Paket					72.765.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
1							NON URUSAN																16.743.977.310,00	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																16.743.977.310,00	
80	1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah				-	78 Persen						12.296.242.750,00					
1	05	01	2.0	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	-			8 Laporan	3 Laporan	442.675.000,00	435.198.455,00	435.198.455,00	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	719.381.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	01	2.0	6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																16.743.977.310,00	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																16.743.977.310,00	
81	1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah				-	78 Persen						12.296.242.750,00					
1	05	01	2.0	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	-			8 Laporan	3 Laporan	442.675.000,00	435.198.455,00	435.198.455,00	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	719.381.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	01	2.0	6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					300 Paket	4 Paket					26.460.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
1							NON URUSAN																16.743.977.310,00	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																16.743.977.310,00	
82	1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah				-	78 Persen						12.296.242.750,00					
1	05	01	2.0	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	-			8 Laporan	3 Laporan	442.675.000,00	435.198.455,00	435.198.455,00	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	719.381.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	01	2.0	6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
							Sebelum	Sesudah						Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00					
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00					
83	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah			-	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00						12.296.242.750,00					
	1	05	01	2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	-			8 Laporan	3 Laporan	442.675.000,00	435.198.455,00	435.198.455,00	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	719.381.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.0.6	00	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	4 Paket	0,00	24.775.000,00	16.022.863,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			66.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1						NON URUSAN				14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00					
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00					
84	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah			-	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00						12.296.242.750,00					
	1	05	01	2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	-			8 Laporan	3 Laporan	442.675.000,00	435.198.455,00	435.198.455,00	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	719.381.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.0.6	00	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00					
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00					
85	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah			-	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00						12.296.242.750,00					
	1	05	01	2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	-			8 Laporan	3 Laporan	442.675.000,00	435.198.455,00	435.198.455,00	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	719.381.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	2.0.6	00	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	9 Dokumen	0,00	42.083.000,00	31.278.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			55.125.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1						NON URUSAN				14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00					
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00						16.743.977.310,00					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
86	1	05	01					78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah																		
1	05	01	2.0.6				8 Laporan	3 Laporan	442.675.000,00	435.198.455,00	435.198.455,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah		719.381.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	01	2.0.6.00.06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
1									14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00				
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	05								14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00				
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			
87	1	05	01					78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah																		
1	05	01	2.0.6				8 Laporan	3 Laporan	442.675.000,00	435.198.455,00	435.198.455,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah		719.381.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	01	2.0.6.00.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							12 Laporan	2 Laporan	0,00	26.125.000,00	26.125.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			27.562.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05								14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00				
			NON URUSAN																			
1	05								14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00				
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG YX																			
88	1	05	01					78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah																		
1	05	01	2.0.6				8 Laporan	3 Laporan	442.675.000,00	435.198.455,00	435.198.455,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah		719.381.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	01	2.0.6.00.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu															
1																						
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00				
1	05								14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00				
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			
89	1	05	01					78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah																		
1	05	01	2.0.6				8 Laporan	3 Laporan	442.675.000,00	435.198.455,00	435.198.455,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah		719.381.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	01	2.0.6.00.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional				Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1			NON URUSAN						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00		
92	1	05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah			78 Persen	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00		
1	05 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-		12 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	87.613.290,00	87.613.290,00			Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah		194.591.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05 01 2.007 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00		
93	1	05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah			78 Persen	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	87.613.290,00	87.613.290,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah		194.591.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1					NON URUSAN							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00		
94	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah				78 Persen	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00		

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
							Sebelum	Sesudah							Nasional	Daerah				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Cirebon, Kesambi, Drajat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			1.653.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1				NON URUSAN						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00	
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00	
96	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah			78 Persen	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00	
1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-		12 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	87.613.290,00	87.613.290,00			Memperku at reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku at pencegaha n dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup an.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan perangkat daerah		194.591.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07.00	Pengadaan Mebel																
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00	
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14.642.953.000,00	17.432.699.515,00	17.552.412.909,00							16.743.977.310,00	
97	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah			78 Persen	78 Persen	10.841.173.000,00	13.042.909.262,00	13.053.028.036,00							12.296.242.750,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	149.480.000,00	639.713.300,00	689.202.064,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		165.375.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	02	2.002.12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	95.000.000,00	94.999.924,00	94.999.924,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		110.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	02	2.003	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Laporan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Tantribum	-	12 Laporan	12 Laporan	105.000.000,00	91.450.750,00	91.450.750,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Masyarakat Kota Cirebon, Satlinmas Satpol PP		110.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	02	2.003.06	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				12 Laporan	12 Laporan	105.000.000,00	91.450.750,00	109.145.370,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		110.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							12.320.257.618,00	12.920.636.256,00	15.317.906.578,00					13.704.366.121,00				

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Nasional		Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	3.710.000,00	2.745.449,00	1.845.449,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			2.882.721,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.0	00	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	11 Laporan	13.567.000,00	10.824.836,00	10.824.836,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			11.366.078,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			3 Jenis	3 Jenis	5.317.239.546,00	6.524.407.922,00	6.524.407.922,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon		6.850.669.525,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.0	00	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	81 Orang/bulan	5.308.750.546,00	6.519.909.637,00	6.954.655.835,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			6.845.946.326,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.0	00	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.970.000,00	2.472.682,00	2.472.682,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			2.596.316,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.0	00	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	4.519.000,00	2.025.603,00	2.025.603,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			2.126.883,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Jenis	1 Jenis	0,00	66.805.165,00	66.805.165,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon		70.145.423,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.0	00	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	1 Paket	0,00	66.805.165,00	54.870.220,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			70.145.423,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			8 Jenis	8 Jenis	244.021.500,00	305.156.572,00	305.156.572,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon		320.414.402,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah			RKPD 2025	APBD 2025			RKPD Perubahan 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	05	01	2.000.01	Penyediaan Komponen Instalasi																		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			9 Paket	1 Paket	6.237.300,00	5.576.570,00	5.576.570,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			5.855.399,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.000.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			40 Paket	1 Paket	44.781.420,00	37.338.837,00	34.790.732,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			39.205.779,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.000.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			16 Paket	1 Paket	5.042.100,00	3.414.457,00	3.414.457,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			3.585.180,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.000.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			7 Paket	1 Paket	1.120.000,00	1.921.458,00	1.921.458,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			2.017.531,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.000.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			8 Paket	1 Paket	24.100.230,00	21.226.900,00	15.516.400,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			22.288.245,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.000.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			5 Dokumen	5 Dokumen	36.240.000,00	32.868.000,00	32.868.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			34.511.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.000.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	6.140.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			6.352.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.000.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			22 Laporan	22 Laporan	120.360.450,00	196.760.350,00	148.381.325,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			206.598.368,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.000.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Jenis	2 Jenis	27.310.800,00	70.668.603,00	70.668.603,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon		29.158.877,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.000.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	05	01	2.00	05			Pengadaan Mebel															
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	36 Unit	0,00	42.898.244,00	42.861.672,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.00	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.00	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	6 Unit	27.310.800,00	27.770.359,00	27.770.359,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		29.158.877,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.0	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Perusahaan Pemerintah Daerah	-	3 Jenis	2 Jenis	464.932.087,00	469.116.523,00	469.116.523,00		-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon	492.572.349,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.00	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	163.128.000,00	120.600.000,00	120.600.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		126.630.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.00	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	301.804.087,00	348.516.523,00	348.516.523,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		365.942.349,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Brarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3 Jenis	3 Jenis	669.209.182,00	596.429.368,00	596.429.368,00		-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon	808.950.836,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.00	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		13 Unit	13 Unit	190.670.450,00	208.531.000,00	208.531.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		218.957.550,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
1	05	01	2.00	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		9 Unit	7 Unit	378.689.300,00	381.338.368,00	981.338.368,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		400.405.286,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
							Sebelum	Sesudah						Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	05	01	2.00	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
									1 Unit	1 Unit	74.999.432,00	0,00	173.999.603,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		182.700.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	05	01	2.00	00			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
									17 Unit	23 Unit	24.850.000,00	6.560.000,00	6.560.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		6.888.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
##	1	05	04						100 22,73 Persen	100 Persen	5.566.984.003,00	4.854.005.894,00	6.118.339.562,00					5.096.706.189,00				
	05	04	2.0	1					3 Jenis	7 Jenis	4.641.335.753,00	4.578.534.875,00	4.578.534.875,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Masyarakat Kota Cirebon	4.807.461.619,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	05	04	2.00	1			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															
									1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	05	04	2.00	1			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															
									12 Laporan	12 Laporan	4.232.497.270,00	4.232.497.150,00	4.080.001.031,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		4.444.122.008,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	05	04	2.00	1			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.300.000,00	4.634.142,00	4.634.142,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			10.609.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	2.0	6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	32.250.000,00	27.860.037,00	30.060.037,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			33.218.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	2.0	6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.300.000,00	7.340.024,00	7.340.024,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			10.609.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	2.0	6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.469.000,00	7.357.539,00	7.357.539,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			7.693.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	2.0	6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.688.000,00	19.157.285,00	21.439.965,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			17.189.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	2.0	6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	34.456.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			35.490.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	2.0	6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	9.172.000,00	12.500.000,00	20.750.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			9.447.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	2.0	6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	280.000.000,00	362.521.100,00	228.889.380,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			266.755.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	2.0	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			3 Jenis	3 Jenis	200.359.000,00	572.439.032,00	572.439.032,00		-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	BPBD Kota Cirebon		237.077.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	209.388.300,00	333.038.352,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			94.971.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	93 Unit	26.430.000,00	23.465.000,00	23.465.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			27.223.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	19 Unit	27.764.000,00	10.384.000,00	17.733.900,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			28.597.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
##	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Lembaga di tingkat Kelurahan yang mendapatkan pelatihan kebencanaan				4,55 persen	4,55 persen	1.562.021.279,00	1.811.787.396,00	1.603.847.463,00							1.725.995.000,00	
1	05	03	2.0	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jenis bencana yang diinformasikan	-			100 persen	100 persen	63.210.279,00	54.966.870,00	54.966.870,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Masyarakat Kota Cirebon		17.208.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																	
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				4200 Orang	4200 Orang	50.000.000,00	50.575.000,00	50.007.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			17.208.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.0	00	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																	
						Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	13.210.279,00	4.391.870,00	4.100.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)								
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maktumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	946.453.000,00	1.034.973.096,00	866.222.212,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			1.215.778.000,00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH							
1	05	03	2.0	00	28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																								
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	59.145.000,00	168.398.790,00	168.387.840,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			60.920.000,00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH							
1	05	03	2.0	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik	-			100 persen	100 persen	76.915.000,00	90.028.440,00	90.028.440,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Masyarakat Kota Cirebon		79.222.000,00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH							
1	05	03	2.0	00	09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				27 Orang	27 Orang	76.915.000,00	90.028.440,00	79.422.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			79.222.000,00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH							
1	05	03	2.0	04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Laporan Kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	-			3 Laporan	3 Laporan	83.000.000,00	58.977.768,00	58.977.768,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Masyarakat Kota Cirebon		161.298.000,00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH							
1	05	03	2.0	00	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																								
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	6.713.848,00	6.713.848,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			127.308.000,00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH							
1	05	03	2.0	04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																								
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				2 Laporan	2 Laporan	33.000.000,00	52.263.920,00	52.263.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			33.990.000,00	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH							
						DINAS SOSIAL							12.946.343.629,00	11.407.698.832,00	11.442.558.819,00							14.385.860.256,00								
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.946.343.629,00	11.407.698.832,00	11.442.558.819,00							14.385.860.256,00								
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							12.946.343.629,00	11.407.698.832,00	11.442.558.819,00							14.385.860.256,00								

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
##	1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah			76,95 Poin	76,95 Poin	9.950.558.832,00	8.978.647.102,00	9.039.805.276,00							
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		7 Dokumen	7 Dokumen	197.322.453,00	165.315.461,00	165.315.461,00		-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Pegawai Dinas Sosial Kota Cirebon		228.669.645,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	50.993.350,00	50.992.075,00	50.991.849,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		70.343.018,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	11.642.289,00	11.642.120,00	11.642.120,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		12.224.404,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	11.642.289,00	11.642.100,00	11.642.100,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		12.224.404,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	11.642.289,00	11.642.120,00	11.642.120,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		12.224.404,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	11.642.289,00	11.641.950,00	11.641.950,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		12.224.404,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	4 Laporan	10.604.947,00	10.601.556,00	10.601.556,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		11.135.195,00	DINAS SOSIAL	

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah							Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	89.155.000,00	57.153.540,00	57.153.540,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			98.293.816,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	5 Dokumen	6.097.468.619,00	6.598.647.494,00	6.598.647.494,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Pegawai Dinas Sosial Kota Cirebon	5.906.965.634,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.0 00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	46 Orang/bulan	6.054.169.497,00	6.555.349.427,00	6.690.378.315,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			5.852.454.408,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0 00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	10.389.000,00	10.388.737,00	10.388.737,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			13.861.368,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0 00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9.700.000,00	9.699.578,00	9.699.578,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			10.705.282,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0 00 06	Pengelolaan dan Penyiaapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	1 Dokumen	10.803.122,00	10.802.800,00	4.300.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			11.343.279,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0 00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	12.407.000,00	12.406.952,00	12.406.952,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			18.601.297,00	DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas												
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	06	01	2.01.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-						2 Dokumen	2 Dokumen	47.133.975,00	40.829.000,00	40.829.000,00		Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Pegawai Dinas Sosial Kota Cirebon			49.490.674,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01.3.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																						
												1 Dokumen	2 Dokumen	41.883.975,00	40.829.000,00	40.829.000,00		Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			43.978.174,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.01.3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																						
												1 Laporan	0 Laporan	5.250.000,00	0,00	0,00		Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			5.512.500,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.01.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	-						37 Orang	37 Orang	73.000.000,00	61.204.500,00	61.204.500,00				-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Pegawai Dinas Sosial Kota Cirebon			94.686.393,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01.5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																						
												2 Paket	1 Paket	48.000.000,00	36.204.500,00	20.960.500,00		Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			86.968.893,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.01.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																						
												20 Orang	20 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			7.717.500,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.01.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						6 Paket	6 Paket	635.373.082,00	583.647.708,00	583.647.708,00				-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Pegawai Dinas Sosial Kota Cirebon			921.943.441,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01.6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
												1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	45.809.277,00	39.748.511,00		Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			68.640.090,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.01.6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																						
												1 Paket	1 Paket	8.113.022,00	8.108.552,00	8.108.552,00		Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			8.518.674,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.01.6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																						
												1 Paket	1 Paket	4.260.060,00	4.158.609,00	4.158.609,00		Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			4.473.063,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.01.6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	35.625.560,00	30.806.185,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		55.029.615,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.0	00	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	98.000.000,00	99.252.000,00	98.027.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		154.045.159,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.0	00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	390.693.710,00	340.388.810,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		631.236.840,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	3 Jenis	3 Jenis	1.524.628.325,00	208.157.871,00	208.157.871,00		-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Pegawai Dinas Sosial Kota Cirebon	2.407.002.406,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.0	00	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	560.534.735,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		589.411.599,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.0	00	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	364.093.590,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		1.267.875.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.0	00	05	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	17 Unit	200.000.000,00	99.998.114,00	99.998.114,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		156.204.963,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.0	00	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				16 Unit	8 Unit	200.000.000,00	78.847.162,00	70.560.592,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		165.375.000,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.0	00	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				16 Unit	5 Unit	200.000.000,00	29.312.595,00	29.312.595,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		228.135.844,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3 Jenis	3 Jenis	721.660.878,00	694.142.022,00	694.142.022,00		-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Pegawai Dinas Sosial Kota Cirebon	795.657.555,00	DINAS SOSIAL	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	10 Orang	31.500.000,00	9.999.970,00	6.999.970,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			33.075.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.0	00	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	50.000.000,00	24.999.918,00	24.999.918,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			82.687.500,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.0	00	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	-		1 Kelompok	1 Kelompok	497.625.000,00	314.998.738,00	314.998.738,00			-	1. Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Kota Cirebon		801.936.162,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.0	00	02	Pemberian Layanan Kedaruratan																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	37 Orang	45.000.000,00	44.999.583,00	39.399.583,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			37.043.884,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.0	00	03	Penyediaan Perumahan																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	200 Orang	160.000.000,00	129.999.715,00	129.999.515,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			386.445.960,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.0	00	05	Penyediaan Alat Bantu																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	15 Orang	50.000.000,00	29.999.735,00	29.347.640,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			110.250.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.0	00	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	60.000.000,00	48.639.759,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			110.250.000,00	DINAS SOSIAL

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				36224 Keluarga	11539 Keluarga	229.318.400,00	214.998.708,00	276.058.987,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			240.784.785,00	DINAS SOSIAL		
1	06	05	2.0	00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																			
						Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	60 Orang	50.859.000,00	24.988.644,00	16.225.800,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			53.401.415,00	DINAS SOSIAL		
##	1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana				100 Persen	100 Persen	321.824.750,00	322.199.433,00	302.695.874,00							434.805.606,00			
1	06	06	2.0	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Bantuan Sosial pangan, sandang dan psikososial	-			4 Jenis	4 Jenis	254.624.750,00	195.157.438,00	195.157.438,00			-	1. Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Kota Cirebon		267.356.024,00	DINAS SOSIAL		
1	06	06	2.0	00	Penyediaan Makanan																			
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	165.374.750,00	152.651.855,00	208.676.275,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			173.643.524,00	DINAS SOSIAL		
1	06	06	2.0	00	Penyediaan Sandang																			
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	26.250.000,00	24.999.745,00	24.999.745,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			27.562.500,00	DINAS SOSIAL		
1	06	06	2.0	00	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																			
						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Unit	1 Unit	36.750.000,00	10.192.838,00	5.109.109,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			38.587.500,00	DINAS SOSIAL		
1	06	06	2.0	00	Pelayanan Dukungan Psikososial																			
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	26.250.000,00	7.313.000,00	7.313.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan			27.562.500,00	DINAS SOSIAL		

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	06	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TAGANA yang berpartisipasi Masyarakat dalam pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana	-			45 Orang	45 Orang	67.200.000,00	127.041.995,00	127.041.995,00			-	1. Penanggulangan Kemiskinan	Masyarakat Kota Cirebon	167.449.582,00	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Orang	100 Orang	67.200.000,00	127.041.995,00	56.597.745,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan		167.449.582,00	DINAS SOSIAL
##	1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Komponen Utama dan Pendukung TMPN				25 Persen	25 Persen	147.736.147,00	87.999.779,00	87.999.604,00					222.574.582,00		
1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Komponen TMPN Yang terpelihara	-			1 Jenis	1 Jenis	147.736.147,00	87.999.779,00	87.999.779,00			-	1. Penanggulangan Kemiskinan	Taman Makam Pahlawan	222.574.582,00	DINAS SOSIAL
1	06	07	2.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	49.226.900,00	44.999.954,00	44.999.954,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan		51.687.661,00	DINAS SOSIAL
1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				15 Makam	15 Makam	60.000.000,00	19.999.910,00	19.999.910,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan		115.761.921,00	DINAS SOSIAL
1	06	07	2.01	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	38.509.247,00	22.999.915,00	22.999.740,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Penanggulangan Kemiskinan		55.125.000,00	DINAS SOSIAL
				DINAS TENAGA KERJA							11.852.355.550,00	12.911.984.250,00	12.395.546.684,00						0,00	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.852.355.550,00	12.911.984.250,00	12.395.546.684,00						0,00	
2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							11.852.355.550,00	12.911.984.250,00	12.395.546.684,00						0,00	
##	2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah/Indeks IKM terhadap kinerja dinas tenaga kerja			-	87,40 Persen		7.188.284.430,00	7.298.218.928,00	7.149.225.582,00						0,00	

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			5 Jenis	7 Jenis	136.386.850,00	136.385.964,00	136.385.964,00			-	-	Pegawai dan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	0,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	19.999.650,00	19.999.650,00	kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	2.140.000,00	2.139.936,00	2.139.936,00	kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	2.140.000,00	2.139.936,00	2.139.936,00	kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	2.140.000,00	2.139.936,00	2.139.936,00	kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD																	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	2.966.850,00	2.966.636,00	2.966.636,00	kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					8 Laporan	8 Laporan	35.000.000,00	34.999.900,00	34.999.693,00	kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10 Laporan	10 Laporan	72.000.000,00	71.999.970,00	71.999.556,00	kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-			4 Jenis	3 Jenis	4.900.630.390,00	4.937.298.841,00	4.937.298.841,00			-	-	Pegawai	0,00	DINAS TENAGA KERJA	

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	44.082.150,00	31.936.100,00	31.936.100,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA			
2	07	01	2.00	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	12 Laporan	177.133.500,00	207.593.675,00	145.472.535,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA			
2	07	01	2.00	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.475.295,00	40.475.680,00	17.267.680,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA			
2	07	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		5 Jenis	4 Jenis	437.193.400,00	525.333.622,00	525.333.622,00				Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon		0,00	DINAS TENAGA KERJA		
2	07	01	2.00	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit		0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA		
2	07	01	2.00	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	160.000.000,00		0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA		
2	07	01	2.00	07	05	Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	16 Unit	45.895.900,00	64.023.490,00	64.023.490,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA			
2	07	01	2.00	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6 Unit	30.000.000,00	153.227.625,00	100.505.375,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA			
2	07	01	2.00	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	27 Unit	156.297.500,00	143.737.327,00	115.837.766,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA			
2	07	01	2.00	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	13 Unit	45.000.000,00	164.345.180,00	100.503.611,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA			

No	Kode			Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	-			3 Jenis	3 Jenis	535.704.675,00	574.268.591,00	574.268.591,00			-	-		Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.0008	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																0,00	DINAS TENAGA KERJA
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	4.627.800,00	4.620.000,00	4.620.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.0008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																0,00	DINAS TENAGA KERJA
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	111.076.875,00	111.076.000,00	111.076.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.0008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																0,00	DINAS TENAGA KERJA
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	420.000.000,00	458.572.591,00	458.572.591,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			5 Jenis	4 Jenis	565.075.970,00	502.763.338,00	502.763.338,00			-	-		Masyarakat dan Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.0009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																0,00	DINAS TENAGA KERJA
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya				1 Unit	1 Unit	52.622.140,00	45.190.460,00	71.789.460,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.0009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																0,00	DINAS TENAGA KERJA
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	13 Unit	231.605.880,00	231.258.810,00	232.027.680,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.0009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																0,00	DINAS TENAGA KERJA
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	89 Unit	24.397.000,00	25.419.000,00	25.419.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																0,00	DINAS TENAGA KERJA
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	219.700.950,00	200.895.068,00	200.895.068,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	01	2.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																0,00	DINAS TENAGA KERJA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	36.750.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
##	2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD				-	1 Dokumen	240.000.000,00	109.999.685,00	23.167.855,00							0,00	
	2	07	02	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	-			25 Perusahaan	1 Dokumen	240.000.000,00	109.999.685,00	109.999.685,00			-	-	Masyarakat Kota Cirebon		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	02	2.001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																	
						Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	49.999.890,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	02	2.001	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																	
						Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				4 (Perusahaan) Orang	45 Orang	40.000.000,00	59.999.795,00	23.167.855,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
##	2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya				-	5 Persen	3.519.321.120,00	4.512.131.170,00	4.356.855.341,00							0,00	
	2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah alumni pelatihan yang bersertifikasi kompetensi	-			128 Orang	260 Orang	3.254.321.120,00	3.866.808.161,00	3.866.808.161,00			-	-	Masyarakat Kota Cirebon		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																	
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				240 Orang	210 Orang	2.530.324.000,00	3.496.824.500,00	3.496.824.317,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.001	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																	
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				1 Lembaga	0 Lembaga	30.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	03	2.001	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				15 Unit	15 Unit	693.997.120,00	369.983.661,00	369.963.243,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				650 Orang	650 Orang	29.000.000,00	28.999.865,00	28.707.995,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2.0	00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				300 Orang	300 Orang	150.000.000,00	149.999.602,00	146.582.528,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2.0	00	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				23 Orang	23 Orang	26.250.000,00	23.457.832,00	23.244.832,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2.0	00	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				10 Orang	10 Orang	29.000.000,00	28.999.875,00	25.732.145,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2.0	00	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LPTKS yang mendapatkan Pengawasan dan Pengendalian	-			1 Lembaga	0 Lembaga	3.000.000,00	2.999.808,00	2.999.808,00			-	-	Masyarakat Kota Cirebon		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2.0	00	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS														
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				1 Lembaga	0 Lembaga	3.000.000,00	2.999.808,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2.0	00	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja														
			Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan melalui aplikasi informasi pasar kerja online	-			1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	149.999.613,00	149.999.613,00			-	-	Masyarakat Kota Cirebon		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2.0	00	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2.0	00	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				350 Orang	350 Orang	150.000.000,00	149.999.613,00	144.855.803,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2	07	04	2.0	00	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pelatihan	-			35 Orang	216 Orang	126.250.000,00	126.249.460,00	126.249.460,00			-	-	Masyarakat Kota Cirebon		0,00	DINAS TENAGA KERJA

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)		Prioritas											
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				Jumlah Perselisihan yang Dicegah				8 Perkara	8 Perkara	50.000.000,00	49.999.970,00	31.909.835,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekirangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA			
2	07	05	2.00	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
				Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				10 Perkara	10 Perkara	20.000.000,00	19.999.850,00	19.853.159,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekirangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA			
2	07	05	2.00	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
				Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	25.000.000,00	24.999.800,00	18.708.765,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekirangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA			
2	07	05	2.00	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
				Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	150.000.000,00	214.679.908,00	204.327.748,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekirangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA			
2	07	05	2.00	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
				Terkelaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				3100 Orang	3100 Orang	50.000.000,00	49.999.770,00	31.125.835,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekirangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA			
				DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN								20.548.259.644,00	19.296.642.970,00	19.853.081.050,00					0,00				
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								14.961.672.049,00	15.307.711.546,00	15.692.107.326,00					0,00				
2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								14.961.672.049,00	15.307.711.546,00	15.692.107.326,00					0,00				
##	2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah			84,50 Poin	88,20 Poin	13.417.422.768,00	14.157.280.579,00	14.112.091.190,00							0,00				
2	09	01	2.01	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah	-		7 jenis	100 Persen	80.748.072,00	80.030.047,00	80.030.047,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
2	09	01	2.00	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	20.389.800,00	15.146.116,00	15.146.116,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
2	09	01	2.00	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas								
							Sebelum	Sesudah							Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	78.151.973,00	76.858.000,00	76.858.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
2	09	01	2.0				65 Orang	100 Persen	84.500.000,00	62.699.140,00	62.699.140,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
2	09	01	2.0	00			Pengadaan Pakaiin Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
			Jumlah Paket Pakaiin Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	1 Paket	84.500.000,00	62.699.140,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
2	09	01	2.0	6			6 Jenis	100 Persen	849.901.679,00	969.648.508,00	969.648.508,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
2	09	01	2.0	00			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	79.947.737,00	80.976.625,00	80.976.625,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
2	09	01	2.0	00			Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.800.000,00	5.118.288,00	959.679,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
2	09	01	2.0	00			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46.896.162,00	65.496.974,00	47.956.561,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
2	09	01	2.0	00			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	247.472.400,00	291.066.000,00	188.316.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
2	09	01	2.0	00			Fasilitasi Kunjungan Tamu																

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	521.066.854,00	585.031.158,00	585.031.158,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
2	09	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai fasilitasi kinerja ASN pada Perangkat Daerah	-			4 Jenis	100 Persen	654.307.000,00	887.364.263,00	887.364.263,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
2	09	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	46.440.300,00	46.191.000,00	46.191.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
2	09	01	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				51 Unit	45 Unit	442.693.700,00	481.530.000,00	428.190.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
2	09	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	3 Unit	125.000.000,00	319.374.263,00	130.027.160,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
2	09	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				75 Unit	92 Unit	40.173.000,00	40.269.000,00	39.575.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
#	2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi Skor PPH Ketersediaan				20,00 100 220 Persen gr/kap/hari	92,58 93 Poin	746.223.519,00	798.777.725,00	1.307.397.697,00							0,00			
2	09	03	2.0	1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan informasi harga pangan, ketersediaan pangan dan Neraca Bahan Makanan	-			1 Dokumen	100 Persen	249.203.947,00	348.150.317,00	348.150.317,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				28 Ton	30 Ton	25.575.250,00	20.712.750,00	33.820.540,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2	09	03	2.0	4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pemenuhan informasi pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-			1 Dokumen/Laporan	100 Persen	332.444.322,00	165.914.658,00	165.914.658,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2	09	03	2.0	00	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
						Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	160.955.700,00	99.889.797,00	99.576.997,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2	09	03	2.0	00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	159.488.622,00	61.289.079,00	60.239.079,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2	09	03	2.0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	4.735.782,00	875.782,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
##	2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan				100 Persen	18,18 Persen	542.149.822,00	201.644.432,00	143.818.323,00							0,00		
2	09	04	2.0	1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase ketersediaan data berupa peta ketahanan pangan Kota Cirebon	-			1 Dokumen	100 Persen	50.262.072,00	45.437.182,00	45.437.182,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2	09	04	2.0	00	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.262.072,00	45.437.182,00	6.711.450,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				5 Dokumen	5 Dokumen	12.000.000,00	15.718.248,00	3.125.700,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
2	09	05	2.0	00	1	07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	99.998.884,00	98.598.884,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
2	09	05	2.0	00	1	08	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
						Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	1 Laporan	30.189.688,00	14.999.046,00	12.402.900,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
2	09	05	2.0	00	1	09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
						Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				5 Dokumen	5 Dokumen	24.879.000,00	19.292.632,00	14.672.632,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.586.587.595,00	3.988.931.424,00	4.160.973.724,00							0,00				
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2.113.221.100,00	1.605.709.860,00	1.576.133.964,00							0,00				
##	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			4242 Ton	5.090,40 Ton	354.613.406,00	198.683.950,00	184.503.950,00							0,00				
3	25	03	2.0	1		Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat	-		1 Dokumen	100 Persen	15.000.000,00	0,00	0,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
3	25	03	2.0	00	1	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
						Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
3	25	03	2.0	2		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas nelayan kecil	-		4 Kelompok	100 Persen	280.252.550,00	145.334.350,00	145.334.350,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu indikatif (Rp)						
							Sebelum	Sesudah			RKPD 2025	APBD 2025			Nasional	Daerah									
1	3	25	03	2.0	00	2	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil												17	18	19	20		
								Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya					20 Orang	20 Orang	256.252.550,00	25.785.500,00	25.285.500,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.0	00	2	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
								Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya					2 Kelompok	2 Kelompok	12.000.000,00	19.059.075,00	19.059.075,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.0	00	2	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
								Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha					3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	12.000.000,00	100.489.775,00	100.489.775,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.0	03			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-				4 TPI	33,33 Persen	59.360.856,00	53.349.600,00	53.349.600,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.0	00	3	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
								Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					3 Dokumen	3 Dokumen	27.570.372,00	23.978.400,00	23.978.400,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.0	00	3	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
								Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					3 Layanan	3 Layanan	31.790.484,00	29.371.200,00	15.691.200,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
##	3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya					276 Ton	376,5 Ton	1.592.704.422,00	1.192.526.165,00	1.179.637.973,00							0,00	
3	25	04	2.0	2			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase peningkatan kapasitas pembudidayaan ikan kecil	-				4 Kelompok	55 Persen	1.047.704.422,00	365.808.109,00	365.808.109,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	04	2.0	00	2	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
								Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas					1 Kelompok	1 Kelompok	735.704.422,00	31.808.189,00	16.528.150,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	04	2.0	00	2	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				3 Kelompok	3 Kelompok	312.000.000,00	333.999.920,00	333.999.825,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	25	04	2.0	4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pengelolaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan	-			4 Jenis	50 Persen	545.000.000,00	826.718.056,00	826.718.056,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	25	04	2.0	00 4 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00		0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	25	04	2.0	00 4 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	262.000.000,00	606.646.978,00	639.646.920,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
##	3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan				8200 Ton	39,05 Kg/Kap/Tahun	165.903.272,00	214.499.745,00	211.992.041,00							0,00		
3	25	06	2.0	3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi	-			10.000 Ton	1 Laporan	165.903.272,00	214.499.745,00	214.499.745,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	25	06	2.0	00 3	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.000 Ton	8.200 Ton	72.050.000,00	163.181.979,00	163.181.729,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	25	06	2.0	00 3 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				50 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	93.853.272,00	51.317.766,00	48.810.312,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							3.473.366.495,00	2.383.221.564,00	2.584.839.760,00								0,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas											
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
##	3	27	02				5,00 Persen	1.376 9.381 Ton Ton	2.526.346.549,00	1.548.556.648,00	1.755.695.631,00							0,00					
	3	27	02	2.0.1			1 Laporan	100 Persen	574.089.800,00	166.594.644,00	166.594.644,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
	3	27	02	2.0.00.1.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
							3 Laporan	3 Laporan	574.089.800,00	166.594.644,00	182.140.077,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
	3	27	02	2.0.2			1 Laporan	49 Persen	1.460.256.749,00	992.422.004,00	992.422.004,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
	3	27	02	2.0.00.2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
							12 Dokumen	12 Dokumen	712.755.770,00	579.862.622,00	771.462.381,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
	3	27	02	2.0.4			1 Laporan	100 Persen	12.000.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
	3	27	02	2.0.00.4.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan																		
							4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	2.950.000,00	2.944.690,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
##	3	27	03				100 Persen	2,69 Ha	235.811.780,00	178.273.634,00	198.523.589,00							0,00					
	3	27	03	2.0.1			1 Laporan	11 Persen	68.688.500,00	28.267.901,00	28.267.901,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
	3	27	03	2.0.00	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	68.688.500,00	28.267.901,00	39.517.720,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	27	03	2.0	2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pemeliharaan prasarana pertanian	-			3 Unit	100 Persen	167.123.280,00	150.005.733,00	150.005.733,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	27	03	2.0	00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
						Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	65.505.850,00	78.855.415,00	77.855.415,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
##	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)				70 Persen	70 Persen	577.047.286,00	546.378.069,00	495.507.432,00							0,00		
3	27	04	2.0	1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase penjaminan kesehatan hewan	-			1 Laporan	100 Persen	120.000.000,00	140.730.813,00	140.730.813,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	27	04	2.0	00	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	140.730.813,00	113.394.751,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	27	04	2.0	4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	-			1 Laporan	70 Persen	323.044.089,00	284.638.762,00	284.638.762,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	27	04	2.0	00	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
						Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	73.849.550,00	56.462.131,00	51.072.318,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas								
							Sebelum	Sesudah			2025	2025				RKPD Perubahan 2025	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
##	3	27	05				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan bencana pertanian	-			50,00 Persen	56,6 Persen	39.329.750,00	20.016.826,00	14.696.721,00			0,00					
3	27	05	2.0	1			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	-			1 Laporan	1 Laporan	39.329.750,00	20.016.826,00	20.016.826,00	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
3	27	05	2.0	00	1	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
								Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-			60 Ha	60 Ha	39.329.750,00	20.016.826,00	14.696.721,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
##	3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	-			500 Poin	100 Persen	94.831.130,00	89.996.387,00	120.416.387,00				0,00				
3	27	07	2.0	1			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh dan petani	-			1 Laporan	1 Laporan	94.831.130,00	89.996.387,00	89.996.387,00	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
3	27	07	2.0	00	1	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																	
								Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-			1 Unit	1 Unit	31.962.000,00	19.996.747,00	50.416.747,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	27	07	2.0	00	1	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																	
								Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-			3 Unit	3 Unit	42.970.468,00	44.999.821,00	44.999.821,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3	27	07	2.0	00	1	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																	
								Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	-			1 Unit	1 Unit	19.898.662,00	24.999.819,00	24.999.819,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
								UPT Rumah Potong Hewan	-					20.548.259.644,00	19.296.642.970,00	19.853.081.050,00					0,00			
3							URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		-					5.586.587.595,00	3.988.931.424,00	4.160.973.724,00					0,00			
3	27						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		-					3.473.366.495,00	2.383.221.564,00	2.584.839.760,00					0,00			

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah			2025					Nasional				Daerah	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
##	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B			100 Persen	2,69 Ha	235.811.780,00	178.273.634,00	198.523.589,00							0,00			
	3	27	03	2.0	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pemeliharaan prasarana pertanian	-		3 Unit	100 Persen	167.123.280,00	150.005.733,00	150.005.733,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
	3	27	03	2.0	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
						Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi			1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
##	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)			70 Persen	70 Persen	577.047.286,00	546.378.069,00	495.507.432,00							0,00			
	3	27	04	2.0	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	-		1 Laporan	70 Persen	323.044.089,00	284.638.762,00	284.638.762,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
	3	27	04	2.0	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
						Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			12 Laporan	12 Laporan	249.194.539,00	228.176.631,00	212.191.869,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
					UPT Pelayanan Veteriner																	0,00	
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.586.587.595,00	3.988.931.424,00	4.160.973.724,00							0,00			
	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						3.473.366.495,00	2.383.221.564,00	2.584.839.760,00							0,00			
##	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)			70 Persen	70 Persen	577.047.286,00	546.378.069,00	495.507.432,00							0,00			
	3	27	04	2.0	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	-		1 Laporan	100 Persen	134.003.197,00	121.008.494,00	121.008.494,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
	3	27	04	2.0	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																		
						Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium			12 Laporan	12 Laporan	67.534.075,00	57.533.841,00	55.373.841,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
							Sebelum	Sesudah						Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	3	27	04	2	0	00	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner															
							12 Laporan	12 Laporan	66.469.122,00	63.474.653,00	63.474.653,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
							UPT Balai Pengembangan Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura			20.548.259.644,00	19.296.642.970,00	19.853.081.050,00						0,00				
	3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.586.587.595,00	3.988.931.424,0	4.160.973.724,00						0,00				
	3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			3.473.366.495,00	2.383.221.564,0	2.584.839.760,00						0,00				
##	3	27	02				5,00 Persen	1.376 9.381 Ton	2.526.346.549,00	1.548.556.648,0	1.755.695.631,00							0,00				
	3	27	02	2.0	2		1 Laporan	49 Persen	1.460.256.749,00	992.422.004,00	992.422.004,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
	3	27	02	2.0	2		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman															
												Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
	3	27	02	2	0	00	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman															
							1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	120.000.000,00	19.999.749,00	19.999.749,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
##	3	27	03				100 Persen	2,69 Ha	235.811.780,00	178.273.634,00	198.523.589,00							0,00				
	3	27	03	2.0	2		3 Unit	100 Persen	167.123.280,00	150.005.733,00	150.005.733,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
	3	27	03	2.0	0	00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya															
							1 Unit	1 Unit	51.617.430,00	71.150.318,00	81.150.454,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			
							UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar			20.548.259.644,00	19.296.642.970,00	19.853.081.050,00						0,00				
	3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.586.587.595,00	3.988.931.424,0	4.160.973.724,00						0,00				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)									
							Sebelum	Sesudah																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2.113.221.100,00	1.605.709.860,00	1.576.133.964,00								0,00					
#	3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya			276 Ton	376,5 Ton	1.592.704.422,00	1.192.526.165,00	1.179.637.973,00							0,00					
	3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	-	4 Jenis	50 Persen	545.000.000,00	826.718.056,00	826.718.056,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
3	25	04	2.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Unit	1 Unit	271.000.000,00	220.071.078,00	189.463.078,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
				UPT Balai Pengembangan Ternak Potong						20.548.259.644,00	19.296.642.970,00	19.853.081.050,00							0,00					
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.586.587.595,00	3.988.931.424,00	4.160.973.724,00							0,00					
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						3.473.366.495,00	2.383.221.564,00	2.584.839.760,00							0,00					
#	3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Komoditas Peternakan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura			5,00 Persen	9.381 1.376 Ton Ton	2.526.346.549,00	1.548.556.648,00	1.755.695.631,00							0,00					
	3	27	02	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan benih berkualitas	-	1 Laporan	49 Persen	1.460.256.749,00	992.422.004,00	992.422.004,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
3	27	02	2.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			12 Dekumen	12 Dokumen	343.761.840,00	228.353.783,00	228.353.110,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
3	27	02	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang dihasilkan	-		80 Ekor	15 Ekor	480.000.000,00	386.590.000,00	386.590.000,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
3	27	02	2.0006	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			300 Ton	122,35 Ton	480.000.000,00	386.590.000,00	386.590.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP						48.215.530.405,00	45.680.485.424,00	47.003.821.903,00							46.289.916.634,00					
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						48.215.530.405,00	45.680.485.424,00	47.003.821.903,00							46.289.916.634,00					
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						48.215.530.405,00	45.680.485.424,00	47.003.821.903,00							46.289.916.634,00					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025				Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah			
1.	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
##	2	11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah			82 Poin	86,5 Poin	27.327.220.465,00	28.107.980.953,00	26.148.488.744,00						29.591.268.775,00		
	2	11 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		4 Jenis	4 Jenis	96.570.000,00	113.626.357,00	113.626.357,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon		127.597.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11 01 2.0 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	5 Dokumen	0,00	59.171.607,00	24.929.065,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			8.470.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2		NON URUSAN						48.215.530.405,00	45.680.485.424,00	47.003.821.903,00								
	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						48.215.530.405,00	45.680.485.424,00	47.003.821.903,00								
##	2	11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah			82 Poin	86,5 Poin	27.327.220.465,00	28.107.980.953,00	26.148.488.744,00						29.591.268.775,00		
	2	11 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		4 Jenis	4 Jenis	96.570.000,00	113.626.357,00	113.626.357,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon		127.597.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11 01 2.0 0 1 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						48.215.530.405,00	45.680.485.424,00	47.003.821.903,00								
	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						48.215.530.405,00	45.680.485.424,00	47.003.821.903,00								
##	2	11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah			82 Poin	86,5 Poin	27.327.220.465,00	28.107.980.953,00	26.148.488.744,00						29.591.268.775,00		
	2	11 01 2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		4 Jenis	4 Jenis	96.570.000,00	113.626.357,00	113.626.357,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon		127.597.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11 01 2.0 0 1 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	3.850.000,00	2.999.640,00	4.114.470,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			4.235.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11 01 2.0 0 0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
								Sebelum	Sesudah							Nasional	Daerah				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.296.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		7.045.245,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			8	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	255.240.000,00	255.240.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		263.091.583,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	965.000.000,00	1.041.024.687,00	1.041.270.455,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		1.185.759.176,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			4 Jenis	4 Jenis	1.093.111.340,00	826.250.430,00	826.250.430,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon	1.038.236.728,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			01	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	49.597.500,00	42.808.000,00	42.808.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		60.368.105,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	73 Unit	582.049.840,00	569.878.000,00	569.866.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		705.005.024,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			09	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	3 Unit	400.000.000,00	150.020.430,00	252.855.473,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		200.000.000,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			10	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	152 Unit	61.464.000,00	63.544.000,00	63.544.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		72.863.599,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
##	2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti			75,00 Persen	100 persen	465.000.000,00	398.692.671,00	196.626.292,00						95.000.000,00			

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	11	02	2.0.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	1 Dokumen	215.000.000,00	192.499.492,00	192.499.492,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	RPPLH Kota Cirebon		95.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.0.00.1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	215.000.000,00	192.499.492,00	196.626.292,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			95.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.0.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun	-			2 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	206.193.179,00	206.193.179,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	KLHS Kota Cirebon		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.0.00.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	206.193.179,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
#	2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan				10,00 Persen	17,1 Persen	709.916.309,00	423.773.063,00	373.340.859,00						1.564.118.140,00		
2	11	03	2.0.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-			5 Dokumen	5 Dokumen	475.000.000,00	236.157.208,00	236.157.208,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Kota Cirebon		1.130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.0.00.1.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	117.372.090,00	112.253.916,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			375.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.0.00.1.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	106.234.357,00	75.741.652,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			365.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.0.00.1.11	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	12.550.761,00	11.770.761,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				35 Dokumen	35 Dokumen	69.313.336,00	60.853.475,00	15.973.475,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			75.217.592,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	06	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																	
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				4 Orang	4 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	06	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				80 Badan Usaha	80 Badan Usaha	107.000.000,00	69.145.475,00	68.385.337,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			75.482.967,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
#	2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase inventarisasi potensi keberadaan MHA yang terkait dengan PPLH		60,00 Persen	0 Persen	175.000.000,00	0,00	0,00							65.368.151,00		
2	11	07	2.0	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Inventarisasi data dan Informasi Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	-	1 Dokumen	0 Dokumen	175.000.000,00	0,00	0,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Kota Cirebon		65.368.151,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	07	2.0	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			65.368.151,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
##	2	11	08				26,67 Persen	60 persen	257.128.026,00	163.960.700,00	162.575.956,00							59.512.500,00	
2	11	08	2.01				2 Kali	2 Kali	257.128.026,00	163.960.700,00	163.960.700,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Kelompok Masyarakat Kota Cirebon		59.512.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	2.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup															
							1 Dokumen	1 Dokumen	125.564.530,00	115.632.775,00	140.058.031,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			33.062.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	2.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat															
							2 Lembaga	2 Lembaga	131.563.496,00	48.327.925,00	22.517.925,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			26.450.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
##	2	11	09				22,22 Persen	8,33 persen	300.000.000,00	228.411.358,00	158.160.194,00							215.765.750,00	
2	11	09	2.01				3 Penghargaan	3 Penghargaan	300.000.000,00	228.411.358,00	228.411.358,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Sekolah,RW,SKPD Kota Cirebon		215.765.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	2.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup															
							3 Entitas	2 Entitas	300.000.000,00	228.411.358,00	158.160.194,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			215.765.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				40 Kelompok	40 Kelompok	80.499.668,00	69.999.247,00	56.766.647,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.0	00	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				3 Unit	164 Unit	1.160.000.000,00	246.430.148,00	2.724.072.970,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			3.423.233.477,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.0	00	08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota													
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				3 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	40.005.500,00	2.316.149,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.0	00	11	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota													
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				2 Dokumen	2 Dokumen	132.249.405,00	54.950.717,00	34.934.550,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.0	00	17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan													
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				24 Ton	24 Ton	535.207.358,00	429.977.206,00	395.253.325,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			590.568.938,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.0	00	18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah													
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				4 Laporan	4 Laporan	80.499.508,00	39.948.568,00	19.900.483,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Demozusuan Akhir				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		3.887.388.993,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	11	2.0	00	1	12	Penanganan sampah melalui pengangkutan															
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				53093 Ton	63873 Ton	4.620.000.000,00	4.493.665.543,00	4.403.842.869,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		846.080.677,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	11	2.0	00	1	15	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah															
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				75 Unit	58 Unit	3.780.000.000,00	3.563.165.695,00	3.511.021.814,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	11	2.0	00	1	16	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah															
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				71 Persentase	71 Persentase	3.990.000.000,00	4.104.269.011,00	3.982.764.504,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	11	2.0	00	1	21	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan															
			jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan				60 Dokumen	60 Dokumen	97.749.523,00	0,00	0,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		182.861.493,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						8.701.262.178,00	9.151.181.392,00	8.889.996.356,00							8.701.262.178,00				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.701.262.178,00	9.151.181.392,00	8.889.996.356,00							8.701.262.178,00				
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						8.701.262.178,00	9.151.181.392,00	8.889.996.356,00							8.701.262.178,00				
##	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah		86,25 Poin	49,25 skor	7.734.315.830,00	8.225.644.523,00	8.248.456.843,00				7.842.262.178,00					

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	01	2.01	-			5 jenis	7 jenis	245.322.216,00	230.346.026,00	230.346.026,00			Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Pegawai Didukcapil		209.285.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	7 Dokumen	21.115.000,00	32.910.700,00	20.976.700,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			18.285.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			1.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			1.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD															
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			1.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah			12	13			Nasional	Daerah			18		19	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			1.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01	2.0	00	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			173.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	207.207.216,00	172.824.816,00	103.307.700,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			173.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01	2.0	00	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	11.400.000,00	18.610.510,00	15.506.510,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01	2.0	00	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-			2 jenis	3 jenis	4.508.381.268,00	4.860.743.798,00	4.860.743.798,00			Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Pegawai Disdukcapi		4.958.127.178,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01	2.0	00	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.502.661.268,00	4.852.596.818,00	5.207.356.916,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			4.951.127.178,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			

[illegible]

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.840.000,00	6.860.600,00	6.860.600,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0 3	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.090.000,00	9.526.600,00	9.526.600,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	-		110 orang	43 orang	40.026.500,00	66.148.325,00	66.148.325,00		Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		Pegawai Disudkapil		81.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0 5	00 02	Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
				Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	27.942.000,00	56.269.500,00	9.971.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0 5	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				110 Orang	50 Orang	12.084.500,00	9.878.825,00	8.000.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			6.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0 0	00 14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Prioritas			Target	Pagu indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	239.734.060,00	218.947.000,00	218.638.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.0 00 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.0 00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	3 Unit	38.167.000,00	10.809.850,00	10.809.850,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.0 00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5 Unit	5 Unit	47.495.000,00	48.512.000,00	49.496.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			38.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.0 00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	9.559.200,00	15.486.960,00	15.486.960,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperko koh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
# 2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persentase Kepemilikan Identittas Kependudukan Digital			75,60 Person	62,00 8,00 persen persen	238.288.976,00	258.287.716,00	183.534.961,00							204.000.000,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp) RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Sebelum	Sesudah						Nasional		Daerah			
1	2	08	02	2.0 1	-		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Pelembagaan Pengrusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang menyusun PPRG			Perangkat Daerah	22 Perangkat Daerah	47.663.125,00	47.662.653,00	47.662.653,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Perangkat Daerah, Masyarakat	50.046.280,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	02	2.0 00 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengrusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	21.393.455,00	21.393.357,00	7.151.575,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		22.393.455,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	02	2.0 00 06	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																
					Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG			22 Orang	22 Orang	26.269.670,00	26.269.296,00	8.762.887,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		27.652.825,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	02	2.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	-		4 Organisasi	4 Organisasi	68.196.175,00	68.196.016,00	68.196.016,00			-	-	Organisasi Perempuan	71.605.985,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08	02	2.0 00 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																
					Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			20 Organisasi	20 Organisasi	68.196.175,00	68.196.016,00	24.009.025,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		71.605.985,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
#	2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dari TPPO yang Mendapatkan Layanan Krimogabasis			100 Persen	100 Persen	242.632.828,00	242.632.601,00	160.359.875,00						255.164.469,00		

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah						Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	49.999.867,00	31.100.760,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
##	2	08 05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				20,00 Persen	20 Persen	65.000.000,00	20.715.719,00	8.632.100,00							68.000.000,00	
	2	08 05	2.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				7 PD	7 PD	65.000.000,00	20.715.719,00	20.715.719,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDS dan Tuberkulosis.	Perangkat Daerah di Kota Cirebon		68.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08 05	2.0 1	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																
				Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	20.715.719,00	8.632.100,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDS dan Tuberkulosis.			68.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
##	2	08 06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PPHA)				460 poin	67,44 Angka	203.000.000,00	246.775.476,00	160.720.926,00							211.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nongovernmental, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PD, LM, DU dan Media yang melaksanakan pemenuhan hak anak	-			58 PD/LM/DU /Media	58 PD/LM/DU/Media	63.000.000,00	97.873.522,00	97.873.522,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	PD, LM, DU dan Media yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak		66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	08.06.2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				2 Organisasi	2 Organisasi	63.000.000,00	97.873.522,00	70.237.322,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

[illegible]

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen mekanisme pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Cirebon	-			5 Dokumen	5 Dokumen	42.000.000,00	115.564.730,00	115.564.730,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	Lembaga Penyelenggara Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak		34.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	08	07	2.001	04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
					Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				35 Orang	30 Orang	42.000.000,00	115.564.730,00	72.912.184,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			34.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana					Nasional	Daerah				
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	-			14 Laporan	14 Laporan	4.000.000,00	2.234.885,00	2.234.885,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2	14	01	2.0	3			1 Jenis	1 Jenis	40.000.000,00	39.609.000,00	39.609.000,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	DP3APPKB Kota Cirebon		42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2	14	01	2.0	00			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-			1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	39.609.000,00	39.609.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2	14	01	2.0	5			40 Orang	40 Orang	30.000.000,00	77.459.500,00	77.459.500,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	DP3APPKB Kota Cirebon		42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2	14	01	2.0	00			Pengadaan Pakaiannya																
			Jumlah Paket Pakaiannya	-			1 Paket	5 Paket	30.000.000,00	77.459.500,00	22.055.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2	14	01	2.0	6			8 Jenis	8 Jenis	491.000.000,00	900.053.212,00	900.053.212,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	DP3APPKB Kota Cirebon		525.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2	14	01	2.0	00			Penyediaan Komponen Instalasi																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	1 Laporan	0,00	64.800.000,00	64.800.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOXB-KB	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	02	2.0	00	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	1 Dokumen	0,00	60.195.000,00	60.195.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOXB-KB	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	02	2.0	00	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
						Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				2 Unit	2 Unit	33.000.000,00	32.999.443,00	14.614.830,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		36.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	02	2.0	00	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
						Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	54.450.000,00	54.449.582,00	4.664.900,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		59.859.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
#	2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)				64,62 Persen	62,60 15,4 Persen	2.959.928.157,00	1.624.275.550,00	1.610.440.550,00						3.219.174.565,00			

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pemangku Kebijakan yang mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana	-				4 Lembaga	4 Lembaga	1.100.000.000	513.972.500,00	513.972.500,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan Aids dan Tuberkulosis.	Organisasi, Lembaga, Institusi		1.150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.00	Pengendalian Program KKBPK																		
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK					1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	53.159.875,00	53.159.875,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOXB-KB	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.00	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana																		
					Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					5 Unit	5 Unit	360.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOXB-KB	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			365.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.00	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					5 Laporan	5 Laporan	155.000.000,00	194.999.900,00	194.999.900,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOXB-KB	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.00	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					10 Laporan	10 Laporan	75.000.000,00	74.999.925,00	74.999.925,00	-	DAK Non Fisik-BOXB-KB	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
							Sebelum	Sesudah			RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	2	14	03	2.0	00	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
								Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	3 Dokumen	230.000.000,00	80.812.800,00	80.812.800,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOXB-KB	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			245.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.0	00	13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
								Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOXB-KB	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.0	00	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
								Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				4 Organisasi	4 Organisasi	100.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOXB-KB	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.0	00	2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah kelurahan yang mendapatkan pembinaan oleh tenaga penyuluh	-			22 kelurahan	22 kelurahan	325.000.000,00	223.473.000,00	223.473.000,00		-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	Masyarakat binaan, PKB/PLKB/TPD		375.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.0	00	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
								Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				88 Orang	88 Orang	325.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOXB-KB	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

[illegible]

[illegible]

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)					-	1 Laporan / Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKB-KB	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	04	2.0	00	1	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					-	1 Laporan	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKB-KB	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	04	2.0	00	1	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia					-	9 Unit	0,00	117.000.000,00	117.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKB-KB	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	04	2.0	00	1	21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																	
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)					2 Laporan	2 Laporan	95.000.000,00	197.003.099,00	92.002.213,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	04	2.0	00	1	24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																	
					Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan					771 Orang	0 Orang	1.905.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKB-KB	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2	14	04	2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah mitra kerja yang berpartisipasi dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-			15 Mitra Kerja	15 Mitra Kerja	253.649.699,00	1.847.846.600,00	1.847.846.600,00			-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.	15 Mitra Kerja			267.224.134,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.00	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	1 Laporan	253.649.699,00	151.646.600,00	59.201.600,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.				267.224.134,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.00	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	771.000.000,00	771.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOXB-KB	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.00	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	0,00	925.200.000,00	925.200.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOXB-KB	-	2. Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan AIDs dan Tuberkulosis.				0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					DINAS PERHUBUNGAN						33.348.144.354,00	31.167.738.737,00	34.286.468.665,00									36.836.343.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						33.348.144.354,00	31.167.738.737,00	34.286.468.665,00									36.836.343.000,00
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						33.348.144.354,00	31.167.738.737,00	34.286.468.665,00									36.836.343.000,00
##	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan			90 Persen	90 Persen	23.987.808.674,00	25.903.224.002,00	26.035.146.699,00									26.209.100.000,00
2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			7 Jenis	7 Jenis	301.600.000,00	298.870.309,00	298.870.309,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim			310.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Sebelum	Sesudah						Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	15	01	2.0	00			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
							2 Dokumen	2 Dokumen	4.800.000,00	4.661.189,00	4.661.189,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			4.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
							1 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	2.999.900,00	2.999.900,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			1.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
							1 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	2.999.900,00	2.999.900,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			1.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
							1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	2.999.900,00	2.999.900,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			1.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
							1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	2.999.900,00	2.999.900,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			1.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
							1 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	2.999.900,00	2.999.900,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			1.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
							1 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	2.999.900,00	2.999.900,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			1.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
							3 Laporan	3 Laporan	270.000.000,00	237.390.000,00	138.590.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			277.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
							7 Laporan	7 Laporan	5.800.000,00	6.827.000,00	6.827.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			5.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.0	00															

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							1 Paket	5 Paket	85.000.000,00	338.448.985,00	179.390.725,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			6 Jenis	6 Jenis	413.422.160,00	394.853.340,00	394.853.340,00		-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Menurunnya Dampak Perubahan iklim		517.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	2.0006.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6 Paket	56.722.160,00	56.537.188,00	45.614.741,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			63.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.0006.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	3.400.000,00	12.520.635,00	12.695.206,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			3.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.0006.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	53.300.000,00	48.896.021,00	51.036.021,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			63.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.0006.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	110.000.000,00	123.606.000,00	69.591.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			127.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.0006.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.795.016,00	18.116.008,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			25.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	335.400.000,00	338.524.000,00	354.048.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			369.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.0	00	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	100.000.000,00	453.326.954,00	664.199.823,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			124.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.0	00	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	15.200.000,00	22.387.688,00	36.000.148,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			17.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.0	00	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	18.622.160,00	14.808.000,00	23.726.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			17.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
##	2	15	02	2.0		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Bertambahnya Jumlah Lokasi Parkir Yang dikelola Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Bertambahnya Titik PJU			8054 66 327 1,5 130 0,62 Titik Persen Lokasi Kejadian Rasio	0,62 130 327 66 1,5 8054 Rasio Kejadian Lokasi Persen Persen Titik	9.360.335.680,00	5.264.514.735,00	8.251.321.966,00							10.627.243.000,00		
2	15	02	2.0	1		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	-		1 Jenis	1 Jenis	150.000.000,00	0,00	0,00			-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.0	00	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			Jumlah Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				8100 Unit	8054 Unit	930.000.000,00	977.449.548,00	3.479.533.878,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.			968.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK						20.388.368.340,00	23.055.133.314,00	22.066.000.774,00							23.227.546.788,00					
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						20.388.368.340,00	23.055.133.314,00	22.066.000.774,00							23.227.546.788,00					
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						19.196.500.752,00	21.163.266.172,00	20.479.767.209,00							22.115.008.953,00					
##	2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				83 Persen	83 Persen	11.518.542.560,00	13.089.727.779,00	13.034.083.123,00					12.458.108.888,00				
2	16	01	2.0	1	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			7 Jenis	7 Jenis	192.976.389,00	193.837.516,00	193.837.516,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	133.355.039,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
2	16	01	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	13.996.875,00	14.242.220,00	7.242.220,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		40.506.588,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
2	16	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.687.350,00	3.648.324,00	1.898.324,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		9.491.064,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
2	16	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.637.950,00	3.648.324,00	1.898.324,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		7.815.767,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
2	16	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.637.850,00	3.648.324,00	1.898.324,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		8.247.196,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
2	16	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.637.850,00	3.648.324,00	1.898.324,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		7.821.248,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	16	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.860.000,00	12.961.620,00	7.711.620,00	kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		31.932.705,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	16	01	2.0	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	147.518.514,00	152.040.380,00	48.560.194,00	kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		27.540.471,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	16	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Informasi Keuangan prangkat Daerah	-		3 Jenis	3 Jenis	8.150.657.621,00	9.379.679.566,00	9.379.679.566,00		-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	9.168.923.605,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
2	16	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	71 Orang/bulan	8.142.432.521,00	9.371.370.622,00	9.739.902.552,00	kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		9.159.387.669,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	16	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.993.000,00	2.976.800,00	1.276.800,00	kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		3.471.601,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	16	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.232.100,00	5.332.144,00	2.332.144,00	kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		6.064.335,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/lokus				73 Media	73 Media	1.770.820.752,00	1.332.088.840,00	1.383.990.640,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			235.258.665,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	16	02	2.0	00	22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik																	
						Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	25.774.850,00	25.774.660,00	18.724.660,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			6.366.937,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	16	02	2.0	00	23	Penyusunan Konten																	
						Jumlah Konten Informasi Publik				365 Konten	365 Konten	124.846.786,00	169.569.000,00	281.747.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			137.643.858,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	16	02	2.0	00	24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																	
						Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				64 Orang	64 Orang	28.786.500,00	29.100.300,00	127.945.300,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			50.700.620,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
##	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DKIS Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi			30 100 Persen Persen	100 30 Persen Persen	3.318.774.798,00	3.441.170.933,00	2.874.977.084,00							5.964.703.737,00		
	2	16	03	2.0	1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya koneksi jaringan intranet di seluruh Perangkat Daerah (32 PD dan 22 kelurahan)	-		32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	103.769.000,00	103.767.125,00	103.767.125,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		114.497.216,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2	16	03	2.0	00	04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																	
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	103.769.000,00	103.767.125,00	63.694.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			114.497.216,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah			2025	2025					Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Jenis	6 Jenis	83.810.823,00	43.959.464,00	43.959.464,00			5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	DUKUMPP Kota Cirebon		88.001.362,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
2	17	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7 Dokumen	31.459.276,00	22.748.520,00	15.824.225,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			33.032.240,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.155.874,00	3.420.025,00	2.341.225,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			4.363.667,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.883.038,00	2.435.025,00	1.611.015,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			3.027.189,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.018.923,00	2.264.454,00	1.132.227,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			3.169.869,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																		
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.504.913,00	1.035.525,00	801.315,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			1.580.158,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	31 Laporan	40.788.799,00	12.055.915,00	9.706.505,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			42.828.239,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	-			2 Jenis	2 Jenis	8.843.949.707,00	8.306.939.537,00	8.306.939.537,00			5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	DUKUMPP Kota Cirebon		9.065.647.193,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	17 01 2.0 00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	56 Orang/bulan	8.842.403.451,00	8.305.393.487,00	8.528.949.904,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			9.064.023.624,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	17 01 2.0 00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.546.256,00	1.546.050,00	1.546.050,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			1.623.569,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	17 01 2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	-			3 Dokumen	1 Dokumen	58.195.557,00	52.810.000,00	52.810.000,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	DKUKMPP Kota Cirebon		61.105.335,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	17 01 2.0 00 3 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.150.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			3.307.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	17 01 2.0 00 3 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	51.895.557,00	52.810.000,00	52.810.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			54.490.335,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	17 01 2.0 00 3 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.150.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			3.307.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025			RKPD Perubahan 2025	Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2	17	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-			3 Paket	3 Dokumen	8.400.000,00	0,00	0,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	DKUKMPP Kota Cirebon		267.907.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	17	01	2.0	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			137.812.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	17	01	2.0	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				47 Orang	47 Orang	8.400.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			8.820.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	17	01	2.0	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				47 Orang	47 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			121.275.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	17	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum	-			6 Dokumen	6 Dokumen	1.767.272.038,00	1.604.117.630,00	1.604.117.630,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	DKUKMPP Kota Cirebon		1.855.635.638,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	17	01	2.0	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	104.841.235,00	87.365.854,00	87.365.854,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			110.083.296,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	17	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.941.489,00	15.354.864,00	7.677.432,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			16.738.563,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	17	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	189.846.269,00	86.503.494,00	58.281.271,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			199.338.582,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	48 Unit	105.892.700,00	139.308.379,00	139.308.379,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		111.187.334,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
2	17	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	-	3 Jenis	3 Jenis	1.481.000.094,00	1.449.412.756,00	1.449.412.756,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	DKUKMPP Kota Cirebon	1.557.343.299,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	01	2.0	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		2.293.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.184.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			2.293.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	01	2.0	8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	615.448.575,00	555.156.000,00	555.156.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		646.221.004,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
2	17	01	2.0	8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	12 Laporan	863.367.519,00	891.256.756,00	891.326.524,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		908.829.095,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
2	17	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	-	4 Jenis	4 Jenis	1.141.341.319,00	1.178.026.930,00	1.178.026.930,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	DKUKMPP Kota Cirebon	2.248.408.384,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	01	2.0	9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pemiliknya				27 Unit	27 Unit	481.287.109,00	413.828.000,00	413.828.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		505.351.464,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
2	17	01	2.0	9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	528.019.526,00	643.393.212,00	643.393.212,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		1.604.420.502,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
2	17	01	2.0	9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					50 Unit	57 Unit	40.530.105,00	43.698.000,00	43.698.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			42.556.610,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	01	2.00	9	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					300 Unit	388 Unit	91.504.579,00	77.107.718,00	77.107.718,00	Kota Cirebon, Kesambi, Pekiringan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			96.079.808,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
##	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi				18 Persen	3.30 Persen	195.000.000,00	39.209.347,00	29.399.187,00							195.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	02	2.0	1		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin usaha simpan pinjam koperasi yang terverifikasi	-			41 SILUSP	20 Persen	195.000.000,00	39.209.347,00	39.209.347,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Koperasi Lingkup Kota Cirebon	195.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
2	17	02	2.00	1	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					41 Unit Usaha	40 Unit Usaha	195.000.000,00	39.209.347,00	29.399.187,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			195.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
##	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				68 Persen	67 Persen	170.000.000,00	98.856.170,00	80.383.602,00							170.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	03	2.0	1		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi dalam peningkatan tata kelola kelembagaan dan kepatuhan koperasi	-			67 LHPKK	67 Koperasi	170.000.000,00	98.856.170,00	98.856.170,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Koperasi Lingkup Kota Cirebon	170.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
2	17	03	2.00	1	03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
						Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi					2 Unit Usaha	67 Unit Usaha	120.000.000,00	57.107.755,00	43.375.187,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				20 Unit Usaha	30 Unit Usaha	50.000.000,00	16.643.089,00	15.192.790,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	07	2.01	00	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				30 Unit Usaha	225 Unit Usaha	275.000.000,00	256.294.420,00	141.952.034,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		325.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	07	2.01	00	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																
						Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				30 Orang	30 Orang	90.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		105.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	07	2.01	00	07	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil																
						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				260 Unit Usaha	40 Unit Usaha	300.000.000,00	53.990.063,00	32.198.911,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		475.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	07	2.01	00	14	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																
						Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				1874 Unit Usaha	1874 Unit Usaha	100.000.000,00	79.282.591,00	74.232.287,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
##	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor			14 Persen	6.33 Persen	1.050.000.000,00	659.358.022,00	638.115.702,00						525.000.000,00		
2	17	08	2.01			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-		137 Unit Usaha	75 Persen	1.050.000.000,00	659.358.022,00	659.358.022,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	UMKM Kota Cirebon	525.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
2	17	08	2.01	00	02	Pengembangan Usaha Mikro																
						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				225 Unit Usaha	225 Unit Usaha	1.050.000.000,00	659.358.022,00	638.115.702,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		525.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											4.512.800.000,00	2.295.561.453,00	2.058.336.317,00		3.727.800.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3.097.800.000,00	1.200.238.548,00	995.312.346,00							2.492.800.000,00		
##	3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi			15,79 Persen	5 Persen	55.000.000,00	21.459.029,00	9.752.204,00						25.000.000,00		
3	30	02	2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Data legalitas gudang	-		86,27 persen	5 TDG	55.000.000,00	21.459.029,00	21.459.029,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Pelaku Usaha di Kota Cirebon	25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	02	2.002.001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																
				Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				10 Dokumen	10 Dokumen	55.000.000,00	21.459.029,00	9.752.204,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
##	3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya			6 Persen	6 Persen	75.000.000,00	17.472.610,00	9.274.408,00						200.000.000,00		
3	30	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-		62,5 persen	8 Pasar	75.000.000,00	17.472.610,00	17.472.610,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Pelaku Usaha di Kota Cirebon	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	03	2.002.001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	17.472.610,00	9.274.408,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
3	30	03	2.002.002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
##	3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			84 Persen	84 Persen	1.400.000.000,00	213.235.210,00	186.380.163,00						1.240.000.000,00		
3	30	04	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pasokan tiga komoditi pokok (Padi-padian, Gula, dan Minyak)	-		3.968,61 Ton	3,968 Ton	80.000.000,00	0,00	0,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Pelaku Usaha di Kota Cirebon	80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENCANA Tahun	Prakiraan Capaian Target RENCANA Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas											
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	3	30	04	2.0	00	1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																
								Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat										50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					
	3	30	04	2.0	00	1	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																
								Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat										30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					
	3	30	04	2.0	00	2		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-									1.160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					
	3	30	04	2.0	00	2	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
								Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					
	3	30	04	2.0	00	2	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																
								Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan										150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					
	3	30	04	2.0	00	2	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					
##	3	30	05					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR										240.000.000,00						

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3	30	05	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	-			3 Pelaku Usaha	2 Kali	240.000.000,00	174.231.615,00	174.231.615,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Pelaku Usaha di Kota Cirebon		240.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	05	2.01.02	Pameran Dagang Nasional																	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				3 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	200.000.000,00	153.713.085,00	143.673.535,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	05	2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor																	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Diusun Menjadi Materi Promosi				30 Produk	30 Produk	40.000.000,00	20.518.530,00	10.359.160,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
#	3	30	06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen				92 Persen	78 Persen	627.800.000,00	407.489.362,00	302.545.386,00							262.800.000,00	
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal	-			6829 Kali	850 Kali	627.800.000,00	407.489.362,00	407.489.362,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Pelaku Usaha di Kota Cirebon		262.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	06	2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				7423 Unit	5700 Unit	477.800.000,00	299.999.585,00	257.911.384,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			192.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	06	2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				370 Orang	370 Orang	135.000.000,00	100.654.777,00	37.799.002,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	30	06	2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal																	
					Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	6.835.000,00	6.835.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025			Nasional	Daerah					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
#	3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi / Dilaksanakan			65 Persen	9 Persen	700.000.000,00	366.350.722,00	333.327.490,00							525.000.000,00	
	3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-		2 Kali	3 Kali	700.000.000,00	366.350.722,00	366.350.722,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Pelaku Usaha di Kota Cirebon		525.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	07	2.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	07	2.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				12 UMKM	27 UMKM	400.000.000,00	348.692.067,00	325.668.835,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	07	2.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				12 UMKM	20 UMKM	50.000.000,00	17.658.655,00	7.658.655,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.415.000.000,00	1.095.322.905,00	1.063.023.971,00							1.235.000.000,00	
#	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri			66,67 Persen	80 Persen	1.335.000.000,00	1.015.323.458,00	1.009.033.724,00							1.155.000.000,00	
	3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Realisasi aksi program RPIK dalam pengembangan perwilayahan industri	-		1 Aksi	1 Aksi	1.335.000.000,00	1.015.323.458,00	1.015.323.458,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Pelaku Usaha di Kota Cirebon		1.155.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	26.663.911,00	22.325.406,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah			12	11				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2	18	01	2.0	1			100	100	303.309.270,00	259.053.836,00	259.053.836,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Seluruh Karyawan DPMPSTP		318.474.732,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2	18	01	2.0	00	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							9	9	Dokumen	9	Dokumen	22.821.540,00	25.143.240,00	25.143.240,00	Kota Cirebon, Lemah Wunguk, Lemahwunguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	23.962.617,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	01	2.0	00	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
									1	Dokumen	1	Dokumen	4.180.050,00	5.241.042,00	5.241.042,00	Kota Cirebon, Lemah Wunguk, Lemahwunguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	4.389.052,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.0	00	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
									1	Dokumen	1	Dokumen	3.655.050,00	5.244.042,00	5.244.042,00	Kota Cirebon, Lemah Wunguk, Lemahwunguk	Pajak Daerah	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	3.837.802,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.0	00	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
									1	Dokumen	1	Dokumen	4.180.050,00	5.244.042,00	5.244.042,00	Kota Cirebon, Lemah Wunguk, Lemahwunguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	4.389.052,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.0	00	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																
									1	Dokumen	1	Dokumen	3.660.300,00	5.244.042,00	5.244.042,00	Kota Cirebon, Lemah Wunguk, Lemahwunguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	3.843.315,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.0	00	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
									4	Laporan	4	Laporan	13.004.250,00	7.670.496,00	7.670.496,00	Kota Cirebon, Lemah Wunguk, Lemahwunguk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	13.654.462,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.0	00	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025			Nasional	Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	251.808.090,00	205.266.932,00	120.873.371,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Lemahwungkuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			264.398.432,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya informasi administrasi keuangan sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	4.637.776.092,00	5.320.344.646,00	5.320.344.646,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Seluruh Karyawan DPMPTSP		4.465.414.896,92	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.601.257.036,35	5.304.950.796,00	5.371.859.215,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Lemahwungkuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			4.427.069.888,49	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	16.934.841,00	9.394.328,00	9.394.328,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Lemahwungkuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			17.781.583,05	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	19.584.214,65	5.999.522,00	5.999.522,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Lemahwungkuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			20.563.425,38	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	52.500.000,00	46.477.735,00	46.477.735,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Seluruh Karyawan DPMPTSP		55.125.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.0	00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00	46.477.735,00	45.537.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Lemahwungkuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			55.125.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya disiplin dan kapasitas aparatur Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	0,00	66.984.988,00	66.984.988,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Seluruh Karyawan DPMPTSP		154.350.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas									
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Jumlah Lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	682.500.000,00	859.216.350,00	868.153.102,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Lemahwungkuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			716.625.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2	18	01	2.0				100 persen	100 persen	798.000.000,00	575.178.286,00	575.178.286,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Seluruh Karyawan DPMPPTSP		683.527.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2	18	01	2.0	00			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	24 Unit	367.500.000,00	308.851.298,00	307.761.304,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Lemahwungkuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			385.875.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2	18	01	2.0	00			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	357.000.000,00	199.720.738,00	199.068.738,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Lemahwungkuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			220.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2	18	01	2.0	00			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	60 Unit	63.000.000,00	56.257.250,00	37.966.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Lemahwungkuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			66.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2	18	01	2.0	00			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.500.000,00	10.349.000,00	10.349.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Lemahwungkuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			11.002.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
##	2	18	02				50 Persen	70 Persen	500.000.000,00	259.999.586,00	237.038.155,00							600.000.000,00				
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi																		
2	18	02	2.0				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	259.999.586,00	259.999.586,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Investor		600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2	18	02	2.0	00			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota															

[illegible]

[illegible]

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				600 Pelaku Usaha	244 Pelaku Usaha	885.500.000,00	133.656.086,00	73.673.636,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Lemahwungkuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			1.695.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	05	2.0	00	06	Pengawasan Penanaman Modal																		
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Ketaatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	376.500.000,00	176.075.724,00	100.048.724,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Lemahwungkuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			176.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
#	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal				13 Sektor	80 Persen	194.000.000,00	118.959.534,00	216.217.431,00							50.000.000,00		
	2	18	06	2.0	1	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah data perizinan dan non perizinan yang disajikan	-			12 Dokumen	12 Dokumen	194.000.000,00	118.959.534,00	118.959.534,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Masyarakat Kota Cirebon		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	06	2.0	00	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	12 Dokumen	194.000.000,00	118.959.534,00	216.217.431,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Lemahwungkuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
						DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA							35.145.953.327,00	20.104.010.074,00	19.053.146.972,00							45.846.060.339,00		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							35.145.953.327,00	20.104.010.074,00	19.053.146.972,00							45.846.060.339,00		
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							35.145.953.327,00	20.104.010.074,00	19.053.146.972,00							45.846.060.339,00		
#	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Dispora Kota Cirebon				84 Poin	84 Poin	8.865.691.466,00	8.695.886.379,00	8.099.750.902,00							11.213.110.387,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp) RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Sebelum	Sesudah						Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	19	01	2.0	-			7 Jenis	7 Jenis	215.398.938,00	293.251.235,00	293.251.235,00			-	-	Pegawai DPOR Kota Cirebon		291.249.004,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.0																
							3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	93.522.741,00	72.556.841,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			128.080.120,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.0																
							1 Dokumen	1 Dokumen	11.677.193,00	10.492.431,00	7.591.431,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.261.052,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.0																
							1 Dokumen	1 Dokumen	11.600.333,00	10.483.772,00	7.582.772,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.180.349,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.0																
							2 Dokumen	2 Dokumen	17.433.398,00	15.400.758,00	12.499.758,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.305.068,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.0																
							1 Dokumen	1 Dokumen	11.532.818,00	10.621.272,00	7.720.272,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.109.459,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.0																
							4 Laporan	4 Laporan	13.184.115,00	28.765.632,00	28.765.632,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.843.321,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.0																
							6 Laporan	7 Laporan	89.971.081,00	123.964.629,00	112.360.629,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			94.469.635,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.0	-			2 Jenis	2 Jenis	5.489.662.899,00	5.192.722.205,00	5.192.722.205,00			-	-	Pegawai DPOR Kota Cirebon		5.776.746.043,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	240.008.989,00	131.041.204,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			877.244.924,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	60.000.000,00	34.134.000,00	40.492.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.456.556,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
##	2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda				5:175 51 Rasio Organisasi	11:100 Rasio	2.283.603.753,00	746.984.000,00	996.983.806,00							2.082.783.940,00	
2	19	02	2.0	1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pembinaan Pemuda Pelopor, Kepemimpinan Pemuda dan Kewirausahaan Pemuda	-			4 Jenis	4 Jenis	1.073.561.579,00	440.070.840,00	440.070.840,00			-	-	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		969.739.658,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2.0	00	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																	
						Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	174.818.700,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			183.559.635,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2.0	00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																	
						Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				50 Orang	50 Orang	504.049.428,00	208.690.528,00	208.690.418,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			371.751.899,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	02	2.0	00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																	
						Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				50 Orang	50 Orang	394.693.451,00	231.380.312,00	231.380.294,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			414.428.124,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No		Kode		Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
									Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)													
									Sebelum	Sesudah						Nasional	Daerah																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
1	2	19	02	2.0	2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pembinaan Organisasi Pemuda	-				1 Jenis	1 Jenis	1.210.042.174,00	306.913.160,00	306.913.160,00		Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					Pemuda dan Organisasi Kepemudaan		1.113.044.282,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
	2	19	02	2.0	03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		1.113.044.282,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA								
						Jumlah Organisasi Keparmukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya					1 Organisasi	1 Organisasi	1.210.042.174,00	306.913.160,00	556.913.094,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-									1.113.044.282,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
III	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang masuk Pelatda Provinsi	-				25,00 40,00 40,00 65,00 Persen Persen Persen	10 Persen	22.962.771.064,00	10.608.123.970,00	9.503.396.654,00												31.464.584.617,00					
2	19	03	2.0	1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pembinaan Olahraga Usia Dini, Pemeliharaan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga	-				2 Jenis	2 Jenis	4.300.000.000,00	3.708.124.574,00	3.708.124.574,00				-	-					Atlet Usia Dini dan Sarana Olahraga		24.255.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
2	19	03	2.0	1	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota																											
						Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota					4 Unit	4 Unit	1.500.000.000,00	379.914.740,00	273.359.578,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-									2.205.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
2	19	03	2.0	1	05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																											
						Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia					7 Unit	6 Unit	2.800.000.000,00	3.328.209.834,00	3.841.318.966,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-									22.050.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
2	19	03	2.0	2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	-				2 Jenis	2 Jenis	2.762.368.000,00	3.028.780.200,00	3.028.780.200,00				-	-					Atlet Pelajar dan Atlet PNS		2.165.486.400,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
2	19	03	2.0	00	04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																											
						Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.187.368.000,00	1.500.347.250,00	1.689.063.430,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-									511.736.400,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
2	19	03	2.0	00	06	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	-			3000 Orang	450 Orang	1.575.000.000,00	1.528.432.950,00	1.396.970.400,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.653.750.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen Hasil Pembinaan, Pengembangan dan Penghargaan Atlet Berprestasi	-	4 Jenis	4 Jenis	4.184.103.000,00	146.925.000,00	146.925.000,00			-	-	Atlet Pelajar		4.393.308.150,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.003	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga															
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				55 Orang	55 Orang	262.500.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.625.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.003	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)															
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				1 Pelatda	1 Pelatda	3.186.603.000,00	146.925.000,00	145.980.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.345.933.150,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.003	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota															
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				25 Orang	25 Orang	630.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			661.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.003	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota															
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				2 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	0,00	39.553.224,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.004	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	4 Jenis	4 Jenis	11.453.500.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00			-	-	Organisasi olahraga Kota Cirebon		374.850.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.004	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota															
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokumen	3 Dokumen	3.652.000.000,00	3.400.000.000,00	1.800.000.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			264.600.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.004	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait															
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	7.801.500.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.250.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	19	03	2.005	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	3 Jenis	3 Jenis	262.800.064,00	324.294.196,00	324.294.196,00			-	-	Atlet dan Pelatih		275.940.067,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah			RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	2 19 03 2.0 00 05 06	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi					3 Laporan	2 Laporan	119.889.000,00	116.862.830,00	110.676.830,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			125.883.450,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2 19 03 2.0 00 05 07	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				2 Laporan	1 Laporan	53.661.300,00	76.092.520,00	76.088.180,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			56.344.365,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2 19 03 2.0 00 05 08	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Lembara Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				2 Dokumen	2 Dokumen	89.249.764,00	131.338.846,00	130.386.046,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			93.712.252,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			
#	2 19 04 2.0 1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan				65,00 Persen	10 Persen	1.033.887.044,00	53.015.725,00	453.015.610,00							1.085.581.395,00				
	2 19 04 2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dokumen hasil Pembinaan Organisasi Kepramukaan	-			3 Jenis	3 Jenis	1.033.887.044,00	53.015.725,00	53.015.725,00			-	-	Gerakan Pramuka		1.085.581.395,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2 19 04 2.0 00 1 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah					1 Organisasi	1 Organisasi	551.250.028,00	53.015.725,00	453.015.610,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			578.812.529,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2 19 04 2.0 00 1 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				35 Orang	35 Orang	244.714.208,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			256.949.918,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	2 19 04 2.0 00 1 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	237.922.808,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			249.818.948,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			
			DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						21.704.809.039,00	14.149.922.218,00	13.886.709.522,00							12.275.000.000,00				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.539.809.039,00	11.314.994.663,00	11.284.817.785,00							1.785.000.000,00				
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						16.539.809.039,00	11.314.994.663,00	11.284.817.785,00							1.785.000.000,00				
#	2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 59 Persen Poin	100 Persen	7.129.809.039,00	8.129.179.039,00	8.267.337.534,00							0,00				

No				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas						
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
2	22	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			7 Dokumen	7 Dokumen	136.213.655,00	135.320.118,00	135.320.118,00		13	14	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.	Terwujudnya Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	01	2.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	9.137.100,00	8.451.208,00	8.451.208,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.					0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	01	2.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	31.417.700,00	34.559.515,00	34.559.515,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.					0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	01	2.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	33.517.000,00	31.260.989,00	31.260.989,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.					0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	01	2.004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																			
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.497.150,00	3.745.052,00	3.745.052,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.					0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	01	2.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	31.932.200,00	31.607.052,00	31.607.052,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.					0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	01	2.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.143.300,00	4.011.156,00	4.011.156,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.					0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	01	2.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	24 Laporan	21.569.205,00	21.685.146,00	14.675.226,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.					0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.359.637,00	99.651.978,00	99.651.978,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.0	00	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.560.000,00	10.035.672,00	10.035.672,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.0	00	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	32.374.860,00	35.003.283,00	35.003.283,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.0	00	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	169.859.550,00	166.076.000,00	133.666.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.0	00	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	92.592.990,00	92.581.654,00	92.581.654,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.0	00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	129.493.980,00	199.957.000,00	100.092.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	3 Dokumen	18.686.745,00	433.738.439,00	433.738.439,00			-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.0	00	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				43 Unit	43 Unit	18.686.745,00	34.991.663,00	29.503.238,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.0	00	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	4 Unit	0,00	398.746.776,00	363.674.392,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	2 Dokumen	756.659.400,00	928.984.000,00	928.984.000,00			-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)								
							Sebelum	Sesudah						Nasional					Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	2	22	01	2.0	00	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	168.336.000,00	160.320.000,00	160.320.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.				0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	2	22	01	2.0	00	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	588.323.400,00	768.664.000,00	768.664.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.				0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	2	22	01	2.0	00	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			4 Dokumen	4 Dokumen	252.072.072,00	374.815.113,00	374.815.113,00			-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	01	2.0	00	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	54.217.275,00	54.528.148,00	54.528.148,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.				0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	2	22	01	2.0	00	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	197.854.797,00	196.290.956,00	196.290.956,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.				0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	2	22	01	2.0	00	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	0,00	123.996.009,00	123.996.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.				0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
##	2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan				66,38 Persen	81 Persen	6.305.000.000,00	1.989.142.301,00	1.947.244.566,00								0,00	
	2	22	02	2.0	1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			2 laporan	2 laporan	3.495.000.000,00	1.075.389.340,00	1.075.389.340,00			-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.	Pemangku Adat, Budayawan dan Seniman di Kota Cirebon			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	02	2.0	00	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				22 Objek	22 Objek	2.275.000.000,00	568.892.100,00	715.723.880,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.				0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	83.513.415,00	83.513.415,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
##	2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan		35,71 Persen	32 Persen	150.000.000,00	50.014.863,00	0,00							175.000.000,00			
	2	22	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	3 laporan	3 laporan	150.000.000,00	50.014.863,00	50.014.863,00			-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.	Seniman di Kota Cirebon	175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	2	22	03	2.001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.			0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	2	22	03	2.002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				25 Sertifikat	25 Sertifikat	100.000.000,00	50.014.863,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	2	22	03	2.003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	2 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
##	2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		74,14 Persen	77,14 Persen	2.355.000.000,00	980.889.160,00	904.466.385,00							1.410.000.000,00			
	2	22	05	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Laporan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	2 laporan	2 laporan	230.000.000,00	151.400.000,00	151.400.000,00			-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.	Cagar Budaya, Pengelola Cagar Budaya dan Pemangku Adat di Kota Cirebon	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	2	22	05	2.001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				1 Objek	1 Objek	75.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	2	22	05	2.002	Penetapan Cagar Budaya																
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				1 Objek	1 Objek	155.000.000,00	151.400.000,00	88.967.250,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Unit	3 Unit	900.000.000,00	600.000.000,00	589.355.030,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	02	2.0	00	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	1 Lokasi	725.000.000,00	455.000.000,00	447.010.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Nilai Sejarah.			5.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	02	2.0	00	4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-			2 laporan	2 laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Daftar Usaha Pariwisata Kota Cirebon		100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	02	2.0	00	Keseediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota																	
						Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	52.744.350,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
##	3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata				2650000 Wisatawan	2.75 Persen	1.845.000.000,00	1.074.269.555,00	925.267.295,00							2.545.000.000,00	
3	26	03	2.0	1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-			4 laporan	4 laporan	1.845.000.000,00	1.074.269.555,00	1.074.269.555,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Calon Wisatawan yang berkunjung ke Kota Cirebon		2.545.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	03	2.0	00	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	33.550.000,00	33.550.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	03	2.0	00	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																	
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	03	2.0	00	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				6 Kegiatan	3 Kegiatan	1.300.000.000,00	762.342.300,00	712.311.400,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
									Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum	Sesudah			8	9			10			11			12	13	14
1	3	26	03	2.000107	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																	325.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	1 Promosi	325.000.000,00	278.377.255,00	179.405.895,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			325.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
#	3	26	04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KESEYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual			2 Persen	1 Persen	695.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00							695.000.000,00					
	3	26	04	2.01	Laporan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	-			1 laporan	1 laporan	500.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Steakholder Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kompepar		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
	3	26	04	2.000101	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																				
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Puguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
	3	26	04	2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-		2 laporan	2 laporan	195.000.000,00	0,00	0,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Steakholder Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kompepar		195.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
	3	26	04	2.000214	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual																				
					Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				10 Kegiatan	10 Kegiatan	75.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
	3	26	04	2.000220	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																				
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
#	3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi			2 Persen	65 Persen	800.000.000,00	425.658.000,00	393.019.695,00							1.000.000.000,00					

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-			3 laporan	3 laporan	750.000.000,00	425.658.000,00	425.658.000,00			5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Stakeholder Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kompepar		950.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26	05	2.001	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	320.039.000,00	312.534.040,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26	05	2.001	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																	
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	105.619.000,00	80.485.655,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26	05	2.001	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				80 Orang	80 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26	05	2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-			1 laporan	1 laporan	50.000.000,00	0,00	0,00			5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Stakeholder Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kompepar		50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26	05	2.002	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				8 Orang	8 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						11.804.642.584,00	12.397.198.326,00	12.145.908.373,00						15.083.129.260,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.804.642.584,00	12.397.198.326,00	12.145.908.373,00						15.083.129.260,00		
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						1.332.931.000,00	2.370.508.704,00	2.241.423.952,00						1.716.085.193,00		
#	2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca			10,00 Persen	70 Poin	1.153.500.000,00	2.072.508.225,00	1.982.219.755,00						1.474.436.093,00		
2	23	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan	-			80,00 Persen	5,0 Persen	898.500.000,00	1.092.573.412,00	1.092.573.412,00			-	-	Pegawai dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kota Cirebon		1.058.049.405,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	-			1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	50.000.000,00	156.955.982,00	156.955.982,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	-			105.840.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.0	2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perolehan Jumlah prestasi literasi tingkat Kota dan Provinsi yang diperoleh	-			7 Prestasi	6 Prestasi	255.000.000,00	979.934.813,00	979.934.813,00			-	-	Pegawai dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kota Cirebon		416.386.688,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.0	00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
						Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	75.000.000,00	83.272.273,00	77.399.045,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.0	00	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100.000.000,00	342.124.993,00	342.124.993,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	-			209.475.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.0	00	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				6 Orang	6 Orang	80.000.000,00	257.208.985,00	257.208.985,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	-			96.661.688,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.0	00	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
						Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				-	1 Lokasi	0,00	297.328.562,00	297.328.562,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp) RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah							Nasional	Daerah				
1	2	23	03		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
##	2	23	03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki				5 Judul	12,14 Persen	179.431.000,00	298.000.479,00	259.204.197,00							241.649.100,00	
	2	23	03	2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koleksi Naskah Kuno yang dimiliki	-			2 kali	10,00 Persen	79.431.000,00	232.098.066,00	232.098.066,00			-	-	Pegawai dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kota Cirebon		87.374.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.001.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																	
					Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno					45 Orang	45 Orang	33.000.000,00	185.677.166,00	146.880.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	-			36.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.001.04	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																	
					Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan					5 Eksemplar	5 Eksemplar	46.431.000,00	46.420.900,00	46.420.900,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.074.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Budaya Etnis Nusantara yang dimiliki	-			3 kali	14,29 Persen	100.000.000,00	65.902.413,00	65.902.413,00			-	-	Pegawai dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kota Cirebon		154.275.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.002.03	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																	
					Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota					6 Eksemplar	6 Eksemplar	50.000.000,00	48.780.436,00	48.780.436,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.002.04	Pengolahan dan Penyngianan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																	
					Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyngianan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota					30 Eksemplar	30 Eksemplar	50.000.000,00	17.121.977,00	17.121.977,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			63.525.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							10.471.711.584,00	10.026.689.622,00	9.904.484.421,00					13.367.044.067,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
##	2	24	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Dispusip				75 Poin	75 Poin	9.918.211.584,00	9.448.531.380,00	9.469.329.037,00							
	2	24	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			7 Jenis	7 Jenis	71.270.256,00	50.579.456,00	50.579.456,00		-	-	Pegawai dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kota Cirebon	164.863.758,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	24	01	2.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	13.698.406,00	11.683.076,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		72.652.901,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	4.756.752,00	5.681.626,00	5.681.626,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5.232.427,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	4.756.752,00	5.206.726,00	5.206.726,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5.232.427,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	4.756.752,00	5.806.726,00	5.806.726,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5.232.427,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD																
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.926.502,00	2.926.502,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.071.537,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	01	2.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	6.001.580,00	6.001.580,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5.574.547,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	24.01.2.001.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	11.257.890,00	8.324.575,00	kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		67.867.492,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2	24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-			3 Jenis	3 Jenis	7.278.836.206,00	6.981.307.477,00	6.981.307.477,00			-	-	Pegawai dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kota Cirebon	8.001.692.535,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2	24.01.2.002.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	53 Orang/bulan	7.253.836.206,00	6.961.787.961,00	7.144.192.083,00	kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-		7.979.219.827,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2	24.01.2.002.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2 Laporan	11.000.000,00	10.999.660,00	10.999.660,00	kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8.276.291,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2	24.01.2.002.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	14.000.000,00	8.519.856,00	8.519.856,00	kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14.196.417,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2	24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	-			1 Jenis	1 Jenis	44.000.000,00	45.805.000,00	45.805.000,00			-	-	Pegawai dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kota Cirebon	63.703.963,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2	24.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44.000.000,00	45.805.000,00	45.805.000,00	kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		63.703.963,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
2	24	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-			2 Jenis	2 Jenis	50.215.000,00	0,00	0,00			Kota Cirebon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.236.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.00	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	50.215.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					55.236.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	-			6 Jenis	6 Jenis	591.218.313,00	558.360.608,00	558.360.608,00					Kota Cirebon		-	-	1.074.529.506,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.00	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51.679.461,00	32.079.430,00	32.079.430,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					56.847.407,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.00	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	11.565.516,00	11.565.516,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					12.723.974,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.00	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	66.833.852,00	19.092.832,00	19.092.832,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					73.517.237,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.00	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	87.183.000,00	87.183.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					309.773.945,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.00	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.705.000,00	28.360.860,00	28.360.860,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					13.975.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	304.000.000,00	380.078.970,00	263.525.150,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					607.691.443,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			5 Jenis	5 Jenis	775.343.789,00	436.558.675,00	436.558.675,00					Kota Cirebon		-	-	1.001.989.716,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	01	2.00	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					726.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional			Daerah		17	18
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	13.999.955,00	7.475.003,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			33.075.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.0	00	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	305.661.691,00	298.611.780,00	298.611.780,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			320.944.775,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.0	00	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	52.500.000,00	36.750.020,00	20.707.745,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			55.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.0	00	03	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	42.000.000,00	31.999.950,00	28.996.343,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			44.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.0	01	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	-		125 orang	139 orang	1.575.000.000,00	873.318.130,00	873.318.130,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	KDH, WKDH, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, dan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon		1.653.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.0	00	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	105.000.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			110.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.0	00	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	5 Paket	735.000.000,00	423.520.725,00	70.012.700,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			771.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.0	00	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	73.500.000,00	51.449.865,00	32.125.865,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			77.175.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.0	00	05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	30 Orang	31.500.000,00	42.559.940,00	7.275.000,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			33.075.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.0	00	05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	36 Orang	630.000.000,00	282.287.600,00	282.287.600,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			661.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
								Sebelum	Sesudah							Nasional	Daerah		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	01	01	2.0.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		9 jenis	9 dokumen	8.197.500.000,00	7.213.203.724,00	7.213.203.724,00			6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	KDH, WKDH, Sekretariat Daerah, Tamu Pemda Kota, Tamu Sekda, Tamu KDH, Tamu WKDH		6.118.875.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0.6.01	Penyediaan Komponen Instalasi															
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	3 Paket	157.500.000,00	130.000.376,00	130.000.376,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			165.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0.6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			7 Paket	6 Paket	900.000.000,00	729.972.110,00	725.988.010,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			661.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0.6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			5 Paket	6 Paket	500.000.000,00	323.013.332,00	341.433.769,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			441.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0.6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			6 Paket	6 Paket	315.000.000,00	227.768.480,00	227.768.480,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			330.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0.6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	157.500.000,00	115.924.901,00	85.676.040,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			165.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0.6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			29 Dokumen	29 Dokumen	283.500.000,00	249.316.875,00	249.316.875,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			297.675.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0.6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	3.900.000.000,00	3.429.100.750,00	3.529.100.750,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			2.094.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0.6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	1.900.000.000,00	1.949.999.775,00	2.299.999.775,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			1.874.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.0.6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	84.000.000,00	58.107.125,00	56.331.763,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			88.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			3 Laporan	6 Laporan	8.000.000.000,00	7.172.910.892,00	8.158.669.875,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			7.717.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			5 jenis	5 dokumen	5.584.035.155,00	4.375.055.497,00	4.375.055.497,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	BCB Balai Kota, Gedung Setda 8 Lantai, Gedung PKK, Gedung Dharma Wanita, Alun Alun Kejaksaan, Rumdin KDH, Rumdin WKDH, Rumjab Sekda		7.595.736.912,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.0	00	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				48 Unit	50 Unit	1.575.000.000,00	1.181.551.950,00	1.181.551.950,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			1.653.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.0	00	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	32 Unit	735.000.000,00	515.449.000,00	515.449.000,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			771.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.0	00	05	Pemeliharaan Mebel																		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				35 Unit	15 Unit	20.535.155,00	14.213.700,00	54.213.700,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			21.561.912,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.0	00	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				485 Unit	434 Unit	703.500.000,00	609.561.965,00	565.652.965,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			738.675.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.0	00	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	9 Unit	0,00	2.054.278.882,00	4.921.318.125,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			2.205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.0	00	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	0 Unit	2.550.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			2.205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.1	1		Administrasi Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dokumen Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	-			4 jenis	4 dokumen	1.986.967.575,00	1.752.323.155,00	1.752.323.155,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	KDH dan WKDH		2.000.635.954,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	01	01	2.1.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	184.417.575,00	173.443.000,00	173.443.000,00	kota Cirebon, kejaksaan, Kebonbaru	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			193.638.454,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.00.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			11 Paket	12 Paket	735.000.000,00	567.772.000,00	679.012.000,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			771.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.00.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang	2 Orang	93.450.000,00	15.024.000,00	15.024.000,00	kota Cirebon, kejaksaan, kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			98.122.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.00.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
				Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	974.100.000,00	996.084.155,00	1.116.180.000,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			937.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.00.05	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Dokumen Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	-	3 jenis	3 dokumen	1.432.500.000,00	1.003.359.619,00	1.003.359.619,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	KDH, WKDH, Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah, Tamu KDH, Tamu WKDH, Tamu Setda		1.323.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.00.06	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah															
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	420.000.000,00	293.999.884,00	293.999.884,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			441.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.00.07	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah															
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	367.500.000,00	257.493.990,00	257.493.990,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			385.875.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.1.00.08	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah															
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	645.000.000,00	451.865.745,00	451.865.745,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			496.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah			12	13				Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							12 Laporan	12 Laporan	262.500.000,00	149.822.500,00	649.822.500,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa kota Cirebon, kejaksaan, kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			275.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4	01	01	2.1	00	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	771.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							12 Laporan	12 Laporan	735.000.000,00	696.000.550,00	1.264.684.876,00	kota Cirebon, kejaksaan, kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			771.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
##	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Kerja Sama Daerah Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan		92,00 Persen	75,00 80,00 Persen Persen	5.884.412.000,00	4.983.699.110,00	5.097.585.432,00						5.379.830.663,00					
4	01	02	2.0	1	Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta rumusan kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan	-	3 jenis	3 dokumen	413.050.000,00	271.417.626,00	271.417.626,00		-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Kota Cirebon, TPBD Kota Cirebon, Camat, Lurah		486.202.500,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4	01	02	2.0	00	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
							5 Dokumen	5 Dokumen	66.821.875,00	29.058.370,00	29.058.370,00	kota Cirebon, kejaksaan, kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			91.162.969,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4	01	02	2.0	00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
							7 Dokumen	7 Dokumen	152.584.375,00	106.808.956,00	118.588.710,00	kota Cirebon, kejaksaan, kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			212.713.594,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4	01	02	2.0	00	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
							9 Dokumen	8 Dokumen	193.643.750,00	135.550.300,00	83.075.938,00	kota Cirebon, kejaksaan, kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			182.325.937,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4	01	02	2.0	2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta rumusan kebijakan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	-	3 jenis	3 dokumen	4.232.400.000,00	3.779.948.589,00	3.779.948.589,00		-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Kota Cirebon, Pengurus Lembaga Sarana Peribadatan, Aparatur Pemerintah Kota Cirebon, Masyarakat Kota Cirebon, Qori-Qoriah Kota Cirebon, Kafilah Kota Cirebon dalam MTQ Tk. Provinsi		3.889.620.000,00	SEKRETARIAT DAERAH				
4	01	02	2.0	00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
							12 Dokumen	12 Dokumen	3.930.756.250,00	3.371.287.325,00	3.609.833.307,00	kota Cirebon, kejaksaan, kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			3.707.294.062,00	SEKRETARIAT DAERAH				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4	01 02 2.0 00 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				5 Dokumen	4 Dokumen	86.821.875,00	60.775.200,00	51.775.200,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			91.162.969,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01 02 2.0 00 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Lintas				6 Dokumen	6 Dokumen	214.821.875,00	347.886.064,00	338.886.064,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			91.162.969,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01 02 2.0 3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Dokumen fasilitasi produk hukum daerah, bantuan hukum, dan dokumentasi informasi produk hukum	-			3 jenis	3 dokumen	697.287.500,00	505.443.447,00	505.443.447,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Kota Cirebon, ASN Pemda Kota Cirebon, Masyarakat Kota Cirebon, Tim Bantuan Hukum Kota Cirebon, Kejaksaan Negeri Cirebon, Pengadilan Negeri Cirebon		595.598.063,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01 02 2.0 3 00 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				352 Dokumen	352 Dokumen	150.000.000,00	121.801.637,00	118.845.250,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			97.240.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01 02 2.0 3 00 02	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	3 Kasus	347.287.500,00	243.101.035,00	334.201.035,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			364.651.875,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				18 Dokumen	16 Dokumen	173.643.750,00	121.550.390,00	104.350.390,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			182.325.938,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0	00	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																	
				1	02	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				16 Laporan	16 Laporan	148.176.000,00	96.846.542,00	76.386.542,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			155.584.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0	00	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																	
				1	03	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	25.467.750,00	17.539.090,00	17.539.090,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			26.741.137,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0	00	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Dokumen fasilitasi, pemantauan dan evaluasi, serta rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan	-			3 jenis	3 dokumen	358.863.750,00	360.213.819,00	360.213.819,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Pihak Swasta di Kota Cirebon pelaksanaa program TJSL		376.806.938,00	SEKRETARIAT DAERAH
				2																		
4	01	03	2.0	00	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																	
				2	01	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				8 Dokumen	4 Dokumen	150.491.250,00	132.354.000,00	132.306.000,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			158.015.813,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0	00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																	
				2	02	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				20 Laporan	14 Laporan	92.610.000,00	112.097.389,00	90.340.313,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			97.240.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.0	00	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																	
				2	03	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				9 Laporan	5 Laporan	115.762.500,00	115.762.430,00	88.814.862,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			121.550.625,00	SEKRETARIAT DAERAH

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas								
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				5 Dokumen	5 Dokumen	16.537.500,00	11.575.987,00	11.575.987,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			17.364.375,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.0.00.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				6 Dokumen	6 Dokumen	16.537.500,00	11.575.987,00	11.575.987,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			17.364.375,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			SEKRETARIAT DPRD						85.133.660.223,00	81.530.734.046,00	81.482.206.203,00							85.133.660.223,00		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						85.133.660.223,00	81.530.734.046,00	81.482.206.203,00							85.133.660.223,00		
4	02		SEKRETARIAT DPRD						85.133.660.223,00	81.530.734.046,00	81.482.206.203,00							85.133.660.223,00		
##	4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	-	81 Poin	25.71 43 Persen Skor	74.625.686.936,00	71.875.560.996,00	70.484.817.146,00							72.774.643.773,00		
4	02	01	2.0.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Jenis	6 Jenis	80.882.000,00	94.426.838,00	94.426.838,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Sekretariat DPRD Kota Cirebon		146.905.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.0.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5 Dokumen	14.355.000,00	22.655.250,00	26.405.250,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			73.905.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.0.00.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.145.400,00	10.903.952,00	10.903.952,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.0.00.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.145.400,00	10.903.952,00	10.903.952,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.0	00	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.145.400,00	10.903.952,00	10.903.952,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.0	00	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.895.400,00	10.903.952,00	10.903.952,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.0	00	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	26.195.400,00	28.155.780,00	28.155.780,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			29.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-			2 Jenis	3 Jenis	5.273.337.582,00	6.250.983.999,00	6.250.983.999,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Sekretariat DPRD Kota Cirebon		6.245.767.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.0	00	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.932.287.202,00	5.942.766.973,00	6.085.982.045,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			5.954.767.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.0	00	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	16.306.800,00	15.011.666,00	15.011.666,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			16.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.0	00	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	18 Laporan	324.743.580,00	293.205.360,00	250.113.972,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-			84 Orang	75 Orang	150.000.000,00	146.082.177,00	146.082.177,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Sekretariat DPRD Kota Cirebon		43.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				30 Laporan	38 Laporan	1.000.000.000,00	599.496.975,00	660.887.959,00	Kota Cirebon, Kejaksan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
##	4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Rancangan Tahun N				99,2 Persen	100 90 Persen Persen	10.507.973.287,00	9.655.173.050,00	10.997.389.057,00							12.359.016.450,00		
	4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	-			3 Jenis	4 Jenis	1.422.241.848,00	849.368.650,00	849.368.650,00		-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Anggota DPRD, Perangkat Daerah Kota Cirebon dan Masyarakat Kota Cirebon		1.117.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.001	Penyusunan dan Pembahasan Program																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	60.462.655,00	36.743.750,00	36.743.750,00	Kota Cirebon, Kejaksan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			72.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.001	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	1.011.404.193,00	577.839.000,00	661.737.402,00	Kota Cirebon, Kejaksan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			780.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
						Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				13 Dokumen	13 Dokumen	150.375.000,00	55.394.375,00	55.394.375,00	Kota Cirebon, Kejaksan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	179.391.525,00	179.391.525,00	Kota Cirebon, Kejaksan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran dan Kinerja Pemerintah Daerah	-			5 Jenis	5 Jenis	886.952.982,00	488.104.000,00	488.104.000,00		-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Badan Anggaran dan TAPD Kota Cirebon		517.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	02	2.001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	188.357.715,00	95.571.000,00	44.511.628,00	Kota Cirebon, Kejaksan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	188.357.715,00	84.746.000,00	33.686.628,00	Kota Cirebon, Kejaksan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.003	Pembahasan APBD																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	188.357.715,00	101.862.000,00	96.458.628,00	Kota Cirebon, Kejaksan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			118.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah						Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	02	02	2.002.004	Pembahasan APBD Perubahan															
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			1 Dokumen	1 Dokumen	130.078.463,00	69.184.000,00	23.270.000,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		79.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.002.006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD															
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1 Dokumen	1 Dokumen	191.801.374,00	136.741.000,00	80.719.512,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.003.003	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rekomendasi Hasil Pembahasan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	3 Jenis	3 Jenis	369.337.500,00	338.107.475,00	338.107.475,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	BPK RI, Wali kota Cirebon, Anggota DPRD, dan Perangkat Daerah Kota Cirebon	299.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.003.006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan															
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			1 Dokumen	1 Dokumen	93.712.500,00	65.298.075,00	29.944.075,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		66.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.003.007	Pengawasan Penggunaan Anggaran															
				Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran			3 Dokumen	3 Dokumen	165.375.000,00	205.475.300,00	205.478.384,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		166.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.003.008	Pembahasan Laporan Keterangan															
				Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	110.250.000,00	67.334.100,00	31.980.100,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		67.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.004.004	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan Kapasitasnya	-	35 Orang	35 Orang	3.677.438.000,00	4.235.202.250,00	4.235.202.250,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Anggota DPRD, Muspid, Masyarakat ASN Setwan	4.321.402.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.004.002	Pendalaman Tugas DPRD															
				Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			4 Dokumen	6 Dokumen	1.220.467.500,00	1.343.826.000,00	1.553.402.000,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		1.563.402.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.004.004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli															
				Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			6 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.004.005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi															
				Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			9 Orang	8 Orang	378.000.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		378.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.004.006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat															
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	220.647.000,00	223.827.000,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	9.205.576,00	10.238.350,00	9.786.550,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		9.435.716,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.162.381,00	3.012.045,00	2.659.636,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		3.241.441,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.571.930,00	2.462.045,00	2.219.636,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		2.636.228,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5	01	01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.916.925,00	3.397.045,00	2.967.636,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		5.039.848,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.571.930,00	2.462.045,00	2.219.636,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		2.636.228,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	10.285.619,00	8.870.940,00	7.657.680,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		10.542.759,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5	01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	29.532.018,00	20.106.825,00	19.329.725,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		30.270.319,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional					Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	73.200.196,00	16.213.180,00	16.213.180,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			75.030.201,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	01	2.0	00	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	180.477.177,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					3 Dokumen	3 Dokumen	176.075.294,00	261.610.000,00	131.444.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			180.477.177,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	01	2.0	00	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	77.838.705,00	35.900.000,00	35.900.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			79.784.673,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	01	2.0	00	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	883.041.908,00	367.047.140,00	323.113.040,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			905.117.955,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	01	2.0	00	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			5 Jenis	2 Jenis	740.557.146,00	22.215.713,00	22.215.713,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		558.815.054,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	01	2.0	00	07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					4 Unit	4 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			279.825.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	01	2.0	00	07	Pengadaan Mebel																				
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					10 Unit	10 Unit	91.308.768,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			93.591.487,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	01	2.0	00	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					52 Unit	46 Unit	566.760.800,00	0,00	301.438.868,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			162.348.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp) RKPd Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Sebelum	Sesudah						Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	01	01	2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			20 Unit	20 Unit	22.487.578,00	22.215.713,00	15.832.157,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		23.049.767,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat daerah	-	2 Jenis	2 Jenis	789.525.776,00	750.529.737,00	750.529.737,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	809.263.921,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	01	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	3 Laporan	216.141.929,00	200.040.000,00	200.040.000,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		221.545.478,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	01	2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3 Laporan	3 Laporan	573.383.847,00	550.489.737,00	550.489.737,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		587.718.443,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	5 Jenis	5 Jenis	1.723.882.429,00	616.432.850,00	616.432.850,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-	829.879.915,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	01	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya			1 Unit	1 Unit	116.566.701,00	46.248.000,00	46.248.000,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		57.980.868,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	01	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			27 Unit	27 Unit	846.089.517,00	397.350.000,00	397.350.000,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		498.241.755,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	01	01	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	3 Unit	629.999.996,00	66.743.850,00	66.743.850,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.		139.150.422,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	80.000.000,00	77.295.075,00	77.295.075,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			126.075.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05	02	2.0	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai Pedoman Kelitbangan	-			4 Jenis	1 Jenis	329.000.000,00	168.498.152,00	168.498.152,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		598.856.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05	02	2.0	00	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			336.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05	02	2.0	00	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	89.000.000,00	89.703.077,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			262.656.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05	02	2.0	00	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	78.795.075,00	78.795.075,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05	02	2.0	00	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05	02	2.0	3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai Pedoman Kelitbangan	-			5 Jenis	2 Jenis	416.000.000,00	239.999.502,00	239.999.502,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		746.449.933,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
5	05	02	2.0	00	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	74.999.800,00	74.999.800,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			207.876.499,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

[illegible]

[illegible]

No					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-			4 Laporan	4 Laporan	54.148.550,00	37.075.372,00	34.570.656,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		91.757.950,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	70.000.000,00	70.813.000,00	70.813.000,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		96.051.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						
5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																				96.051.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-			1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.813.000,00	70.813.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		96.051.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya disiplin dan kapasitas aparatur Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	135.900.000,00	137.954.063,00	137.954.063,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		227.684.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-			2 Paket	0 Paket	135.900.000,00	137.954.063,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		199.236.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-			0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		14.557.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-			0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		13.891.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.180.000.000,00	1.172.790.714,00	1.172.790.714,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		1.671.983.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Paket	1 Paket	170.000.000,00	169.996.076,00	196.367.890,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		227.945.450,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)										
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	19 Unit	147.486.200,00	253.261.017,00	738.679.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Open Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.					
5	02	01	2.0 7 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	8 Unit	60.000.000,00	59.145.596,00	59.145.596,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.				103.751.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.373.520.000,00	1.519.621.830,00	1.519.621.830,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-			1.530.669.350,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0 8 00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.520.000,00	8.520.000,00	6.000.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.				10.951.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	565.000.000,00	565.008.000,00	565.008.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.				547.912.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	800.000.000,00	946.093.830,00	939.857.150,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.				971.805.950,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	100 Persen	881.773.000,00	956.751.172,00	956.751.172,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-			1.087.283.550,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya				58 Unit	57 Unit	580.000.000,00	576.632.000,00	576.632.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.				717.539.050,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.0 9 06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya				58 Unit	57 Unit	580.000.000,00	576.632.000,00	576.632.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.				717.539.050,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Filhak Ketiga (PKT) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	254.282.349,00	233.850.349,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			161.687.950,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	02	2.00	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				27 Dokumen	4 Dokumen	381.439.352,00	212.240.013,00	103.479.187,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			384.270.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	02	2.00	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				32 Orang	120 Orang	294.201.365,00	380.642.362,00	351.213.146,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			333.707.150,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	02	2.0	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon	-			1 Tepat Waktu	1 Tepat Waktu	863.409.931,00	948.514.803,00	948.514.803,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	-		1.201.739.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	02	2.00	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				7 Dokumen	7 Dokumen	224.700.731,00	176.816.647,00	107.495.152,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			350.647.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	02	2.00	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				21 Laporan	21 Laporan	70.000.000,00	69.925.454,00	40.899.264,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			96.955.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	86.000.000,00	84.989.137,00	77.507.905,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			100.303.245,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	4.798.395,00	4.798.395,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			5.733.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.0	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	80.000.000,00	78.356.972,00	73.000.208,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			93.712.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	251.895.000,00	250.290.000,00	220.697.000,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			270.112.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.0	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.110.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			16.537.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.0	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	460.000.000,00	361.528.640,00	398.492.620,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			578.812.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.600.000,00	9.999.450,00	9.999.450,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			13.230.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	03	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			4 jenis	2 dokumen	73.733.000,00	45.493.732,00	45.493.732,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	ASN Kota Cirebon		598.657.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	155.000.000,00	159.137.000,00	134.137.000,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			198.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	03	01	2.0	00			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	440.000.000,00	460.247.607,00	460.247.607,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			528.884.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	03	01	2.0	00			6 jenis	3 dokumen	340.360.950,00	280.223.000,00	280.223.000,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	ASN Kota Cirebon		429.975.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	03	01	2.0	00			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50.494.950,00	38.391.000,00	38.391.000,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			56.227.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	03	01	2.0	00			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	175.000.000,00	190.351.000,00	190.351.000,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			230.422.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	03	01	2.0	00			Pemeliharaan Mebel															
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			13.230.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	03	01	2.0	00			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	3 Unit	54.866.000,00	51.481.000,00	51.481.000,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			62.842.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	03	01	2.0	00			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			36.382.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			44.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	03	02	2.0	2	Mutasi dan Promosi ASN	Dokumen hasil pengelolaan administrasi kepegawaian	-			4 jenis	6 Dokumen	566.500.000,00	289.998.750,00	289.998.750,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	ASN Kota Cirebon		600.862.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	03	02	2.0	00	Pengelolaan Mutasi ASN																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.999.750,00	9.999.750,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			16.537.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	03	02	2.0	00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																			
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	136.500.000,00	87.590.250,00	42.714.000,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			143.325.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	03	02	2.0	00	Pengelolaan Promosi ASN																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	420.000.000,00	192.408.750,00	1.010.633.300,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			441.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	03	02	2.0	3	Pengembangan Kompetensi ASN	Dokumen hasil pengembangan kompetensi ASN	-			5 jenis	3 Dokumen	2.241.500.000,00	1.232.250.970,00	1.232.250.970,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	ASN Kota Cirebon		667.012.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	03	02	2.0	00	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																			
						Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				70 Orang	70 Orang	52.500.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			55.125.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	03	02	2.0	00	Pengelolaan Assessment Center																			
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000.000,00	1.167.251.070,00	1.139.918.493,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			413.437.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	04	02	2.01				1 jenis	1 Dokumen	1.000.000.000,00	72.712.000,00	72.712.000,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	ASN Kota Cirebon		209.475.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
							13 Orang	2 Orang	1.000.000.000,00	72.712.000,00	24.786.000,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			209.475.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							UPT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai,			18.951.872.550,00	14.382.325.881,00	16.236.349.137,00					18.804.983.303,00		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				18.951.872.550,00	14.382.325.881,00	16.236.349.137,00						18.804.983.303,00		
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4.714.900.000,00	2.960.936.421,00	3.859.373.388,00						3.837.120.000,00		
##	5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	-	100 persen	4.714.900.000,00	2.960.936.421,00	3.859.373.388,00						3.837.120.000,00		
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Dokumen pengembangan ASN, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	-	2 jenis	3.714.900.000,00	2.888.224.421,00	2.888.224.421,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	ASN Kota Cirebon		3.627.645.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.002	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
							4 Laporan	5 Laporan	3.675.000.000,00	2.853.224.521,00	3.799.587.488,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			3.585.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.002	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
							2 Dokumen	2 Dokumen	39.900.000,00	34.999.900,00	34.999.900,00	kota Cirebon, Kejaksaan, Kebonbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			41.895.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					INSPEKTORAT DAERAH					15.840.890.019,00	17.367.888.276,00	15.019.072.125,00						17.205.194.302,00	

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah			12	13			Nasional	Daerah			17		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	36 Orang/bulan	6.308.664.253,00	6.469.468.327,00	6.618.738.629,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-			6.939.530.678,00	KECAMATAN KEJAKSAN		
7	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	5.516.930,00	5.516.930,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN		
7	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	5.916.316,00	5.916.316,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN		
7	01	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi BMD Perangkat Daerah	-		3 jenis	3 jenis	50.000.000,00	18.975.563,00	18.975.563,00			-	-	Aparatur Kecamatan Kejaksaan		55.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN		
7	01	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1.646.102,00	1.646.102,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN		
7	01	01	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	13.083.982,00	13.083.982,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN		
7	01	01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	10.000.000,00	4.245.479,00	4.245.479,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN		

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah							Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 jenis	1 jenis	220.000.000,00	99.284.500,00	99.284.500,00			-	-	Aparatur Kecamatan Kejaksaan	242.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
7	01	01	2.005.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	220.000.000,00	99.284.500,00	57.674.500,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		242.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			8 jenis	8 jenis	735.000.000,00	654.908.840,00	654.908.840,00			-	-	Aparatur Kecamatan Kejaksaan	808.500.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
7	01	01	2.006.01	Penyediaan Komponen Instalasi																	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	25.000.000,00	45.946.515,00	63.446.515,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		27.500.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
7	01	01	2.006.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5 Paket	90.000.000,00	71.314.243,00	71.314.243,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		99.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
7	01	01	2.006.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	50.000.000,00	43.850.837,00	43.850.837,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
7	01	01	2.006.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	69.212.675,00	92.702.743,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		110.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
7	01	01	2.006.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	60.000.000,00	59.493.582,00	59.226.857,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		66.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
7	01	01	2.006.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	173.498.000,00	138.392.000,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		187.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
7	01	01	2.006.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	65.725.188,00	83.725.188,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		110.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
7	01	01	2.006.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	125.867.800,00	159.212.800,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		154.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	

No	Kode			Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			4 jenis	4 jenis	750.000.000,00	480.320.553,00	480.320.553,00			-	-	16	Aparatur Kecamatan Kejaksaan		825.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN
7	01	01	2.007	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	-	-	-			165.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
7	01	01	2.007	Pengadaan Mebel																		
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	36 Unit	100.000.000,00	73.884.536,00	61.344.716,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN
7	01	01	2.007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	13 Unit	300.000.000,00	226.575.470,00	167.361.802,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			330.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN
7	01	01	2.007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	35 Unit	200.000.000,00	179.860.547,00	175.023.649,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			220.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 jenis	3 jenis	860.000.000,00	869.530.788,00	869.530.788,00			-	-	-	Aparatur Kecamatan Kejaksaan		946.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	81.960.000,00	64.497.396,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			121.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	266.556.788,00	271.627.508,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			275.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN
7	01	01	2.008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	521.014.000,00	521.014.000,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			550.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			6 jenis	6 jenis	960.000.000,00	712.524.790,00	712.524.790,00			-	-	-	Aparatur Kecamatan Kejaksaan		1.031.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							12 Dokumen	12 Dokumen	297.000.000,00	222.789.521,00	196.990.753,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			326.700.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
7	01	02	2.0	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	1 jenis	1 jenis	22.000.000,00	10.455.822,00	10.455.822,00		-	-	Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kejaksaan		24.200.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
7	01	02	2.0	00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															
							4 Laporan	4 Laporan	22.000.000,00	10.455.822,00	10.455.822,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.200.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
##	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi		60 persen	60 persen	5.262.632.510,00	3.883.019.769,00	3.618.454.297,00						5.787.391.974,00		
7	01	03	2.0	3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	4 jenis	4 jenis	1.360.000.000,00	973.908.963,00	973.908.963,00		-	-	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		1.606.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
7	01	03	2.0	00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan															
								296 Lembaga Kemasya katan	322 Lembaga Kemasyarakatan	950.000.000,00	723.464.558,00	763.370.427,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.155.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN
7	01	03	2.0	00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															
							5 Lembaga Kemasya katan	6 Lembaga Kemasya katan	250.000.000,00	214.297.985,00	144.074.265,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
7	01	03	2.0	00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
							4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	21.627.400,00	13.199.736,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
7	01	03	2.0	00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna															
							1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	14.519.020,00	14.085.020,00	Kota Cirebon, Kejaksaan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			66.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	
##	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan (koordinasi kepada pihak terkait) gangguan ketertaman dan ketertiban umum		100 persen	100 persen	100.000.000,00	34.936.491,00	34.936.491,00						110.000.000,00		
7	01	04	2.0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	2 jenis	2 jenis	70.000.000,00	26.540.994,00	26.540.994,00		-	-	Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kejaksaan		77.000.000,00	KECAMATAN KEJAKSAN	

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas											
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.446.596,00	11.836.041,00	7.677.432,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			12.427.843,00	KECAMATAN KESAMBI							
7	01	01	2.0	00	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	43.538.763,00	35.175.920,00	35.175.920,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			37.383.145,00	KECAMATAN KESAMBI							
7	01	01	2.0	00	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	372.315.297,00	388.332.000,00	258.888.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			407.748.600,00	KECAMATAN KESAMBI							
7	01	01	2.0	00	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu																							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	28.403.910,00	45.502.800,00	38.983.800,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			47.777.940,00	KECAMATAN KESAMBI							
7	01	01	2.0	00	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	276.234.615,00	280.513.652,00	290.474.052,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			294.539.335,00	KECAMATAN KESAMBI							
7	01	01	2.0	00	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		4 Jenis	2 Jenis	470.655.404,00	67.444.128,00	67.444.128,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Kecamatan Kesambi Kota Cirebon		290.686.547,00	KECAMATAN KESAMBI							
7	01	01	2.0	00	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																							
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	42.436.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	KECAMATAN KESAMBI							
7	01	01	2.0	00	05	Pengadaan Mebel																							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	100.566.790,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			56.388.865,00	KECAMATAN KESAMBI							
7	01	01	2.0	00	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	7 Unit	200.921.652,00	39.701.317,00	39.701.317,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			159.569.301,00	KECAMATAN KESAMBI							

No		Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025			APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025						Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	01	01	2.0 7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			7 Unit	3 Unit	126.730.962,00	27.742.811,00	27.742.811,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		74.728.381,00	KECAMATAN KESAMBI		
7	01	01	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		2 Jenis	2 Jenis	860.986.805,00	961.790.877,00	961.790.877,00		-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Kecamatan Kesambi Kota Cirebon	990.646.775,00	KECAMATAN KESAMBI		
7	01	01	2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	274.966.184,00	308.824.000,00	315.590.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		318.088.720,00	KECAMATAN KESAMBI		
7	01	01	2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	586.020.621,00	652.966.877,00	652.966.877,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		672.558.055,00	KECAMATAN KESAMBI		
7	01	01	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		4 Jenis	4 Jenis	1.321.794.627,00	570.213.247,00	570.213.247,00		-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Kecamatan Kesambi Kota Cirebon	586.879.919,00	KECAMATAN KESAMBI		
7	01	01	2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			65 Unit	56 Unit	292.749.090,00	324.689.941,00	303.365.640,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		333.990.829,00	KECAMATAN KESAMBI		
7	01	01	2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			6 Unit	6 Unit	950.000.000,00	175.718.306,00	175.718.306,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		180.989.940,00	KECAMATAN KESAMBI		
7	01	01	2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			60 Unit	60 Unit	49.236.369,00	41.180.000,00	41.180.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		42.415.400,00	KECAMATAN KESAMBI		
7	01	01	2.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah			12	13				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	41 Unit	29.809.168,00	28.625.000,00	28.625.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			29.483.750,00	KECAMATAN KESAMBI	
#7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan			100,00 Persen	100,00 Persen	29.191.486,00	20.230.344,00	20.230.344,00							21.241.861,00		
7	01	02	2.0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	1 Jenis	1 Jenis	10.609.000,00	10.173.029,00	10.173.029,00		-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Kecamatan Kesambi Kota Cirebon		10.681.680,00	KECAMATAN KESAMBI	
7	01	02	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.609.000,00	10.173.029,00	10.173.029,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			10.681.680,00	KECAMATAN KESAMBI	
7	01	02	2.0	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	1 Jenis	1 Jenis	18.582.486,00	10.057.315,00	10.057.315,00		-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Kecamatan Kesambi Kota Cirebon		10.560.181,00	KECAMATAN KESAMBI	
7	01	02	2.0	00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	18.582.486,00	10.057.315,00	10.057.315,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			10.560.181,00	KECAMATAN KESAMBI	
#7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LUK Tertib Administrasi			75,00 Persen	75,00 Persen	8.715.867.478,00	6.915.183.516,00	6.226.796.550,00							7.742.770.441,00		
7	01	03	2.0	3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	-	2 Jenis	1 Jenis	1.885.687.798,00	1.413.053.734,00	1.413.053.734,00		-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Kecamatan Kesambi Kota Cirebon		1.455.445.346,00	KECAMATAN KESAMBI	
7	01	03	2.0	00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.885.687.798,00	1.413.053.734,00	1.400.405.232,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			1.455.445.346,00	KECAMATAN KESAMBI	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
##	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) gangguan ketertaman dan ketertiban umum				100.00 Persen	100.00 Persen	82.728.828,00	34.364.278,00	34.364.278,00							250.705.758,00		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Ketertenteraman dan Ketertiban Umum	-			1 Jenis	1 Jenis	52.180.000,00	7.776.889,00	7.776.889,00		-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Kecamatan Kesambi Kota Cirebon		222.789.000,00		KECAMATAN KESAMBI	
7	01	04	2.001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	52.180.000,00	7.776.889,00	7.776.889,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		222.789.000,00		KECAMATAN KESAMBI	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-			1 Jenis	1 Jenis	30.548.828,00	26.587.389,00	26.587.389,00		-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Kecamatan Kesambi Kota Cirebon		27.916.758,00		KECAMATAN KESAMBI	
7	01	04	2.002		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	30.548.828,00	26.587.389,00	26.587.389,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		27.916.758,00		KECAMATAN KESAMBI	
##	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) konflik sosial				100.00 Persen	100.00 Persen	16.856.216,00	27.200.352,00	23.350.000,00							28.560.370,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			1 Jenis	1 Jenis	16.856.216,00	27.200.352,00	27.200.352,00		-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Kecamatan Kesambi Kota Cirebon		28.560.370,00		KECAMATAN KESAMBI	
7	01	05	2.001	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	16.856.216,00	27.200.352,00	23.350.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		28.560.370,00		KECAMATAN KESAMBI	
					KELURAHAN KESAMBI							21.175.439.850,00	18.445.429.392,00	17.717.256.596,00							20.286.520.475,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7			UNSUR KEWILAYAHAN						21.175.439.850,00	18.445.429.392,00	17.717.256.596,00							20.286.520.475,00	
7	01		KECAMATAN						21.175.439.850,00	18.445.429.392,00	17.717.256.596,00							20.286.520.475,00	
##	7	01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi			75.00 Persen	75.00 Persen	8.715.867.478,00	6.915.183.516,00	6.226.796.550,00							7.742.770.441,00	
7	01	03 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		5 Kelurahan	5 Kelurahan	6.830.179.680,00	5.502.129.782,00	5.502.129.782,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Kelurahan Kesambi		6.287.325.095,00	KECAMATAN KESAMBI
7	01	03 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	49.999.772,00	49.999.772,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			51.500.000,00	KECAMATAN KESAMBI
7	01	03 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			13 Unit	20 Unit	730.843.025,00	518.592.055,00	518.591.931,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			665.637.500,00	KECAMATAN KESAMBI
7	01	03 2 00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	292.083.498,00	295.728.122,00	171.676.924,00	Kota Cirebon, Kesambi, Kesambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			304.600.054,00	KECAMATAN KESAMBI
			KELURAHAN DRAJAT						21.175.439.850,00	18.445.429.392,00	17.717.256.596,00							20.286.520.475,00	
7			UNSUR KEWILAYAHAN						21.175.439.850,00	18.445.429.392,00	17.717.256.596,00							20.286.520.475,00	
7	01		KECAMATAN						21.175.439.850,00	18.445.429.392,00	17.717.256.596,00							20.286.520.475,00	
##	7	01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi			75.00 Persen	75.00 Persen	8.715.867.478,00	6.915.183.516,00	6.226.796.550,00							7.742.770.441,00	
7	01	03 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		5 Kelurahan	5 Kelurahan	6.830.179.680,00	5.502.129.782,00	5.502.129.782,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Kelurahan Drajat		6.287.325.095,00	KECAMATAN KESAMBI
7	01	03 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah			12	13			Nasional	Daerah					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	364.000.000,00	374.499.786,00	298.024.011,00		Kota Cirebon, Kesambi, Pekirangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		385.735.000,00	KECAMATAN KESAMBI	
				KELURAHAN SUNYARAGI						21.175.439.850,00	18.445.429.392,00	17.717.256.596,00						20.286.520.475,00			
7				UNSUR KEWILAYAHAN						21.175.439.850,00	18.445.429.392,00	17.717.256.596,00						20.286.520.475,00			
7	01			KECAMATAN						21.175.439.850,00	18.445.429.392,00	17.717.256.596,00						20.286.520.475,00			
##	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi			75,00 Persen	75,00 Persen	8.715.867.478,00	6.915.183.516,00	6.226.796.550,00						7.742.770.441,00			
7	01	03	2.0.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		5 Kelurahan	5 Kelurahan	6.830.179.680,00	5.502.129.782,00	5.502.129.782,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Kelurahan Sunyaragi	6.287.325.095,00		KECAMATAN KESAMBI	
7	01	03	2.0.00.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	49.999.840,00	49.999.840,00		Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		51.500.000,00	KECAMATAN KESAMBI	
7	01	03	2.0.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	8 Unit	930.171.473,00	638.023.225,00	638.023.225,00		Kota Cirebon, Kesambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		657.163.944,00	KECAMATAN KESAMBI	
7	01	03	2.0.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	339.999.930,00	375.390.098,00	225.575.588,00		Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		386.651.890,00	KECAMATAN KESAMBI	
				KECAMATAN HARJAMUKTI						21.878.233.274,00	19.640.308.611,00	18.960.031.915,00						22.033.900.168,00			
7				UNSUR KEWILAYAHAN						21.878.233.274,00	19.640.308.611,00	18.960.031.915,00						22.033.900.168,00			
7	01			KECAMATAN						21.878.233.274,00	19.640.308.611,00	18.960.031.915,00						22.033.900.168,00			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
##	7	01	01				100 Persen	100 Persen	11.270.128.263,00	12.103.121.193,00	12.146.393.882,00										
7	01	01	2.0.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya informasi perencanaan sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	-	100,00 Persen	100,00 Persen	107.392.550,00	107.392.550,00	107.392.550,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Kecamatan Harjamukti		113.836.103,00	KECAMATAN HARJAMUKTI		
7	01	01	2.0.00.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	73.291.550,00	73.291.550,00	59.275.950,00	Kota Cirebon, Harjamukti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		77.689.043,00	KECAMATAN HARJAMUKTI			
7	01	01	2.0.00.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	Kota Cirebon, Harjamukti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		2.766.600,00	KECAMATAN HARJAMUKTI			
7	01	01	2.0.00.1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	Kota Cirebon, Harjamukti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		2.766.600,00	KECAMATAN HARJAMUKTI			
7	01	01	2.0.00.1.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	Kota Cirebon, Harjamukti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		2.766.600,00	KECAMATAN HARJAMUKTI			
7	01	01	2.0.00.1.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD																	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	Kota Cirebon, Harjamukti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		2.766.600,00	KECAMATAN HARJAMUKTI			
7	01	01	2.0.00.1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7 Laporan	7 Laporan	19.185.000,00	19.185.000,00	19.185.000,00	Kota Cirebon, Harjamukti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		20.336.100,00	KECAMATAN HARJAMUKTI			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional					Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	1.513.138.730,00	1.119.815.233,00	1.043.805.633,00	Kota Cirebon, Harjamukti, Kalijaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			1.521.868.161,00	KECAMATAN HARJAMUKTI	
7	01	03	2.0	00	04	Evaluasi Kelurahan																	
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Harjamukti, Kalijaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			0,00	KECAMATAN HARJAMUKTI	
						KELURAHAN KECAPI						21.878.233.274,00	19.640.308.611,00	18.960.031.915,00							22.033.900.168,00		
7						UNSUR KEWILAYAHAN						21.878.233.274,00	19.640.308.611,00	18.960.031.915,00							22.033.900.168,00		
7	01					KECAMATAN						21.878.233.274,00	19.640.308.611,00	18.960.031.915,00							22.033.900.168,00		
#	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan			5 Dokumen	5 Dokumen	10.308.105.011,00	7.337.187.418,00	6.692.993.073,00							9.696.246.856,00		
7	01	03	2.0	00	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terpenuhinya Pemberdayaan di Kelurahan Kecapi	-		100 Persen	100 Persen	9.608.105.011,00	6.837.187.418,00	6.837.187.418,00			-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Kelurahan Kecapi		8.954.246.856,00	KECAMATAN HARJAMUKTI	
7	01	03	2.0	00	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				19 Lembaga Kemasyara katan	19 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Cirebon, Harjamukti, Kecapi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			63.600.000,00	KECAMATAN HARJAMUKTI	
7	01	03	2.0	00	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				19 Unit	19 Unit	425.386.850,00	574.038.838,00	574.038.838,00	Kota Cirebon, Harjamukti, Kecapi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			487.141.653,00	KECAMATAN HARJAMUKTI	
7	01	03	2.0	00	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	1.529.097.972,00	904.677.144,00	802.599.190,00	Kota Cirebon, Harjamukti, Kecapi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.			1.106.403.750,00	KECAMATAN HARJAMUKTI	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
7	01	03	2.0	00	04	Evaluasi Kelurahan																
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	kota Cirebon, Harjamukti, Kecapi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	5.000.000,00	KECAMATAN HARJAMUKTI		
						KELURAHAN LARANGAN						21.878.233.274,00	19.640.308.611,00	18.960.031.915,00				22.033.900.168,00				
7						UNSUR KEWILAYAHAN						21.878.233.274,00	19.640.308.611,00	18.960.031.915,00				22.033.900.168,00				
7	01					KECAMATAN						21.878.233.274,00	19.640.308.611,00	18.960.031.915,00				22.033.900.168,00				
##	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			5 Dokumen	5 Dokumen	10.308.105.011,00	7.337.187.418,00	6.692.993.073,00				9.696.246.856,00				
7	01	03	2.0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan di Kelurahan se-Kecamatan Harjamukti Terpenuhinya Pemberdayaan di Kelurahan Larangan	-		100,00 Persen	100,00 Persen	9.608.105.011,00	6.837.187.418,00	6.837.187.418,00		-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Kelurahan Larangan	8.954.246.856,00	KECAMATAN HARJAMUKTI		
7	01	03	2.0	00	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				19 Lembaga Kemasya katan	19 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	kota Cirebon, Harjamukti, Larangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	63.600.000,00	KECAMATAN HARJAMUKTI		
7	01	03	2.0	00	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				19 Unit	19 Unit	448.316.422,00	396.968.409,00	396.968.409,00	Kota Cirebon, Harjamukti, Larangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	511.446.999,00	KECAMATAN HARJAMUKTI		
7	01	03	2.0	00	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	1.593.586.866,00	1.078.306.040,00	929.832.347,00	Kota Cirebon, Harjamukti, Larangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	1.170.003.750,00	KECAMATAN HARJAMUKTI		
7	01	03	2.0	00	04	Evaluasi Kelurahan																
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Harjamukti, Larangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	5.000.000,00	KECAMATAN HARJAMUKTI		
						KELURAHAN ARGASUNYA						21.878.233.274,00	19.640.308.611,00	18.960.031.915,00				22.033.900.168,00				

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2 Laporan	21.068.000,00	21.068.000,00	20.468.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		22.121.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	
7	01	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-			2 jenis	2 jenis	6.377.300.801,00	7.505.071.397,00	7.505.071.397,00			-	-	Kota Cirebon	6.968.767.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	
7	01	01	2.0	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.369.900.801,00	7.497.671.397,00	7.657.686.766,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-		6.960.997.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	
7	01	01	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7.770.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	
7	01	01	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			2 jenis	2 jenis	42.514.004,00	42.560.000,00	42.560.000,00			-	-	Kota Cirebon	44.639.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	
7	01	01	2.0	00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.675.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	
7	01	01	2.0	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	39.014.004,00	39.060.000,00	40.823.163,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40.964.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	
7	01	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-			37 Orang	45 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00			-	-	Kota Cirebon	84.000.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	
7	01	01	2.0	5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		84.000.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum	-	6 Dokumen	7 Dokumen	862.900.390,00	760.131.514,00	760.131.514,00			-	-	Kota Cirebon	906.044.200,00		KECAMATAN LEMAHWUNGKUK				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															103.341.000,00		KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	98.420.140,00	137.035.113,00	137.035.113,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			6 Paket	2 Paket	58.982.400,00	81.185.396,00	81.185.396,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13.440.000,00					
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	72.019.750,00	73.858.905,00	66.062.115,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75.620.000,00					
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	272.244.000,00	221.322.000,00	189.205.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		285.856.200,00					
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	145.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		152.250.000,00					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	212.734.100,00	213.230.100,00	223.654.460,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		271.862.000,00					
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.675.000,00					
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4 jenis	3 jenis	509.484.870,00	299.735.205,00	299.735.205,00			-	-	Kota Cirebon	429.958.000,00					
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00					
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel																		
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			100 Unit	31 Unit	100.000.000,00	56.065.592,00	56.065.592,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		105.000.000,00					

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	50 Unit	32.000.000,00	33.058.000,00	33.058.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.600.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
7	01	01	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				40 Unit	40 Unit	48.544.000,00	50.220.000,00	50.220.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.971.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
###	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan				100 persen	100 persen	306.494.348,00	99.363.110,00	170.782.794,00							321.818.000,00	
7	01	02	2.0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			2 jenis	1 jenis	94.203.932,00	95.064.800,00	95.064.800,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon		98.914.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
7	01	02	2.0	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17 Dokumen	4 Dokumen	94.203.932,00	95.064.800,00	63.580.303,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.914.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
7	01	02	2.0	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			1 jenis	1 jenis	212.290.416,00	4.298.310,00	4.298.310,00			-	-	Kota Cirebon		222.904.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
7	01	02	2.0	00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	212.290.416,00	4.298.310,00	107.202.491,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			222.904.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
###	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi				75 persen	75 persen	7.723.806.629,00	5.524.613.759,00	4.866.966.110,00							7.795.407.925,00	
7	01	03	2.0	3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Dokumen Hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			3 Dokumen	3 Dokumen	1.432.054.704,00	1.134.995.284,00	1.134.995.284,00			-	-	Kota Cirebon		1.503.656.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
7	01	03	2.0	00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasya katan	10 Lembaga Kemasyarakatan	1.274.227.524,00	1.066.768.500,00	1.054.340.663,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.337.938.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK

No		Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Praktikan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2025				Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyarakatan	154.327.180,00	64.726.784,00	54.609.084,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		162.043.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK			
7	01	03	2.003	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.675.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK			
#	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan (koordinasi kepada pihak terkait) gangguan ketertarikan dan ketertiban umum		100 persen	100 persen	94.814.004,00	44.835.000,00	24.795.000,00						99.554.000,00				
7	01	04	2.011	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum	Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum	-	1 jenis	1 jenis	86.764.004,00	36.785.000,00	36.785.000,00			-	-	Kota Cirebon	91.102.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK			
7	01	04	2.001	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			4 Laporan	4 Laporan	86.764.004,00	36.785.000,00	16.745.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		91.102.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK			
7	01	04	2.002	Koordinasi Penerapan dan Pengagakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen Hasil Koordinasi Penerapan dan Pengagakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	2 Dokumen	1 Dokumen	8.050.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00			-	-	Kota Cirebon	8.452.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK			
7	01	04	2.002	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			1 Laporan	1 Laporan	8.050.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8.452.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK			
#	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan (Koordinasi kepada pihak terkait) konflik sosial		100 persen	100 persen	79.860.000,00	29.937.000,00	26.762.000,00						83.852.000,00				

No			Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Prioritas											
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi		Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			2 jenis	2 jenis	79.860.000,00	29.937.000,00	29.937.000,00			14	15	-	16	Kota Cirebon		83.852.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	
7	01	05	2.00	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun																				
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	68.930.000,00	18.951.000,00	15.776.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					72.376.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	
7	01	05	2.00	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																				
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.930.000,00	10.986.000,00	10.986.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					11.476.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	
						KEKURAHAN LEMAHWUNGKUK						18.207.205.414,00	15.766.264.625,00	15.361.892.832,00									18.970.569.325,00		
7						UNSUR KEWILAYAHAN						18.207.205.414,00	15.766.264.625,00	15.361.892.832,00									18.970.569.325,00		
7	01					KECAMATAN						18.207.205.414,00	15.766.264.625,00	15.361.892.832,00									18.970.569.325,00		
##	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEKURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi				75 persen	75 persen	7.723.806.629,00	5.524.613.759,00	4.866.966.110,00									7.795.407.925,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen Hasil Pemberdayaan Kelurahan	-			3 jenis	3 jenis	6.291.751.925,00	4.389.618.475,00	4.389.618.475,00				-	-			Kota Cirebon	6.291.751.925,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	
7	01	03	2.00	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Lemahwungkuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					28.000.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	
7	01	03	2.00	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	515.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Lemahwungkuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-		515.000.000,00		KECAMATAN LEMAHWUNGKUK		
7	01	03	2.00	00	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas	724.622.450,00	422.622.450,00	176.174.472,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Lemahwungkuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-		724.622.450,00		KECAMATAN LEMAHWUNGKUK		
			KELURAHAN PANJUNAN						18.207.205.414,00	15.766.264.625,00	15.361.892.832,00							18.970.569.325,00			
7			UNSUR KEWILAYAHAN						18.207.205.414,00	15.766.264.625,00	15.361.892.832,00							18.970.569.325,00			
7	01		KECAMATAN						18.207.205.414,00	15.766.264.625,00	15.361.892.832,00							18.970.569.325,00			
##	7	01	03	2.00	00	03	75 persen	75 persen	7.723.806.629,00	5.524.613.759,00	4.866.966.110,00							7.795.407.925,00			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
7	01	03	2.0	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen Hasil Pemberdayaan Kelurahan	-			3 jenis	3 jenis	6.291.751.925,00	4.389.618.475,00	4.389.618.475,00		-	-	Kota Cirebon	6.291.751.925,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
7	01	03	2.0	2	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Masyarakat	6 Lembaga Masyarakat	36.000.000,00	35.266.700,00	35.266.700,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Panjunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36.000.000,00		KECAMATAN LEMAHWUNGKUK		
7	01	03	2.0	00	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	7 Unit	765.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Panjunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-		765.000.000,00		KECAMATAN LEMAHWUNGKUK		
7	01	03	2.0	00	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	762.448.050,00	463.181.351,00	327.682.127,00	Kota Cirebon, Lemah Wungkuk, Panjunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		762.448.050,00		KECAMATAN LEMAHWUNGKUK		
			KELURAHAN KASEPUHAN						18.207.205.414,00	15.766.264.625,00	15.361.892.832,00							18.970.569.325,00			

No	Kode			Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
									Sebelum	Sesudah							Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
7	01			UNSUR KEWILAYAHAN					18.207.205.414,00	15.766.264.625,00	15.361.892.832,00							18.970.569.325,00				
7	01			KECAMATAN					18.207.205.414,00	15.766.264.625,00	15.361.892.832,00							18.970.569.325,00				
##	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi				75 persen	75 persen	7.723.806.629,00	5.524.613.750,0	4.866.966.110,00					7.795.407.925,00				
	7	01	03	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen Hasil Pemberdayaan Kelurahan	-			3 jenis	3 jenis	6.291.751.925,00	4.389.618.475,0	4.389.618.475,00		-	-	Kota Cirebon	6.291.751.925,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK		
7	01	03	2.0 2	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyaraktan	6 Lembaga Kemasyarakatan	34.000.000,00	35.480.400,00	35.480.400,00	Kota Cirebon, Lemah Wungluk, Kesepuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		34.000.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK		
7	01	03	2.0 2	00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	6 Unit	665.000.000,00	585.660.000,00	585.660.000,00	Kota Cirebon, Lemah Wungluk, Kesepuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-		665.000.000,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK		
7	01	03	2.0 2	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	730.623.414,00	393.483.014,00	307.228.494,00	Kota Cirebon, Lemah Wungluk, Kesepuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-		730.623.414,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK		
					KELURAHAN PEGAMBIRAN						18.207.205.414,00	15.766.264.625,00	15.361.892.832,00					18.970.569.325,00				
7					UNSUR KEWILAYAHAN						18.207.205.414,00	15.766.264.625,00	15.361.892.832,00					18.970.569.325,00				
7	01				KECAMATAN						18.207.205.414,00	15.766.264.625,00	15.361.892.832,00					18.970.569.325,00				
##	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi				75 persen	75 persen	7.723.806.629,00	5.524.613.750,0	4.866.966.110,00					7.795.407.925,00				
	7	01	03	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen Hasil Pemberdayaan Kelurahan	-			3 jenis	3 jenis	6.291.751.925,00	4.389.618.475,0	4.389.618.475,00		-	-	Kota Cirebon	6.291.751.925,00	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK		
7	01	03	2.0 2	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	

[illegible]

[illegible]

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp) RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah						Nasional	Daerah					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	01	01	2.0.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			4 jenis 4 Unit	4 jenis	857.474.600,00	740.488.324,00	740.488.324,00		13	14	-	-	16	Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon	883.898.900,00	KECAMATAN PEKALIPAN
7	01	01	2.0.00.9		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	39 Unit	215.000.000,00	220.291.750,00	220.291.750,00	Kota Cirebon, Pekalipan, Semua kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			221.450.000,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
7	01	01	2.0.00.9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	6 Unit	577.474.600,00	463.751.574,00	620.097.803,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Cirebon, Pekalipan, Semua kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			594.798.900,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
7	01	01	2.0.00.9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				52 Unit	52 Unit	35.000.000,00	23.880.000,00	23.880.000,00	Kota Cirebon, Pekalipan, Semua kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			36.750.000,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
7	01	01	2.0.00.9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				34 Unit	34 Unit	30.000.000,00	32.565.000,00	32.565.000,00	Kota Cirebon, Pekalipan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.900.000,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
##	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Pekalipan				100 Persen	100 persen	121.368.700,00	117.629.795,00	132.973.175,00							125.009.800,00		
7	01	02	2.0.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			2 jenis 5 Dokumen	1 jenis	71.368.700,00	110.345.279,00	110.345.279,00			-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon		73.509.800,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
7	01	02	2.0.00.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	3 Dokumen	71.368.700,00	110.345.279,00	125.688.659,00	Kota Cirebon, Pekalipan, Semua kel/Desa	Pajak Daerah	-	6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.			73.509.800,00	KECAMATAN PEKALIPAN	

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				78 Orang	0 Orang	50.000.000,00	30.994.210,00	0,00	Kota Cirebon, Pekalipan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			51.500.000,00	KECAMATAN PEKALIPAN
7	01	05	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	31.505.144,00	31.505.144,00	Kota Cirebon, Pekalipan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.750.000,00	KECAMATAN PEKALIPAN
			KELURAHAN PEKALIPAN						14.934.890.722,00	13.760.105.681,00	13.210.975.794,00							15.468.045.250,00	
7			UNSUR KEWILAYAHAN						14.934.890.722,00	13.760.105.681,00	13.210.975.794,00							15.468.045.250,00	
7	01		KECAMATAN						14.934.890.722,00	13.760.105.681,00	13.210.975.794,00							15.468.045.250,00	
#7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi			60 Persen	60 Persen	5.208.511.164,00	3.789.574.291,00	3.255.406.482,00							5.364.766.900,00	
7	01	03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		12 dokumen	12 dokumen	3.852.795.164,00	3.462.453.031,00	3.462.453.031,00			-	-	Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon		3.968.379.400,00	KECAMATAN PEKALIPAN
7	01	03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				88 Lembaga Kemasyarakatan	88 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Cirebon, Pekalipan	Pajak Daerah	-	-			25.750.000,00	KECAMATAN PEKALIPAN
7	01	03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	502.414.188,00	279.943.300,00	313.375.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Cirebon, Pekalipan	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			517.486.700,00	KECAMATAN PEKALIPAN
7	01	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional				Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	466.476.292,00	617.187.410,00	458.315.610,00	Kota Cirebon, Pekalipan, Pecalipan	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			480.470.600,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
					KELURAHAN PULASAREN							14.934.890.722,00	13.760.105.681,00	13.210.975.794,00						15.468.045.250,00			
7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.934.890.722,00	13.760.105.681,00	13.210.975.794,00						15.468.045.250,00			
7	01				KECAMATAN							14.934.890.722,00	13.760.105.681,00	13.210.975.794,00						15.468.045.250,00			
##	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi				60 Persen	60 Persen	5.208.511.164,00	3.789.574.291,00	3.255.406.482,00						5.364.766.900,00			
7	01	03	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			12 dokumen	12 dokumen	3.852.795.164,00	3.462.453.031,00	3.462.453.031,00			-	-	Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon		3.968.379.400,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
7	01	03	2.0	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				66 Lembaga Kemasyarakatan	66 Lembaga Kemasyarakatan	25.941.100,00	25.053.250,00	25.053.250,00	Kota Cirebon, Pekalipan, Pulasaren	Pajak Daerah	-	-			26.719.400,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
7	01	03	2.0	00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	427.233.974,00	153.891.500,00	153.975.500,00	Kota Cirebon, Pekalipan, Pulasaren	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			440.051.000,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
7	01	03	2.0	00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	550.106.605,00	609.426.334,00	508.078.634,00	Kota Cirebon, Pekalipan, Pulasaren	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-			566.609.900,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
					KELURAHAN JAGASATRI							14.934.890.722,00	13.760.105.681,00	13.210.975.794,00						15.468.045.250,00			
7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.934.890.722,00	13.760.105.681,00	13.210.975.794,00						15.468.045.250,00			
7	01				KECAMATAN							14.934.890.722,00	13.760.105.681,00	13.210.975.794,00						15.468.045.250,00			
##	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi				60 Persen	60 Persen	5.208.511.164,00	3.789.574.291,00	3.255.406.482,00						5.364.766.900,00			

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		12 dokumen undefined	12 dokumen	3.852.795.164,00	3.462.453.031,00	3.462.453.031,00			-	-	Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon	3.968.379.400,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
7	01	03	2.002	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			83 Lembaga Kemasyarakatan	83 Lembaga Kemasyarakatan	28.930.000,00	27.587.000,00	27.587.000,00	Kota Cirebon, Pekalipan, Jagasatru	Pajak Daerah	-	-		29.797.900,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
7	01	03	2.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			9 Unit	9 Unit	464.645.144,00	248.346.320,00	247.801.845,00	Kota Cirebon, Pekalipan, Jagasatru	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	3. Pengendalian Banjir dan Peningkatan Kualitas Lingkungan.		478.584.500,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
7	01	03	2.002	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	434.425.144,00	642.753.184,00	500.425.568,00	Kota Cirebon, Pekalipan, Jagasatru	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.		447.457.900,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
				KELURAHAN PEKALANGAN						14.934.890.722,00	13.760.105.681,00	13.210.975.794,00								
7				UNSUR KEWILAYAHAN						14.934.890.722,00	13.760.105.681,00	13.210.975.794,00								
7	01			KECAMATAN						14.934.890.722,00	13.760.105.681,00	13.210.975.794,00								
##	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKK Tertib Administrasi			60 Persen	60 Persen	5.208.511.164,00	3.789.574.291,00	3.255.406.482,00						5.364.766.900,00		
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		12 dokumen undefined	12 dokumen	3.852.795.164,00	3.462.453.031,00	3.462.453.031,00			-	-	Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon	3.968.379.400,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
7	01	03	2.002	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			74 Lembaga Kemasyara katan	74 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	25.858.380,00	25.858.380,00	Kota Cirebon, Pekalipan, Pekalangan	Pajak Daerah	-	-		20.600.000,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
7	01	03	2.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			2 Unit	2 Unit	519.999.000,00	155.881.724,00	260.144.253,00	Kota Cirebon, Pekalipan, Pekalangan	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-		535.599.000,00	KECAMATAN PEKALIPAN	

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	01	03	2.000.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas Ormas	4 Pokmas / Ormas	387.623.717,00	651.524.629,00	470.294.013,00	Kota Cirebon, Pekalipan, Pekalongan	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-		399.252.500,00	KECAMATAN PEKALIPAN	
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					15.641.064.037,00	15.548.052.934,00	14.982.676.408,00							18.753.395.428,00		
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					15.641.064.037,00	15.548.052.934,00	14.982.676.408,00							18.753.395.428,00		
8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					15.641.064.037,00	15.548.052.934,00	14.982.676.408,00							18.753.395.428,00		
##	8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah	-		94 Poin	94 Poin	8.251.440.609,00	8.396.842.186,00	8.069.618.927,00						9.298.582.650,00		
8	01	01	2.001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		3 dokumen	3 dokumen	72.755.960,00	55.951.600,00	55.951.600,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Pegawai Bakesbangpol Kota Cirebon		76.393.758,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	22.500.000,00	19.129.840,00	10.367.440,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			23.625.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.350.000,00	2.036.420,00	2.036.420,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			3.517.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	2.036.420,00	2.036.420,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			3.675.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.001	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	3.800.000,00	2.036.420,00	2.036.420,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			3.990.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.001	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000,00	2.036.420,00	2.036.420,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			3.937.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
8	01	01	2.0	00	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9.700.000,00	7.497.680,00	7.497.680,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		10.185.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.0	00	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	8 Laporan	26.155.960,00	21.178.400,00	14.168.480,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		27.463.758,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-		2 dokumen	2 dokumen	4.320.228.000,00	4.729.421.645,00	4.729.421.645,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Bakesbangpol Kota Cirebon	4.592.647.579,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.0	00	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.305.128.000,00	4.726.343.321,00	4.913.277.604,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungn Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		4.520.384.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.0	00	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.100.000,00	3.078.324,00	3.078.324,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		3.255.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.0	00	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	0 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		69.008.179,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				250 Orang	549 Orang	225.000.000,00	272.005.618,00	250.602.093,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		131.250.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	02	2.0	00	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 Orang	30 Orang Orang	50.000.000,00	46.171.182,00	26.773.685,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		52.500.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	02	2.0	00	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	20.550.000,00	10.550.000,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		26.250.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	02	2.0	00	07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka															
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	81.980.502,00	77.328.719,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		78.750.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	02	2.0	00	08	Pembentukan Paskibraka															
			Jumlah Paskibraka				32 Orang	32 Orang	858.613.000,00	906.942.859,00	908.263.154,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		800.056.950,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	02	2.0	00	09	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila															
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.999.975,00	25.637.500,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		52.500.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	02	2.0	00	10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila															
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	22.344.475,00	0,00	kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.		52.500.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

[illegible]

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				125 Orang	100 Orang	887.762.800,00	903.720.690,00	879.581.910,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			1.050.275.940,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	04	2.0	00	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.				40 Orang	40 Orang	91.939.000,00	0,00	0,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			96.535.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	04	2.0	00	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	75.104.000,00	15.260.000,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			63.586.005,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
#	8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Tingkat Pemahaman Masyarakat pada P4GN dan Penanganan Potensi Konflik Antar Umat Beragama				80 Persen	80 Persen	475.000.000,00	421.035.495,00	332.203.836,00							780.733.800,00		
8	01	05	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Peserta yang Aktif dalam Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	-			714 orang	279 orang	475.000.000,00	421.035.495,00	421.035.495,00			-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.	Masyarakat Kota Cirebon		780.733.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	05	2.0	00	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200 Orang	135 Orang	275.000.000,00	246.042.625,00	233.918.785,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			315.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah			12				Nasional	Daerah			18		19
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				125 Orang	125 Orang	422.352.936,00	389.400.676,00	363.466.800,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			419.868.886,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	06	2.0	00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	75.033.492,00	75.008.300,00	59.939.840,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			78.444.177,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	06	2.0	00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	1.771.259.800,00	1.740.946.702,00	1.955.181.432,00	Kota Cirebon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Menjaga Stabilitas Politik di Daerah.			2.671.265.551,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
J U M L A H												958.258.088,00	4.419.135.944,00	769.083.758.137,00								1.786.740.928.168,12		



BAB PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2025, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dalam rangka penyesuaian terhadap Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah serta program asta cita, menyelaraskan dengan prioritas nasional, dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Upaya percepatan pencapaian target pembangunan menjadi dasar utama untuk penentuan prioritas program dan kegiatan dalam pengajuan usulan Perubahan RKPD Tahun 2025. Penentuan prioritas program dan kegiatan tersebut merujuk kepada Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD Kota Cirebon 2025-2029.

Perubahan RKPD Tahun 2025 memiliki peran yang penting, yaitu menjadi dasar bagi penyusunan perubahan renja perangkat daerah dan merupakan rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS P-APBD) yang harus segera dibuat setelah Perubahan RKPD ini ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2025, memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi, kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak



mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2025 berupa pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Selanjutnya dalam kerangka manajerial, perlu dipedomani beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon harus konsisten mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Cirebon 2025.
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, disusun dengan memperhatikan juga asumsi makro yang terkait internal dan eksternal Pemerintah Daerah Kota Cirebon, terutama dari aspek kemampuan sumber daya (pegawai/orang) dan pembiayaan serta kewenangan yang dimiliki.
3. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, transparan dan akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 harus menjadi pedoman dan arah bagi unsur pemerintah (birokrasi), dan bekerja sama secara sinergis dengan DPRD, dunia usaha dan atau masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan tahunan.

